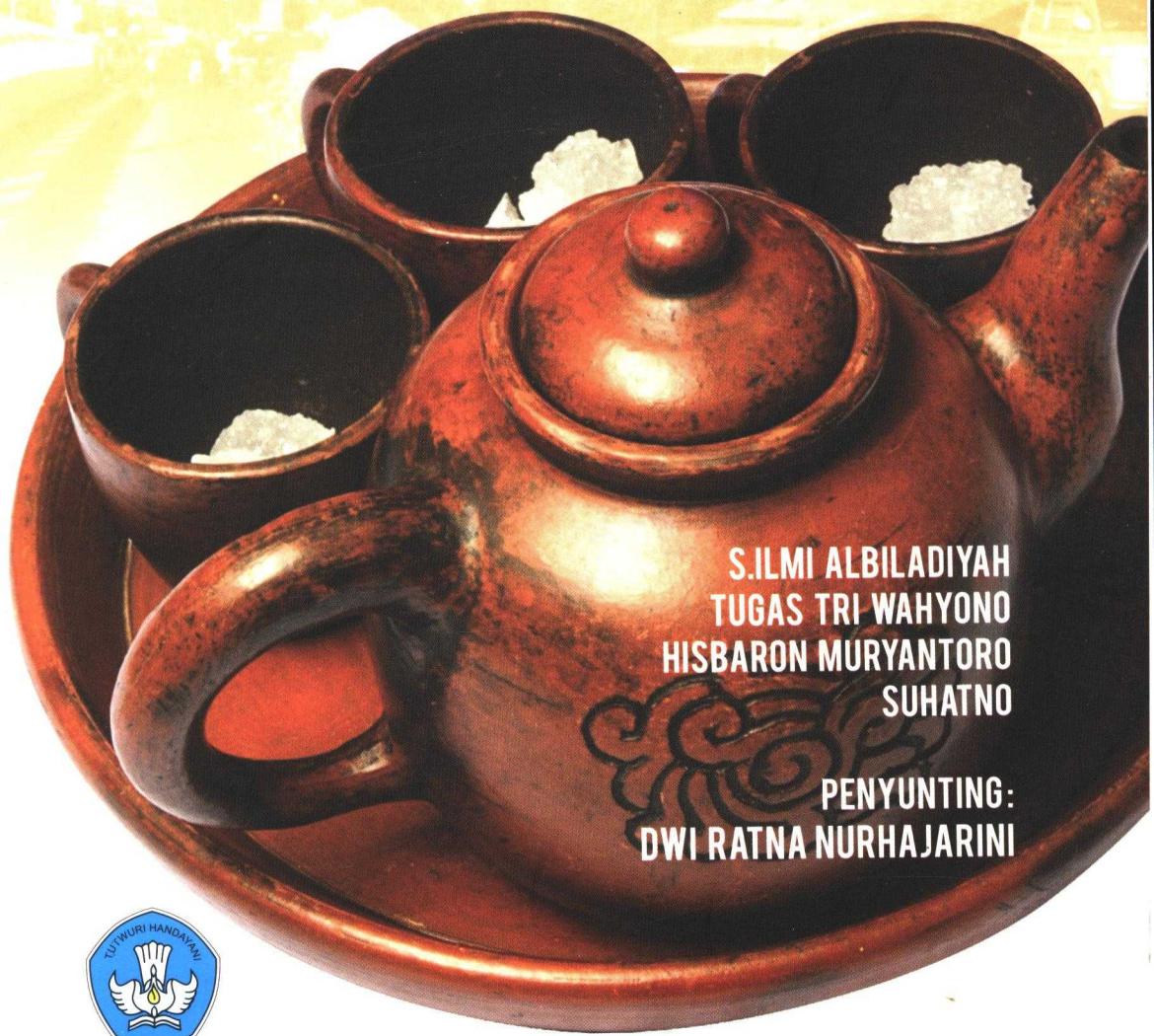


Tegal

Dalam Lintasan Sejarah

SELAMAT DATANG DI TEGAL KOTA BAHARI



S.ILMI ALBILADIYAH
TUGAS TRI WAHYONO
HISBARON MURYANTORO
SUHATNO

PENYUNTING:
DWI RATNA NURHAJARINI



TEGAL DALAM LINTASAN SEJARAH

TEGAL DALAM LINTASAN SEJARAH

Penulis :

S.Ilmi Albiladiyah

Tugas Tri Wahyono

Hisbaron Muryantoro

Suhatno

Penyunting :

Dwi Ratna Nurhajarini



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA YOGYAKARTA**

TEGAL DALAM LINTASAN SEJARAH

© Penulis

Disusun oleh :

S. Ilmi Albiladiyah
Tugas Tri Wahyono
Hisbaron Muryantoro
Suhatno

Penyunting : Dwi Ratna Nurhajarini

Desain sampul : Tim Kreatif Kepel Press

Penata Teks : Tim Kreatif Kepel Press

Diterbitkan pertama kali oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB)

Daerah Istimewa Yogyakarta

Jl. Brigjend Katamso 139 Yogyakarta

Telp : (0274) 373241, 379308 Fax : (0274) 381355

email : senitra@bpsnt-jogja.info

website: <http://www.bpsnt-jogja.info>

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

S. Ilmi Albiladiyah, dkk.

Tegal Dalam Lintasan Sejarah

S. Ilmi Albiladiyah, dkk. Cetakan I, Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB)

Yogyakarta

X + 144 hlm, ; 17 cm x 24 cm

I. Judul

1. Penulis

ISBN : 978-979-8971-42-6

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

SAMBUTAN KEPALA BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA YOGYAKARTA

Puji syukur dianjatkan kehadirat Tuhan YME, karena atas perkenan-Nya, buku ini telah selesai dicetak dengan baik. Tulisan dalam sebuah buku tentunya merupakan hasil proses panjang yang dilakukan oleh penulis (peneliti) sejak dari pemilihan gagasan, ide, buah pikiran, yang kemudian tertuang dalam penyusunan proposal, proses penelitian, penganalisaan data hingga penulisan laporan. Tentu banyak kendala, hambatan, dan tantangan yang harus dilalui oleh penulis guna mewujudkan sebuah tulisan menjadi buku yang baik dan menarik.

Buku yang berjudul “Tegal Dalam Lintasan Sejarah” tulisan Samrotul Ilmi Albiladyah, dkk merupakan tulisan yang menguraikan tentang perjalanan sejarah sosial Kota Tegal sejak masa kolonial hingga reformasi. Ada nilai sejarah yang patut diungkap dalam buku ini, yang tentunya sangat bermanfaat bagi generasi muda saat ini. Setidaknya, aspek sosial-budaya-ekonomi tentang sejarah kota yang selama ini kurang mendapat perhatian menjadi lebih dikenal oleh masyarakat luas.

Oleh karena itu, kami sangat menyambut gembira atas terbitnya buku ini. Ucapan terima kasih tentu kami sampaikan kepada para peneliti dan semua pihak yang telah berusaha membantu, bekerja keras untuk mewujudkan buku ini bisa dicetak dan disebarluaskan kepada instansi, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, peserta didik, hingga masyarakat secara luas.

Akhirnya, ‘tiada gading yang tak retak’, buku inipun tentu masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya, masukan, saran, tanggapan dan kritikan tentunya sangat kami harapkan guna peyempurnaan buku ini. Namun demikian harapan kami semoga buku ini bisa memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya.

Yogyakarta, Nopember 2013
Kepala



Dra.Christriyati Ariani, M.Hum

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	vii
DAFTAR FOTO	ix
I. PENDAHULUAN	1
II. GAMBARAN UMUM TEGAL	13
A. Kondisi Geografis	13
B. Asal Mula Tegal	15
III. TEGAL PADA MASA PERGERAKAN NASIONAL	29
A. Bidang Politik	29
B. Bidang Sosial, Budaya dan Ekonomi	36
IV. TEGAL PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG	61
A. Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya	66
B. Bidang Politik	73
C. Bidang Militer	80

V. PARTISIPASI RAKYAT TEGAL PADA MASA PERANG KEMERDEKAAN	89
A. Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya	89
B. Bidang Politik	98
C. Bidang Pertahanan dan Keamanan	122
VI. PENUTUP	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	131
DAFTAR INFORMAN	137
LAMPIRAN	139

DAFTAR FOTO

Foto 1.	Klenteng Tek Hay Kiong	21
Foto 2.	Gedung DPRD Tegal Dulu Kantor Residen dibangun tahun 1729-1898	22
Foto 3.	SMP Negeri I, dulu MULO Tegal	39
Foto 4.	R.S.U.Kardinah	44
Foto 5.	Stasiun Kereta Api Tegal	48
Foto 6.	Gedung Birao SCS	48
Foto 7.	Menara Air PDAM Tegal	49
Foto 8.	Gedung LANAL Tegal dulu untuk <i>Nationale Handels Bank NV</i>	51
Foto 9.	Pengumpulan padi untuk tentara Jepang	67
Foto 10.	Latihan kemiliteran untuk anak sekolah	84

Catatan :

Foto 1 sampai dengan 8 dari Arsip Kota Tegal

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari daratan dan lautan. Begitu banyak pulau baik besar maupun kecil yang terpisah oleh laut, maka Indonesia juga disebut Nusantara. Dengan demikian transportasi air termasuk sarana yang digunakan sebagai penghubung antara pulau satu dengan lainnya. Keberadaan tempat berlabuh menjadi sangat penting ketika seseorang akan berkunjung ke suatu daerah tujuan, dan pelabuhan pun terbentuk untuk berbagai macam keperluan. Dalam perkembangannya, tempat-tempat seperti yang telah tersebut tadi dapat menjadi kota pelabuhan yang penuh kegiatan berkaitan dengan transportasi laut. Di sisi lain, di pedalaman yang jauh dari pantai kadang-kadang juga bisa tumbuh dan berkembang sebagai sebuah kota lengkap dengan infrastruktur yang tersedia. Baik kota pelabuhan maupun kota yang secara geografis berada di pedalaman, kedua-duanya dapat menjadi rekanan yang saling menguntungkan karena dapat saling melengkapi.

Tempat-tempat yang dipakai untuk pertemuan orang-orang dengan berbagai keperluan termasuk berdagang, berniaga, menjual jasa dan sebagainya, maka tempat tersebut menjadi ramai. Semakin lama tempat

kegiatan tersebut dapat memunculkan adanya sebuah kota, yang tumbuh kembangnya mengandung berbagai aspek kehidupan kota (Tjandrasasmita, 2000:9). Salah satu tempat yang kemudian berkembang menjadi kota adalah Tegal, letaknya di pantai utara Jawa. Sehubungan dengan letaknya yang berada di pantai, maka Tegal merupakan salah satu kota pantai dihuni oleh sejumlah penduduk. Dalam kunjungannya di kota-kota pantai, termasuk Tegal, Tome Pires melaporkan bahwa Tegal pada awal perkembangan Islam telah dihuni oleh penduduk, namun jumlahnya relatif karena memang belum ada sensus penduduk (Tjandrasasmita, 2000:71). Pada masa selanjutnya, Tegal mengalami perkembangan sesuai dengan kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh penduduk maupun pendatang sebagai pedagang atau keperluan lainnya.

Sebagai daerah dan kota pantai, yang sudah lama ada, Tegal menarik untuk dikaji, paling tidak dapat diperoleh sekilas tentang ikhtisarnya. Pada masa lalu Tegal pernah menjadi kota pelabuhan yang cukup ramai. Pelabuhan Tegal pernah ditetapkan menjadi pelabuhan ekspor oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada masa pemerintahan kolonial, keberadaan Tegal terekam melalui kegiatan yang ada di pelabuhan. Sebagai kota pantai, di samping kota-kota lain, yaitu Pasuruan, Tuban, maka Tegal juga termasuk kota yang penting (Purnawati, 2004: 31).

Pentingnya Tegal dalam perjalanan sejarah, dapat diikuti oleh beberapa peristiwa yang menyertainya. Misalnya, pada awal kemerdekaan, setelah pengambilan senjata dari tangan Jepang oleh pejuang Indonesia, di Tegal terdapat pergerakan Tiga Daerah yang mencakup tiga kabupaten, yaitu Tegal, Brebes, dan Pemalang. Gerakan Tiga Daerah, pada tahun 1946 dapat menduduki dan menguasai RRI Tegal. Walaupun pemerintah berhasil meredamnya, namun Gerakan Tiga Daerah ini cukup mengacaukan

Negara RI yang masih sangat muda. Pada masa perang kemerdekaan, di Tegal menjadi tempat cikal bakal munculnya Sekolah Tinggi Pelayaran, di kemudian hari sebagai salah satu lembaga pendidikan yang membanggakan warga Tegal, dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Keberadaan Tegal seperti yang sekarang ini dicapai dengan menapaki jalan panjang, dan berbagai masa telah dilaluinya, misalnya masa Mataram Islam atau bahkan sebelumnya, dilanjutkan masa kolonial, pendudukan Jepang, sampai kemerdekaan. Sebagai suatu daerah yang telah cukup usia, banyak peristiwa yang menjadi pernik-pernik rentetan panjang sejarah Tegal itu sendiri. Sehubungan dengan hal itu perlu dipertanyakan permasalahan tentang Tegal, antara lain: 1) bagaimana awal kemunculannya; 2) bagaimana keadaan pada masa pergerakan nasional; 3) bagaimana keadaan masa pendudukan Jepang dalam bidang sosial ekonomi, politik, dan budaya; 4) bagaimana pengabdian rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan.

Sejalan dengan permasalahan yang ada, maka penelitian ini mempunyai tujuan, sebagai berikut.

1. Melakukan kajian, rekonstruksi, dan membuat dokumentasi perkembangan Tegal.
2. Membuat catatan tentang adanya perubahan-perubahan sosial ekonomi, politik, dan budaya Tegal.
3. Membuat analisa tentang keadaan Tegal dari masa kolonial sampai setelah kemerdekaan serta kemungkinan adanya peristiwa krusial yang memerlukan perhatian lebih untuk analisanya.
4. Mengetahui peran masyarakat Tegal dalam mempertahankan kemerdekaan.

Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain:

1. Tersedianya bahan bacaan yang berisi uraian tentang sejarah lokal khususnya tentang daerah Tegal.
2. Tersedianya data tentang sejarah Tegal, baik pada masa kolonial Belanda, maasa pendudukan Jepang, smpai masa kemerdekaan.

Kajian tentang Tegal ini merujuk pada sumber-sumber tertulis yang sudah ada, antara lain buku yang berjudul *Puncak Kekuasaan Mataram Politik Ekspansi Sultan Agung* yang disusun oleh H.J.de Graaf (2002) menuturkan bahwa pada sekitar abad XVII, Tegal merupakan daerah kekuasaan Mataram. Raja Mataram, memanfaatkan Tegal sebagai tempat transit kurir Mataram yang akan ditugaskan ke Batavia atau Jakarta sekarang. Dituliskan bahwa pada tanggal 15 Juni 1622 seorang kurir dari Tegal berada di Batavia membawa surat dari Raja Mataram, namun tidak ada tanda tangan raja. Disebutkan bahwa dalam surat tersebut Raja Mataram mengundang Gubernur Jenderal yang ada di Batavia untuk berkenan hadir ke Mataram untuk membicarakan beberapa masalah penting yang harus diselesaikan bersama. Bahkan dari pihak Belanda pun juga memanfaatkan Tegal sebagai tempat transit, mengangkut seekor kuda melalui Tegal untuk dikirim ke Mataram di Karta (de Graaf, 2002:89).

Peranan Tegal pada masa Mataram telah diberdayakan sebagai tempat transit hubungan antar daerah, baik oleh Mataram maupun Belanda, itu sangat dimaklumi oleh Tumenggung Tegal sebagai penguasa daerah. Oleh karena itu ketika tahun 1624 pengiriman kuda Arab ke Mataram di Karta tidak melalui Tegal, maka Tumenggung Tegal merasa kecewa. Demikian peranan Tegal pada masa Mataram, pelabuhannya dapat disejajarkan dengan

pelabuhan lain di pantai utara Jawa. Adapun tentang bagaimana keadaan penduduk Tegal disinggung dalam buku lainnya.

Dalam buku *Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-Kota Muslim di Indonesia* yang disusun oleh Uka Tjandrasasmita (2000) mengutip pendapat B.Schrieke yang mencatat daerah-daerah Kerajaan Mataram yang telah tunduk pada VOC, dikatakan bahwa penduduk daerah yang dimaksud dihitung dengan satuan *cacah* (jiwa). Di antara daerah yang dilaporkan jumlah (relatif) penduduknya yaitu Tegal, pada tahun 1706 jumlahnya 7.000 *cacah*, Batang 4.600 *cacah*, Pemalang 4.000 *cacah*, Brebes 1.600 *cacah*.

Menurut Uka Tjandrasasmita (2000), sebuah kota (*town, city*) mengandung berbagai aspek kehidupan kota (*urban-life*) yang kompleks, maka studi tentang kota perlu pendekatan-pendekatan studi arkeologi, histori, sosiologi, antropologi, ekonomi, demografi, politik, planologi, ekologi, dan lain sebagainya. Pendekatan dengan ilmu bantu itu disesuaikan dengan kebutuhan yang bisa mendukung pelaksanaan penelitian, untuk terwujudnya keinginan sebuah pencapaian. Munculnya sebuah kota biasanya berdasarkan konsep sebagai dasar pendiriannya.

Salah satu segi penting dalam perkembangan sebuah kota ialah terdapatnya sarana transportasi yang dipakai untuk mobilitas keluar masuk kota itu, misalnya adanya jaringan jalan raya. Di samping jalan raya, masih terdapat jalan penghubung untuk lalu lintas penduduk (Surjomihardjo, A., 2000:24).

Buku *Kota Lama Kota Baru* merupakan kumpulan tulisan mengemukakan bahwa, keberadaan sebuah kota di Jawa biasanya didasarkan atas konsep kebudayaan tradisional Jawa, misalnya Yogyakarta, sebagai kota yang ada di pedalaman. Dahulu keberadaan Yogyakarta sebagai ibu kota negara / kerajaan yang menjadi pusat pemerintahan dan politik bagi wilayah kerajaannya,

dengan sebutan sebagai wilayah *Negara Agung* (pusat negara). Konsep dan struktur kerajaan demikian sudah berlangsung sejak masa Mataram-Islam sewaktu Sultan Agung bertahta. Perkembangan Yogyakarta sesuai dengan adanya perubahan-perubahan politik, sosial dan ekonomi selama waktu perkembangan tersebut (Djoko Suryo, 2005:35).

Masih dalam buku yang sama menuliskan bahwa ketika membicarakan Kota Yogyakarta, muncul kesan adanya sebuah kota yang tenang dan damai, namun jika melihat realitas sejarah akan berlainan dengan kesan tadi. Setelah dikaji terdapat bukti yang menunjukkan adanya kekerasan, ketidakteraturan, terutama saat kampanye memperlihatkan peristiwa yang dapat dikatakan ekstrem. Hal ini terjadi saat menjelang pemilihan umum pada masa Orde Baru, ditemukannya senjata-senjata tajam, sehingga keadaan menjadi memanas. Untuk meredam kekerasan di Kota Yogyakarta pada tahun 1982 tersebut terpaksa Sri Sultan Hamengku turun tangan (Purwanto, B., 2005: 211-212). Demikian kekerasan di kota tersebut, dapat saja terjadi di kota lain.

Buku-buku tersebut di atas sangat bermanfaat untuk menyusun hasil penelitian tentang Tegal ini. Dalam penelitian tentang Tegal difokuskan pada kajian sejarah lokal dengan pendekatan ilmu sejarah untuk menganalisa perkembangan daerah tersebut. Tentu saja diperhatikan pula tentang kondisi lingkungan alam. Seperti diketahui bahwa secara geografis Tegal berada di daerah pantai utara Jawa. Di samping itu daerah Tegal dialiri sungai-sungai, antara lain Kali Gung, Kali Rambut, maka keberadaannya tak dapat diabaikan begitu saja, karena terbentuknya sebuah dam atau waduk sebagai sumber pengairan agraris sangat penting bagi kemakmuran daerah.

Seperti yang telah diuraikan di dalam beberapa tulisan bahwa sudah sejak lama Tegal sebagai kota maupun daerah yang dipimpin oleh kepala daerah (tumenggung), bahkan kemudian juga dikenal sampai kemerdekaan,

maka apabila di daerah tersebut meninggalkan jejak budaya, objek tersebut juga menjadi sasaran pengamatan.

Penelitian tentang Tegal dalam sketsa sejarah dibatasi oleh lingkup spasial dan temporal. Lingkup spasial mencakup daerah Tegal dan sekitarnya yang sekaligus sebagai materi penelitian. Untuk melengkapi data tentang Tegal diperlukan kajian arsip lama yang tersimpan di Arsip Nasional RI. Adapun lingkup temporal mengambil antara tahun 1908 sampai 1949. Bagi bangsa Indonesia, yang menarik dari tahun 1908 adalah bangkitnya para pemuda dari keterpurukan selama penjajahan, terutama di bidang pendidikan. Hal ini menjadi kendala untuk menjadi lebih maju dan mengakibatkan sempitnya wawasan.

Dengan bangkitnya para pemuda, tahun tersebut juga merupakan masa tumbuhnya kesadaran berbangsa bernegara. Munculnya kesadaran tersebut ditengarai oleh lahirnya organisasi pemuda, Budi Utomo, yang intinya ingin memajukan pendidikan bangsa Indonesia pada umumnya dari ketertinggalan dan kebodohan. Selanjutnya muncul organisasi-organisasi lain yang juga menginginkan kemajuan bangsa (Tirtoprodjo, S.,1982). Tumbuhnya semangat bangsa Indonesia terutama di kalangan pemuda bagaikan virus yang kemudian menyebar ke daerah-daerah yang menginginkan kemajuan. Demikian pula di daerah Tegal terkena demam oleh bangkitnya niat para pemuda untuk lebih maju.

Pola pikir untuk menghadapi penjajah memang harus dirubah, tidak hanya mengangkat senjata saja, namun juga di bidang-bidang lainnya termasuk politik, sosial, budaya dan ekonomi. Untuk mencapai keinginan tersebut diperlukan tindakan sebagai langkah perbaikan kehidupan bangsa ke depan, antara lain pendidikan. Oleh karena itu bidang pendidikan ini pula yang kemudian menjadi perhatian utama para pemuda tahun 1908 yang

kebanyakan tergabung di dalam organisasi-organisasi pemuda pada waktu itu.

Adapun tahun 1949 dipakai sebagai landasan akhir lingkup penelitian, karena tahun tersebut merupakan perolehan hasil perjuangan yang selama bertahun-tahun diupayakan dengan damai maupun dengan mengangkat senjata. Upaya damai misalnya dengan diplomasi, perundingan, mencari jalan keluar dengan permufakatan. Adapun dengan mengangkat senjata artinya melawan yang sering dilakukan oleh kelompok pejuang atau kelompok orang-orang yang disatukan dalam laskar-laskar.

Perjuangan dengan mengangkat senjata yang dilakukan para pemuda karena keadaan memaksa bertindak demikian. Sebagai contoh, dalam kenyataan walaupun kemerdekaan Indonesia telah diumumkan, namun Belanda yang pernah menjajah Indonesia, menginginkan kembali menguasainya. Di sinilah jiwa nasionalisme bangsa Indonesia tertantang, termasuk rakyat Tegal.

Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Sukarno – Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia pada tahun 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan tersebut secara *de facto* bangsa Indonesia belum bisa sepenuhnya mengenyam arti kemerdekaan. Peristiwa demi peristiwa menodai lembaran suci kemerdekaan itu sendiri. Hal tersebut dapat diingat setelah Indonesia lepas dari kekuasaan Jepang, dalam peristiwa bersejarah pada sekitar kemerdekaan. Di daerah Tegal, setelah para pemuda pejuang melucuti senjata dari tangan Jepang, muncul gerakan yang bernama Tiga Daerah.

Gerakan tersebut mencakup daerah kabupaten Tegal, Pemalang dan Brebes, yang membuat kacau suasana, maka di Tegal pun terjadi adanya Peristiwa Tiga Daerah pada tahun 1946 (Djawatan Penerangan, 1953:152). Selanjutnya adanya Agresi Militer pertama pada bulan Juli tahun 1947

dan yang kedua pada bulan Desember tahun 1948, Belanda memaksakan kehendak untuk menguasai Indonesia kembali.

Perjuangan Indonesia tiada henti, dan pada tahun 1949 merupakan saat yang sangat dinanti, adanya pengakuan kedaulatan Indonesia, selanjutnya dilakukan pembenahan-pembenahan dalam pemerintahan. Peristiwa penting itu merupakan kemenangan bangsa yang menjadi modal utama meraih cita-cita nasional, Indonesia merdeka. Namun demikian ketentuan titik tolak awal dan batasan akhir tersebut, tidak menutup kemungkinan dikemukakan pula peristiwa-peristiwa sejarah sebelum dan sesudahnya untuk memperoleh benang merah yang menjembatani dari masa ke masa, sehingga tampak adanya keterkaitan antara peristiwa satu dengan lainnya.

Penelitian tentang Tegal dalam sketsa sejarah menggunakan metode sejarah yaitu dengan cara 1) mengumpulkan data yang relevan dengan topik penelitian, 2) menyeleksi bahan atau sumber-sumber yang tersedia, 3) memilih data otentik, dan 4) menyusun laporan penelitian berdasarkan sumber-sumber yang dapat dipercaya (Gottschalk, 1985:18). Sumber yang dipakai merupakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa dokumen, catatan-catatan, surat-surat penting, arsip-arsip, yang tersimpan di lembaga terkait baik yang berada di daerah maupun pusat, atau perorangan yang menyimpannya dengan alasan tertentu. Adapun sumber sekunder dapat diperoleh dari pustaka, harian, majalah, dan laporan hasil penelitian.

Untuk melengkapi penelitian tentang Tegal ini, dipakai juga metode sejarah lisan. Mengingat kemungkinan masih adanya saksi mata tentang peristiwa-peristiwa penting yang ada di Tegal atau kaitannya dengan daerah lain, maka sejarah lisan merupakan salah satu cara yang dapat membantu pelaksanaan di lapangan. Langkah yang diambil yaitu melakukan wawancara dengan narasumber, baik dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja,

diharapkan akan dapat memperoleh hasil yang bermanfaat bagi penelitian ini. Foto koleksi yang dimiliki narasumber akan sangat membantu dokumentasi sebagai pelengkap laporannya.

Adapun susunan penulisannya yaitu pendahuluan mencakup latar belakang, permasalahan, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, ruang lingkup dan metode. Pada bab selanjutnya dikemukakan tentang gambaran umum tentang kondisi geografisnya. Selain itu, sebagai daerah yang pernah mengalami masa kerajaan (Mataram), dikemukakan pula tentang asal mula keberadaan Tegal, baik dalam sejarah maupun dalam cerita rakyat. Kedatangan bangsa barat ke Indonesia, jika semula ingin berdagang mencari untung, namun dalam perkembangan selanjutnya menjajah. Penjajahan tersebut kemudian memicu bergeraknya para pemuda Indonesia untuk melawan Penjajah dengan cara modern, misalnya dengan membuat wadah, membentuk organisasi untuk menampung aspirasi pemuda. Oleh karena itu dibicarakan juga tentang Tegal pada masa pergerakan nasional.

Pada waktu Jepang berambisi ingin membangun ‘Timur Asia Raya’ mengembangkan sayap kekuasaannya, Indonesia termasuk wilayah yang dikuasainya, sehingga perlu dikemukakan tentang keadaan Tegal pada masa pendudukan Jepang. Berbekal pengalaman dalam menghadapi penjajah, para pemuda pejuang menyingsingkan baju bertekad melawan penjajah termasuk Jepang. Dengan memanfaatkan keadaan yang dirasa menguntungkan, di Jakarta para pemuda pejuang, atas nama bangsa Indonesia, Sukarno-Hatta berhasil memproklamsikan kemerdekaan Indonesia.

Sudah barang tentu kejadian-kejadian pada masa sekitar kemerdekaan ini menarik, maka pada bab ini dikemukakan tentang Tegal pada masa kemerdekaan. Di dalamnya mencakup keadaan pada awal proklamasi, dan tentang perang kemerdekaan. Apabila pada awal proklamasi para pemuda

bangsa Indonesia terlibat dalam kesibukan persiapan kemerdekaan. Akan tetapi setelah proklamasi tahun 1945, Belanda ingin menjajah kembali daerah-daerah di Hindia Belanda. Hal itu mendapat perlawanan dari para pejuang bangsa Indonesia, sehingga terjadilah perang kemerdekaan. Di akhir tulisan dikemukakan tentang kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat dipetik manfaatnya.

II. GAMBARAN UMUM TEGAL

A. Kondisi Geografis

Tegal yang sekarang sebagai kota juga sebagai kabupaten. Sebagai kota, Tegal berbatas dengan Ibukota Brebes, mencakup kecamatan-kecamatan Tegal Barat, Tegal Timur, Tegal Selatan dan Margadana. Sebagai kabupaten, Tegal menempati wilayah yang berbataskan sebelah utara Kota Tegal dan Laut Jawa, sebelah timur Kabupaten Pemalang, sebelah barat Kabupaten Brebes, sebelah selatan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas.

Kabupaten Tegal yang sekarang ini menempati posisi antara $108^{\circ}57'6''$ BT- $109^{\circ}21'30''$ BT dan antara $6^{\circ}50'41''$ LS- $7^{\circ}15'30''$ LS. Daerah wilayahnya terdiri dari daratan 87.879 ha, dan laut yang luasnya 121,50 km². Luas kemiringan daerah terdiri dari tipe datar 0-2% - 46.204,27 ha, tipe bergelombang 2-15% - 14.183,47 ha, tipe curam 15-40% - 19.338,65 ha, tipe sangat curam >40% - 7.253,73 ha. Daerah pantai meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja. Daerah dataran rendah meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu, sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng, dan Pangkah. Daerah dataran tinggi meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari,

Balapulang, Bumijawa, Bojong, sebagian Pangkah dan Kedungbanteng (Hermawan, W., 2009).

Sebelumnya, Tegal merupakan daerah berbentuk karesidenan yang luasnya 53,1 mil geografi atau 1,284 paal persegi (Daryono, Y.dkk.,2008:11). Sebagai daerah berbentuk karesidenan, Tegal terdiri dari kabupaten-kabupaten yaitu Tegal, Pemalang dan Brebes (Daryono, Y.,dkk.,2008:11). Karesidenan Tegal terletak pada $6^{\circ}51'9,4''$ LS dan $109^{\circ}7'49''$ BT. sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur berbatas Karesidenan Pekalongan, sebelah barat daya Karesidenan Banyumas.

Daerah Tegal menempati pantai utara Jawa yang berdekatan dengan Laut Jawa. Menurut catatan yang ditulis pada tahun 1900 oleh orang Eropa, di pantai utara Jawa terdapat kota-kota antara lain Tegal, Banten, Jakarta, Cirebon, Semarang, Jepara, Juwana, Tuban, Gresik, Surabaya, dan Panarukan. Pada sekitar tahun 1515 kota-kota di pantai utara tersebut telah ada yang tertera pada peta yang dibuat Tomé Pires (Kartodirdjo, S., 1992:71).

Tegal terletak di wilayah Jawa bagian tengah. Jawa bagian tengah terdapat pegunungan yang membujur dari arah barat-timur yang menjadi batas selatan daerah wilayah Pekalongan (M.Schaay dan Sutopo, 1952:141, 142). Pegunungan pembatas wilayah antara Tegal dan Pekalongan, berupa tiga buah gunung, yaitu Gunung Pembarisan, Gunung Slamet, Pegunungan Dieng.

Pada dataran tinggi Gunung Slamet terdapat lembah Sungai Serayu. Di lembah ini terdapat hamparan sawah yang menghasilkan padi dan perkebunan tebu terutama di dataran rendah daerah Banjarnegara. Hasil tanaman tebu kemudian banyak yang diproses di pabrik-pabrik menjadi gula (M.Schaay dan Sutopo, 1952:140). Di dataran rendah Jawa Tengah banyak sungai yang pendek-pendek dan deras arusnya, seperti Kali Gung dan Kali

Rambut, sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh alat transportasi perahu. Sungai-sungai di daerah ini banyak yang dimanfaatkan untuk pertanian, dialirkan ke sawah-sawah penduduk. Dataran rendah di daerah ini hasil pertaniannya sangat memadai untuk kebutuhan masyarakat.

Sungai-sungai tersebut kerap membawa lumpur ke laut sehingga mengakibatkan adanya pendangkalan laut utara Jawa. Adanya pendangkalan tersebut dapat mengakibatkan gangguan pada pendaratan perahu. Pernah dilaporkan bahwa pelabuhan Tegal dan Pekalongan keadaannya kurang baik jika dibandingkan dengan pelabuhan Semarang (M.Schaay dan Sutopo, 1952:142). Walaupun disebutkan pelabuhan Tegal kurang baik, namun pelabuhan ini pernah sebagai tempat, atau kota pelabuhan yang ramai. Keadaan tersebut seperti yang dikatakan Tomé Pires bahwa pada masa awal abad ke-16 Tegal pernah sebagai kota pelabuhan yang penting (H.J.de Graaf dan Th.Pigeaud,2001:126). Pada masa Mataram, Tegal termasuk wilayah kerajaan ini, bahkan ketika Sunan (Susuhunan) Amangkurat I meninggal pada tanggal 12 Juli 1677 kemudian dimakamkan di Tegal, maka ia kemudian disebut Sunan Tegalwangi.

B. Asal Mula Tegal

1. Cerita Rakyat

Cerita rakyat yang mengemukakan tentang asal mula keberadaan Tegal mempunyai versi yang berbeda-beda. Cerita rakyat tersebut ada yang berkaitan dengan terjadinya Tegal, namun ada pula yang berkaitan dengan tindakan orang selanjutnya digunakan sebagai nama kota tersebut. Cerita yang berupa kisah, memaparkan bahwa awal kemunculan kata 'tegal' yang kemudian menjadi sebuah desa lalu berkembang menjadi kota, erat kaitannya

dengan tokoh masa lalu. Tokoh yang dimaksud yaitu Pangeran Panggung sebagai pembuka (*babad*) daerah dan pemimpin awal tempat tersebut. Diceritakan bahwa pada masa pemerintahan Demak daerah Tegal di bawah pimpinan Pangeran Panggung atau Raden Panggung yang kemudian juga disebut Mbah Panggung (Rochani,AH., 2005:115-153).

Cerita tentang Pangeran Panggung ini bermacam-macam dan simpang siur. Diceritakan bahwa ia sebagai putra Sunan Ampel, sebagai putra Sunan Kalijaga, sebagai putra Raden Fatah, sebagai putra Brawijaya V. Dikisahkan bahwa sesudah memeluk Islam, Pangeran Panggung kemudian bernama Abdurrahman. Setelah Pangeran Panggung berguru agama Islam pada Syeh Siti Jenar, maka ia menetap di Tegal sambil mengajarkan agama Islam. Sehubungan dengan ketokohan Pangeran Panggung dengan kegiatanya itu, maka Tegal menjadi lebih ramai karena banyak dikunjungi orang yang akan berguru agama.

Cerita rakyat lainnya menuturkan bahwa Tegal berasal dari kata *tētēgal* yang artinya lahan pertanian kering (*tegalan*) yang dapat ditanami palawija. Daerah ini berkaitan dengan adanya seorang tokoh bernama Ki Gede Sebayu. Ia beserta pengikutnya dari Pajang mengembara ke arah barat mencari seorang bernama Ki Wanakusuma, anak Raden Panggung. Orang-orang yang mengikuti Ki Gede Sebayu dalam pengembalaan tersebut mempunyai keterampilan bermacam-macam, yaitu membuat perlengkapan dapur, alat pertukangan, perabotan gerabah, membuat kue-kue, tenun, dan membuat perhiasan dari emas. Akhirnya Ki Gede Sebayu bertemu dengan Ki Wanakusuma di *tētēgal*.

Di tempat tersebut Ki Gede Sebayu bertempat tinggal dan berguru kepada Ki Wanakusuma. Ia kemudian menyiarakan agama Islam di tempat tersebut, mengajarkan tentang keesaan Tuhan (ketauhidan), ahlak mulia,

budi pekerti yang baik. Makin lama tempat itu ramai menjadi kota yang disebut Tegal.

Untuk memajukan daerah, di tempat tersebut Ki Gede Sebayu membangun bendungan Danawarih, dari aliran Kali Gung. Pembangunan bendungan Danawarih merupakan kerja besar untuk memajukan daerah Tegal. Dirasa bahwa bendungan merupakan prasarana penting untuk mencukupi kebutuhan irigasi di bidang pertanian yang menjadi mata pencaharian masyarakat petani. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, Ki Gede Sebayu tidak menemui kesulitan soal tenaga, karena mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Dengan memanfaatkan sungai-sungai yang ada di daerah Tegal, bidang pertanian dapat maju, dan menjadikan daerah tersebut subur makmur, karena tercukupi kebutuhan pangan penduduk.

Berita tentang keberhasilan Ki Gede Sebayu dalam rangka memajukan daerah Tegal kemudian terdengar oleh Panembahan Senapati di Mataram. Ki Gede Sebayu yang berpangkat *juru demung* kemudian menerima pangkat sebagai *demang* dari Panembahan Senapati. Berkat jasa-jasanya itu pula maka pada tahun 1596 Ki Gede Sebayu diangkat sebagai adipati Tegal. Tidak sia-sia ia membangun Tegal dengan kerja keras untuk mewujudkan sebuah daerah yang lebih tertata dilengkapi dengan prasarana yang sangat diperlukan dalam pembangunan sehingga dapat tercukupi kebutuhan hidup masyarakatnya.

Dalam catatan lainnya mengatakan bahwa sebelum pemerintahan Panembahan Senapati berakhir, Ki Gede Sebayu diangkat sebagai adipati Tegal secara difinitif pada tanggal 12 Rabi'ul Awal atau Maulud tahun 1010 Hijriyah atau tanggal 18 Mei 1601 (Rochani,AH., 2005:153). Sehingga dapat disebutkan bahwa penguasa pertama yang memegang pemerintahan tradisional di Tegal adalah Ki Gede Sebayu. Ia mempunyai putri, Raden Ayu

Siti Giyanti Subakeksana yang kemudian diperisteri Pangeran Purbaya anak Panembahan Senapati (Rochani,A.H., 2005:115). Dalam cerita rakyat ini tersirat adanya tumbuh kembang daerah yang kemudian disebut Tegal, dan sampai sekarang nama tersebut masih tetap dipakai.

Cerita rakyat lain yang berlatarbelakang sejarah berkaitan dengan tindakan seseorang, mengenai asal kata "tegal" adalah berasal dari kata *tegēl*, yang artinya tega atau sampai hati (Suara Merdeka, 1982: V). Pada masa Mataram ada dua orang saudara seperguruan yaitu Martoloyo dan Martopuro. Martoloyo adalah putera Panembahan Senopati dengan Retno Dumilah, juga sebagai salah satu adipati daerah pantai utara, sedangkan Martopuro adalah Adipati Jepara. Keduanya berguru di Padepokan Lembah Manah pada Kyai Lembah Manah. Di hadapan Sang Guru, keduanya pernah menyatakan janji : *sabaya mukti sabaya pati*, artinya (kalau bahagia) bahagia semua atau (kalau mati) mati semua. Akan tetapi dalam perjalanan waktu terdorong oleh situasi pada masa itu kemudian berakibat lain, tidak seperti yang diharapkan.

Diceritakan bahwa setelah kegagalan Sultan Agung ke Batavia (Betawi / Jakarta), ia kembali ke Mataram. Sepeninggal Sultan Agung, tahta kerajaan selanjutnya di bawah pimpinan Amangkurat I. Pada waktu raja ini memerintah, di Mataram terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Trunojoyo beserta pasukannya yang kuat. Amangkurat menyingkir ke arah barat, Ajibarang, namun fisiknya sudah tidak kuat lagi sehingga meninggal dunia. Selanjutnya Mataram di bawah Amangkurat II, namun raja ini kena pengaruh Belanda.

Untuk memadamkan pemberontakan Trunojoyo, Amangkurat II mengadakan sidang istimewa di Jepara. Dalam pertemuan penting tersebut dihadiri oleh adipati pantai utara yaitu Martoloyo, dan sengaja diundang pula pihak

Belanda sebagai tamu. Dalam sidang tersebut Belanda sanggup membantu menumpas pemberontakan Trunojoyo dengan catatan bahwa semua pantai utara harus diserahkan kepada Belanda. Mendengar persyaratan tersebut, sebagai salah satu adipati pantai utara Martoloyo tersinggung tidak setuju dan meninggalkan sidang.

Keluarnya Adipati Martoloyo meninggalkan sidang itu menjadikan kemarahan Belanda. Di tengah kemarahan Belanda, maka ia mempengaruhi Amangkurat II supaya menghukum Martoloyo. Amangkurat II yang sudah kena pengaruh Belanda itu menugaskan Martopuro adipati Jepara untuk mengajak Martoloyo kembali berpihak kepada raja. Akan tetapi mengetahui rajanya telah berpihak Belanda, Martoloyo menolak, maka terjadilah perang tanding. Keduanya sampai hati (*tēgēl*) saling merobohkan, satu lawan satu lupa kalau saudara seperguruan yang pernah berjanji bersama dalam bahagia atau mati, *sabaya mukti sabaya pati*. Akhirnya keduanya mati di ujung satu keris bernama *Si Kasur*. Oleh karena masing-masing sampai hati (*tēgēl*) itulah kemudian kata *tēgēl* ini menjadi 'Tegal' sebagai nama tempat (*Suara Merdeka*, 1982:V). Dalam cerita ini asal Kota Tegal dikaitkan dengan tindakan kedua orang yang bertikai sampai hati (Jawa: *tēgēl*) saling merobohkan dan membunuh.

2. Tegal Masa Mataram di Bawah Pengaruh Belanda

Pada tahun 1653 Tegal di bawah pimpinan Tumenggung Wirasetya¹ yang semula sebagai Bupati Wedana Pesisiran Jepara (Kartodirdjo, S., 1977 a :21). Wirasetya atau Wirasuta (?) diangkat oleh Sunan Amangkurat I menjadi penguasa yang membawahi daerah Tegal sampai Losari dengan gelar

¹ Di tempat lain Wirasetya disebut dengan nama Wirasuta

Adipati Arya Martalaya (Daryono, Y.dkk.,2008:17) Setelah pemerintahan Amangkurat II di Mataram, Tegal di bawah Pangeran Adipati Anom. Demikian peranan Tegal pada masa Mataram, sebagai kota pelabuhan yang ramai, sehingga pelabuhannya dapat disejajarkan dengan pelabuhan lain di pantai utara Jawa.

Seperti diketahui bahwa Tegal yang berdekatan dengan pantai itu mempunyai pelabuhan yang telah lama beroperasi sejak masa Majapahit berlangsung sampai masa Demak juga masa Mataram yang bertambah ramai. Pelabuhannya pun diramaikan dengan adanya perniagaan yang semakin besar. Hasil bumi daerah Tegal merupakan andalan sebagai barang dagangan yang diperjualbelikan. Tegal merupakan kota pantai yang mempunyai pelabuhan(Purnawati, 2004: 31). Dibandingkan dengan daerah-daerah di sekitarnya, Tegal merupakan daerah yang lebih ramai. Hal ini dapatlah dimaklumi, karena sebagai kota pelabuhan merupakan tempat yang strategis bertemuanya pendatang dari berbagai penjuru untuk keperluannya, baik dari Nusantara sendiri maupun dari luar, dari Eropa, juga dari Asia termasuk Tiongkok. Etnis Tionghoa yang terkenal ulet dalam mencari nafkah ini telah lama menjelajah dunia termasuk mereka yang masuk Tegal.

Untuk memenuhi kebutuhannya dalam beribadah, pada tahun 1690 dibuatlah bangunan tempat peribadatan Tionghoa (krenteng) di Tegal, tepatnya di Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.

Sampai sekarang masih dapat disaksikan krenteng tersebut di Jalan Gurameh 4 Tegal, bernama Klenteng Tek Hay Kiong di bawah Yayasan Tri Darma (Arsip Kota Tegal: Inventaris Nomor 12, lihat Foto 1). Keramaian Tegal dapatlah dimaklumi karena penduduk yang berasal dari berbagai daerah, dan jumlah penduduknya yang lebih banyak dibandingkan dengan kota di sekitarnya.



Foto 1. Krenteng Tek Hay Kiong.

Mengutip pendapat B.Schrieke, ia mencatat daerah-daerah Kerajaan Mataram yang telah tunduk pada VOC, dikatakan bahwa penduduk daerah yang dimaksud dihitung dengan satuan *cacah*. Di antara daerah yang dilaporkan jumlah (relatif) penduduknya yaitu Tegal, pada tahun 1706 jumlahnya 7.000 *cacah*, Batang 4.600 *cacah*, Pemalang 4.000 *cacah*, Brebes 1.600 *cacah* (Tjandrasasmita, U.,2000).

Semenjak tahun tahun 1729 sampai tahun 1898 Tegal sebagai karesidenan (terdiri dari 3 kabupaten; Tegal, Pemalang, Brebes), dan ibukotanya berada di Kota Tegal. Sebagai residen yang pertama adalah J.Thierens, sedangkan yang terakhir adalah G.J.P Vallete (Daryono,Y., 2008:32). Bangunan yang dulu pernah dipakai sebagai Kantor Residen, kini difungsikan sebagai Gedung DPRD Tegal (lihat Foto 2).

Kekuasaan pemerintah Hindia Belanda sangat mempengaruhi pemerintahan tradisional (kerajaan) di Jawa, Mataram, terutama setelah adanya keberhasilan Belanda memecah belah kerajaan. Belanda banyak

melakukan intervensi terutama terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh kerajaan Jawa. Hal itu dilakukan demi eksistensi Belanda di tanah jajahan dan memperoleh kemudahan mengambil keuntungan. Bahkan pada waktu Belanda sangat membutuhkan di bidang keuangan, mengincar tanah jajahan sebagai sumbernya.



Foto 2. Gedung DPRD Tegal Dulu Kantor Residen dibangun tahun 1729-1898

Di sisi lain, dalam perdagangan, Belanda (kongsi dagangnya; Kompeni) juga mempunyai tujuan ingin mendapatkan hak-hak istimewa. Untuk mencapai keinginan dan dapat mengontrol jalannya perdagangan, maka daerah kekuasaannya diperluas. Pada awalnya diusahakan untuk dapat menguasai atas pelabuhan-pelabuhan, kemudian berkembang mencakup sepanjang daerah pantai. Pengembangan kekuasaan selanjutnya yaitu pada pertengahan abad ke-18, saat perdagangan rempah-rempah mengalami kemunduran, Belanda mewujudkan hak-hak istimewa kedaulatannya sejauh diperlukan untuk mendapatkan hasil bumi dari Jawa (Furnivall, J.S.,2009:36).

Daerah-daerah wilayahnya yaitu sekeliling Batavia dikenal dengan nama *Ommelanden* atau daerah jajahan, di bawah langsung pemerintah Belanda. Adapun daerah Priangan diserahkan kepada bupati-bupati, mereka sebagai pembantu-pembantu Kompeni. Akan tetapi dalam praktek para bupati ini merupakan tuan-tuan tanah kecil di daerahnya, daerah pantai dari Tegal sampai Besuki. Bupati-bupati termasuk yang ada di Tegal adalah penguasa bawahan Belanda seperti semula (Furnivall, J.S.,2009:37).

Sebelum di bawah penguasa Kompeni, para bupati yang ada di daerah-daerah merupakan penguasa daerah bawahan Mataram. Akan tetapi setelah kerajaan tradisional ini di bawah pengaruh Kompeni, maka kekuasaan para raja merupakan kemerdekaan fiktif karena walaupun 'merdeka' namun tetap sebagai bawahan Kompeni. Namun demikian, kabupaten merupakan unit formal pemerintahan. Sebagai unit formal, maka bupati sebagai penguasa daerah kabupaten, harus tunduk pada semua perintah wakil Kompeni setempat. Dalam kenyataan, bupati pada umumnya mengurus hal-hal yang bersifat komersial misalnya penyerahan hasil bumi antara lain hasil kayu, kapas, nila dan kopi (Furnivall, J.S.,2009:37). Setelah organisasi dagang VOC bubar, kekuasaan diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda yang meneruskannya.

Sehubungan dengan adanya berbagai kepentingan pemerintah Belanda yang membutuhkan biaya operasional, maka pada tahun 1830 mempercayakan Johannes Van den Bosch sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia. Kebijakan yang diterapkan Van den Bosch yaitu dengan mengadakan sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) yang ketentuan-ketentuannya tercantum dalam *Staatsblad; Lembaran Negara* tahun 1834, nomor 22 (Kartodirdjo, S.dkk.,1977 a :74).

Dalam tanam paksa disebutkan ketentuan-ketentuan seperti berikut.

- 1) Persetujuan penyediaan tanah yang akan ditanami tanaman dagangan di atas tanah penduduk,
- 2) Lahan/tanah yang dimaksud tidak melebihi 1/5 dari seluruh tanah milik penduduk,
- 3) Pekerjaan menanam tanaman dagangan tidak melebihi pekerjaan menanam padi,
- 4) Tanah untuk menanam tanaman dagangan dibebaskan dari pajak,
- 5) Hasil tanaman dagangan di lahan yang ditentukan harus diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda, jika hasil tanaman dagangan nilainya melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, maka selisih kelebihannya diserahkan rakyat,
- 6) Kegagalan panen yang bukan disebabkan kelalaian rakyat menjadi tanggungjawab pemerintah Hindia Belanda,
- 7) Penduduk yang akan mengerjakan tanah mereka di bawah pengawasan kepala-kepala mereka. Pegawai-pegawai Eropa akan membatasi diri pada pengawasan jika dilakukan pembajakan tanah, panen, pengangkutan tanaman-tanaman supaya berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya (Kartodirdjo, S.dkk., 1977 a :77).

Ketentuan dalam tanam paksa itu jika dijalankan dengan betul tidak akan memberatkan. Akan tetapi dalam pelaksanaan sesungguhnya sangat memberatkan rakyat karena tidak dengan persetujuan seperti dalam ketentuan, tetapi didasarkan atas paksaan. Dalam tanam paksa yang diberlakukan di tanah jajahan termasuk di Jawa, penduduk harus menanam tanaman yang menguntungkan yaitu kopi, tebu untuk produksi gula, kapas, dan tarum yang laku di pasar Eropa. Hasilnya pun harus diserahkan kepada pemerintah

Belanda. Van den Bosch melihat bahwa dalam pemerintahan tradisional, kekuasaan raja Jawa bersifat mutlak yang berkuasa penuh atas tanah yang menjadi kekuasaannya beserta dengan penduduknya. Sehubungan dengan hal itu, dalam menjalankan tanam paksa juga didasarkan atas hukum adat, siapa yang berkuasa maka dapat menguasai semuanya.

Oleh karena Mataram telah terpecah (1755) di bawah pengaruh Belanda, maka Van den Bosch sebagai gubernur jenderal atas pemerintah Belanda berkuasa mengendalikannya. Keberadaan Belanda di Tegal ini juga mempunyai tentara yang dilengkapi dengan persenjataannya. Temuan senjata Belanda berupa meriam pada tahun 1981 oleh penduduk yang sedang menggali tanah di dukuh Paweden, Kota (dulu kotamadya) Tegal membuktikan kekuatan persenjataan pihak Belanda. Meriam dari besi yang ditemukan tersebut buatan tahun 1783, berukuran panjang 180 cm, garis tengah 28 cm dan lubang laras 10 cm. Meriam tersebut juga mempunyai lubang sulut dengan pegangan pada bagian tengah senjata.

Pada waktu Belanda mulai menjalankan tanam paksa pelaksanaannya didasarkan menurut hukum adat (seperti raja Jawa) yang berkuasa di suatu daerah maka ia berkuasa atas tanah dan penduduknya (Sagimun, 1988: 139). Demi kepentingan Belanda, mereka juga berkuasa menyuruh penduduk untuk menanami 1/5 dari tanahnya dengan tumbuh-tumbuhan yang jenisnya ditetapkan oleh pemerintah Belanda, yaitu kopi, tebu, kapas dan tarum. Bagi penduduk yang tidak mempunyai tanah, maka ia harus kerja rodi yaitu kerja paksa tanpa imbalan untuk membangun prasarana pembangunan jalan raya, jembatan (Kartodirdjo, S.,dkk.,1977 a :95).

Dalam pelaksanaan tanam paksa petani banyak merasakan kesengsaraan, dan terjadi kemerosotan hidup di kalangan masyarakat, sementara itu keuntungan mengalir ke Negeri Belanda. Saldo keuntungan dalam sistem

tanam paksa ini, yang masuk ke kas negeri Belanda besar sekali. Antara tahun 1832 dan 1867 diperoleh keuntunganƒ 967 juta, untuk tahun 1867 dan 1877 jumlah keuntunganƒ 287 juta (Kartodirdjo, S.,dkk, 1977 b: 95). Secara etis pemerintah (Belanda) berhutang budi terhadap penduduk pribumi yang telah melaksanakan program tanam paksa tersebut.

Kesadaran akan pentingnya perikemanusiaan tumbuh di kalangan politisi Belanda yang ingin memperhatikan nasib penduduk di tanah jajahan, termasuk Indonesia. Pandangan tentang kemanusiaan terhadap orang pribumi di daerah jajahan menarik orang-orang Belanda pemerhati masalah kemanusiaan. Selanjutnya program perbaikan nasib penduduk pribumi menjadi agenda penting partai-partai politik di Belanda. Bertolak dari pandangan tersebut kemudian muncul politik etis yang memandang perlunya menggalang kerjasama antara bangsa Eropa dengan penduduk pribumi untuk memajukan tanah jajahan termasuk Indonesia.

Untuk menguatkan konsep tentang politik etis tersebut termasuk memajukan Indonesia, maka pada tahun 1891 salah seorang anggota Parlemen yaitu Van Dedem mengutarakan bahwa keuangan Indonesia harus dipisahkan dengan Negeri Belanda. Hal yang harus diperjuangkan juga antara lain kemajuan rakyat (Indonesia) misalnya dengan membuat bangunan sarana umum, desentralisasi yang selanjutnya dibentuk pemerintah-pemerintah daerah sehingga kebijakan bisa ditangani masing-masing daerah, kesejahteraan rakyat dan tindakan-tindakan yang konstruktif (Kartodirdjo, S.dkk., 1977 b:35).

Upaya perbaikan kehidupan masyarakat selanjutnya juga disuarakan dengan serius oleh Van Kol, Van Deventer dan Brooscooft, yang mengatakan bahwa keadaan di Indonesia sangat merosot. Mereka mengecam bahwa dalam jangka waktu lama Pemerintah Hindia Belanda telah mengambil

keuntungan dari penghasilan rakyat dan tidak mengembalikannya sama sekali. Dalam tulisannya pada tahun 1899 Van Deventer mengatakan hal itu sebagai hutang kehormatan, karena Belanda memang mengambil keuntungan besar dari rakyat pribumi di tanah jajahan. Oleh karena itu hutang tersebut harus dikembalikan (Kartodirdjo,S.dkk,1977 b:36).

Untuk memajukan rakyat pribumi, Fock mengatakan bahwa bidang pendidikan harus mendapat perhatian, karena akan memperkuat sumber daya masyarakat di bidang administrasi. Selain hal tersebut perlu dibangun sarana-sarana untuk kemajuan di bidang-bidang pertanian, transportasi, juga bidang lainnya. Dianjurkan untuk membangun irigasi, pemberian kredit pertanian, pembangunan jalan kereta api, mendorong adanya industri. Dengan kata lain Indonesia harus menjadi daerah yang dikembangkan, ditingkatkan dan disejahterakan, bukan lagi sebagai daerah yang diambil keuntungannya saja (Kartodirdjo, S.dkk.,1977 b: 37,38).

Politik etis menitikberatkan pada irigasi, edukasi dan transmigrasi. Pemerataan penempatan penduduk dilaksanakan untuk mengurangi kepadatan di suatu daerah dan mengisi daerah yang jarang penduduknya. Munculnya beberapa pabrik, perusahaan, dan pusat kegiatan industri di luar Jawa sangat membutuhkan tenaga kerja. Dalam pelaksanaan pemakaian tenaga kerja dihargai (upah buruh) sangat murah. Dengan murahnya upah buruh itu menguntungkan para pengusaha dan pedagang. Sehingga pelaksanaan politik etis mengakibatkan kemunduran kesejahteraan penduduk pribumi (Kartodirdjo,S.,1992: 32).

Walaupun dalam pelaksanaan politik etis terjadi kemunduran kesejahteraan penduduk, namun dunia pendidikan mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Kesadaran akan pentingnya pendidikan dan pengajaran untuk memperluas cakrawala ilmu pengetahuan timbul di kalangan pemuda

Indonesia. Pengalaman di alam penjajahan menimbulkan rasa nasionalisme di masyarakat terutama para pemuda, sehingga muncul keinginan untuk membentuk sebuah wadah bersama. Kiranya bukan masanya lagi menghadapi penjajah dengan angkat senjata, tetapi dengan akal budi, ilmu pengetahuan yang memadai, dengan diplomasi. Periode ini dikenal dengan Pergerakan Nasional ditandai kelahiran organisasi pemuda di tahun 1908 yang bernama Budi Utomo.

III. TEGAL PADA MASA PERGERAKAN NASIONAL

A. Bidang Politik

Sejak tahun 1908 Bangsa Indonesia menentang kekuasaan kolonial menginjak phase baru yaitu phase Pergerakan Nasional. Adapun yang dimaksud Pergerakan Nasional Indonesia adalah perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan terutama dengan menggunakan organisasi dalam bentuk modern.

Lahirnya pergerakan kebangsaan Indonesia pada tahun 1908 merupakan jasa Dr. Wahidin Sudirohusodo mempunyai cita-cita untuk memajukan bangsanya terutama dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Cita-cita tersebut akan diwujudkan dengan mendirikan *Studie Fonds* guna membiayai anak-anak bumi putra yang cakap tetapi tidak mampu melanjutkan sekolah.

Pada tahun 1906 Dr. Wahidin Sudirohusodo mengunjungi beberapa kota di Jawa dengan tujuan mencari sumbangan dan menjelaskan apa yang menjadi cita-citanya. Cita-cita luhur Dr. Wahidin Sudirohusodo tidak mendapat tanggapan positif dari kaum tua yang umumnya menjadi pegawai pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi kaum muda, terutama para mahasiswa *School Tot Opleiding Van Indische Artsen* (STOVIA) atau

Sekolah Dokter Jawa di Batavia memberi tanggapan secara positif. Para mahasiswa itu kemudian mendirikan Budi Utomo yang mempunyai tujuan lebih luas daripada *Studie Fonds*.

Dengan dipelopori oleh Budi Utomo lalu berdiri organisasi-organisasi modern yang lain di wilayah Indonesia. Lahirnya pergerakan kebangsaan Indonesia sejak tahun 1908 tidak semata-mata disebabkan oleh cita-cita dan anjuran Dr. Wahidin Sudirohusodo saja. Segala sesuatu yang telah dilakukan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo merupakan faktor yang mempercepat. Banyak faktor yang menyebabkan lahirnya pergerakan kebangsaan Indonesia. Antara faktor satu dengan yang lain tak terpisahkan, tetapi saling berhubungan. Adapun faktor-faktor tadi adalah :

Faktor dari dalam:

1. Dilaksanakannya politik etis melahirkan golongan terpelajar yang memperoleh pendidikan dan ilmu pengetahuan Eropa. Mereka yang mempunyai pikiran maju, mempelopori perjuangan bangsanya untuk memperoleh kemerdekaan dengan cara modern.
2. Penindasan, kekejaman dan ketidakadilan yang dilakukan oleh Belanda terhadap Bangsa Indonesia menimbulkan kebencian dan rasa tidak puas. Kebencian dan ketidakpuasan tadi pada suatu saat akan meledak menjadi perjuangan melawan penjajahan.
3. Bangsa Indonesia lambat laun sadar akan harga dirinya sebagai suatu bangsa yang ingin hidup merdeka seperti bangsa-bangsa lain. Hal ini akan menimbulkan hasrat untuk berjuang memperoleh kemerdekaan.

Faktor dari luar:

1. Adanya perengaruh pergerakan kebangsaan India yang telah mulai sejak tahun 1885 dan lambat laun makin radikal pada permulaan abad XX.

2. Kemenangan Jepang terhadap Rusia tahun 1905 menyadarkan bangsa-bangsa Asia akan kekuatannya. Bangsa Asia ternyata mampu mengalahkan Bangsa Eropa yang selalu dianggap superior. Jadi bangsa Indonesia pun akan mampu mengalahkan bangsa Belanda yang membelenggunya dengan rantai penjajahan (Tirtoprodjo, S, 1982 : 5-6).

Budi Utomo yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 mula-mula bersifat kedaerahan yaitu Jawa sentris. Hal ini disebabkan anggotanya golongan atas yang terdiri kaum bangsawan dan terpelajar. Akan tetapi dalam perkembangannya Budi Utomo bersifat nasional. Budi Utomo dalam perkembangannya memiliki banyak cabang. Hampir tiap kota di Jawa berdiri Cabang Budi Utomo termasuk Tegal.

Pada tahun 1912 berdiri Sarekat Islam yang bertujuan memajukan perdagangan bangsa Indonesia, memajukan kecerdasan rakyat dan hidup menurut perintah agama Islam. Haji Umar Said Cokroaminoto salah seorang tokoh Sarekat Islam berhasil menjadikan Sarekat Islam sebagai suatu organisasi besar dan benar-benar bersifat kerakyatan. Sarekat Islam mempunyai banyak cabang termasuk di Tegal. Keberadaan Sarekat Islam di Tegal telah membawa pengaruh baru terhadap pernyataan atau protes dari masyarakat Tegal melalui cara-cara yang lebih terbuka dan langsung seperti pemogokan.

Pada tahun 1919 Sarekat Islam mengadakan Kongres IV di Surabaya. Dalam Kongres Sarekat Islam IV ini R.M. Suryopranoto menyampaikan gagasannya tentang aksi massa dengan pemogokan. Aksi mogok ini dipandang sesuai dengan keadaan yang ada. Hal ini disebabkan perusahaan-perusahaan berkepentingan menaikkan volume produksi. Tenaga kerja adalah

faktor produksi yang penting, maka buruh berada dalam posisi yang sangat dibutuhkan. Agar aksi-aksi itu lebih terorganisir, dibentuklah sebuah federasi buruh yang diberi nama Persatuan Pergerakan Kaum Burtuh (PPKB) atau *Vakcentrale*. Pembentukan PPKB ini berdasarkan keputusan rapat Sarekat Islam pada akhir Desember 1919. Sebagai keputusan lain dari rapat itu adalah dibentuknya susunan pengurus PPKB yaitu Semaun (ketua), RM. Suryopranoto (wakil ketua), Najoan (sekretaris) dan Bergsma (bendahara).

Sejak PPKB berdiri dibentuklah cabang PPKB di seluruh Jawa termasuk Tegal. Dari sinilah pada pertengahan tahun 1920 muncul aksi-aksi pemogokan secara hampir menyeluruh. Namun aksi pemogokan ini rupanya masih bersifat lokal, sebab inisiatif muncul dari masing-masing cabang PPKB. Dari aksi-aksi yang lebih bersifat lokal ini, aksi pemogokan pada pabrik gula adalah yang paling dominan. Hal ini disebabkan buruh pabrik gula mengalami eksplorasi yang paling parah. Pada saat itu semua pabrik gula yang ada di Tegal melakukan pemogokan (Budiawan, 2006 : 102-104). Sebagai sebuah kota Tegal telah memiliki pabrik-pabrik gula yang dapat menyangga perekonomian daerah setempat. Akan tetapi seiring dengan adanya aksi pemogokan tersebut pabrik gula yang ada di Tegal juga mogok. Adapun pabrik gula di Tegal yang melakukan pemogokan yaitu Pabrik Gula Balapulang, Dukuhringin, Kemanglen, Ujungrusi, Pagongan, Pangkah, dan Kemantran. Pemogokan tersebut tidak lepas dari peranan RM. Suryopranoto sebagai Pimpinan *Personnel Fabriek Bond* (PFB). PFB merupakan sebuah organisasi buruh yang mewakili kepentingan para buruh pabrik gula dan dirikan di Yogyakarta pada tahun 1918 oleh RM. Suryopranoto.²

2 Wawancara dengan Bapak Drs. Samsuri Gondokusumo pada tanggal 28 Juni 2010 di Slawi.

Pada tanggal 12 Januari 1922 terjadi pemogokan pegawai pegadaian di Yogyakarta. Pemogokan pegawai pegadaian ini terjadi karena pemerintah kolonial memecat para kuli dan mengalihkan pekerjaan kuli-kuli kepada para pegawai pegadaian serta nasib buruh pegadaian sangat menyedihkan. Di samping gajinya sangat kecil, juga pegawainya dipandang seperti buruh kasar saja.

Pemogokan yang dimulai dari Pegadaian Ngupasan terus meluas ke kantor-kantor pegadaian di sekitar Yogyakarta. RM. Sosrokardono selaku Pimpinan Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputera (PPPB) memerintahkan agar diadakan aksi pemogokan secara serentak di Jawa. Ternyata perintah RM. Sosrokardono itu dilaksanakan oleh pegawai pegadaian di Jawa. Pegawai Pegadaian Tegal pun juga ikut melakukan pemogokan. Pemogokan pegawai pegadaian juga dilakukan di Kebumen, Pekalongan, Semarang, Rembang, Surabaya, dan Pasuruan (Budiawan, 2006 : 159).

Pada tanggal 8 Mei 1923 Semaun ditangkap oleh pemerintah kolonial karena menganjurkan untuk mengadakan pemogokan buruh tram dan kereta api. Berita penangkapan Semaun tersebar sehingga para buruh tram dan kereta api langsung melakukan aksi mogok umum. Buruh tram dan kereta api di Semarang mempelopori melakukan pemogokan tersebut. Kemudian pemogokan diikuti oleh penjual di pasar, buruh mesin, sopir mobil dan truk. Pemogokan buruh tram dan kereta api ini dikoordinasi oleh *Vereeniging van Spoor en Tramsweg Personeel* (VSTP). Pemogokan buruh yang menjalar itu mendapat dukungan moral dari R.M. Suryopranoto (Budiawan, 2006 : 168-169). Pemogokan buruh kereta api dan tram itu juga terjadi di Bengkel SCS Tegal (Soemarno, 1984 : 60).

Pemogokan buruh yang terjadi di tegal itu tidak terlepas dari keberadaan partai-partai politik pada saat itu. Di Tegal, selain SI yang kemudian menjadi

Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) juga berdiri Partai Nasional Indonesia (PNI). PNI berdiri di Bandung pada tahun 1927. Pendirinya antara lain Ir. Soekarno, Mr. Sartono, Mr. Sunarjo³, dan sebagainya. Sejak berdiri, PNI telah bergerak dalam bidang politik dan bertujuan Indonesia merdeka. Sikapnya terhadap pemerintah Hindia Belanda menolak untuk bekerja sama atau *non cooperation*. Dalam perkembangannya PNI berkembang pesat.

Pada April tahun 1933 Ir. Soekarno berpidato di Alun-Alun Tegal sebagai tokoh Partai Indonesia (Partindo). Dalam pidatonya Ir. Soekarno mengajak rakyat untuk bersatu. Partindo merupakan partai politik yang didirikan pada tahun 1931 oleh Mr. Sartono setelah PNI dibubarkan. Pembubaran PNI disebabkan ditangkapnya beberapa pimpinan PNI seperti Ir. Soekarno, Gatot Mangkuprodjo, Maskun, Supriadinata. Pada saat itu pengawasan pemerintah terhadap Partindo sangat ketat karena Partindo juga bertujuan Indonesia merdeka. Oleh karena itu beberapa bulan kemudian yaitu pada tanggal 1 Agustus 1933 Ir. Soekarno ditangkap lagi oleh pemerintah kolonial dengan tuduhan menghasut rakyat dan berpolitik, dan beliau diasingkan ke Ende, Flores⁴ (Soemarno, 1984 : 54).

Pada tahun 1903 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Desentralisasi (*Decentralisatie Wet 1903*). Undang-Undang Desentralisasi ini dimaksudkan untuk memberikan hak otonomi dan pembentukan dewan daerah pada setiap karesidenan (*gewest*) dan kota besar (*gemeente*). Undang-Undang Desentralisasi tersebut juga menetapkan kota tertentu di dalam karesidenan sebagai kota besar.

Berdasarkan Undang-Undang Desentralisasi tahun 1903 Tegal merupakan daerah wilayah Karesidenan Pekalongan (*Pekalongan Gewest*). Adapun

3 Nama ditulis apa adanya sesuai masa itu, dalam EYD, j = y, jadi dibaca : Sunaryo

4 Wawancara dengan Bapak Drs. Samsuri Gondokusumo pada tanggal 28 Juni 2010 di Slawi.

yang masuk Karesidenan Pekalongan yaitu Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Pekalongan, dan Batang. Akan tetapi pembentukan Pekalongan *Gewest* ini baru terjadi tahun 1908 berdasarkan *Staatsblad* Tahun 1908 Nomor 174. Adapun yang dapat ditunjuk sebagai kota besar (*Gemente*) adalah kota besar yang mempunyai sifat kebaratan, mempunyai penduduk bangsa Eropa yang agak banyak dan disekitar tersebut terdapat perkebunan gula, kopi, atau lainnya. Otonomi yang diberikan hanya dapat dinikmati oleh golongan masyarakat Eropa, jadi bukan otonomi yang sebenarnya, melainkan hanya perbaikan jalan dan taman atau parit (Kasmadi, H., dkk., 1977/1978 : 18-19).

Kota Tegal merupakan salah satu kota yang memenuhi syarat-syarat untuk menjadi kota besar. Kota Tegal pada tanggal 21 Februari 1906 oleh pemerintah dijadikan kota besar yang otonom. Pembentukan Kota Tegal sebagai kota besar berdasarkan *Staatsblad* Tahun 1906. Nomor 123. Setelah Tegal menjadi kota besar maka dalam pelaksanaan pemerintahan dibentuk Dewan Kota (*Gemeenteraad*). Kepala Daerah adalah Asisten Residen yang membawahi Kabupaten Tegal. Dewan Kota terdiri dari 13 anggota, yaitu : 8 warga negara Belanda; 4 orang warga negara bumiputera; dan 1 orang warga negara selain bumiputera atau Belanda. (Daryono, Y, dkk, 2008 : 49-50).

Pada tahun 1928 Kota Tegal menjadi ibukota Karesidenan Tegal. Adapun wilayah Karesidenan Tegal, yaitu Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, dan Pekalongan. Pada setiap kabupaten ditempatkan seorang Asisten Residen dan untuk Kabupaten Tegal berkedudukan di Slawi. Kemudian pada tahun 1930 Karesidenan Tegal dihapus digabungkan dengan Karesidenan Pekalongan dan ibukotanya adalah Pekalongan. Kota Tegal dan Kabupaten Tegal menjadi wilayah Karesidenan Pekalongan. Adapun yang menjadi wilayah Karesidenan Pekalongan, yaitu Kabupaten Tegal,

Kota Tegal, Pekalongan, Batang, Pemalang, Brebes, dan Kota Pekalongan (Soemarno, 1984 : 60).

Pembentukan pemerintahan otonom kota besar, karesidenan dan kemudian kabupaten menyebabkan terjadinya dua macam bentuk pemerintahan. Pemerintahan tersebut yaitu pemerintahan yang dijalankan orang Eropa dan pemerintahan tradisional yang dijalankan oleh seorang pamong praja Bumiputera. Pemerintahan Bangsa Eropa juga menguasai pemerintahan dan pamong praja Bumiputera.

B. Bidang Sosial, Budaya dan Ekonomi

Lahirnya politik etis di Indonesia merupakan awal dari lahirnya suatu sistem pendidikan bagi bangsa Indonesia melalui sekolah. Terlepas apakah politik etis tersebut merupakan tindakan balas budi atau tidak, tetapi jelas bahwa sejak itu pula bangsa Indonesia mulai mengenal pendidikan melalui sekolah-sekolah. Di beberapa daerah di Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda mulai didirikan sekolah-sekolah.

Tugas pokok pemerintah kolonial di lapangan pendidikan pada waktu itu adalah memberi pengajaran rendah kepada bangsa Indonesia sesuai dengan kebutuhannya. Pada saat itu ada dua jenis sekolah dasar yang didirikan oleh pemerintah. Dua jenis sekolah itu adalah *Eerste Inlandsche School* (Sekolah Bumi Putera Kelas Satu) dan *Tweede Inlandsche School* (Sekolah Bumi Putra Kelas Dua). Penggolongan ini berdasarkan *Indische Staatsblad* 1893 No. 125. Adapun perbedaan yang terdapat di antara dua jenis sekolah itu sebagai berikut :

1. *Eerste Inlandsche School*, diperuntukkan bagi anak-anak priyayi dan tokoh masyarakat. Sekolah ini didirikan dengan tujuan untuk memenuhi

kebutuhan akan pegawai pemerintah, perdagangan dan perusahaan. Lama belajar lima tahun dan mata pelajaran yang diberikan antara lain membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi, sejarah, pengetahuan alam dan ilmu ukur tanah. Bahasa pengantar adalah bahasa daerah dan bahasa Melayu. Kemudian dalam rangka usaha memperbaiki pengajaran bagi bumi putera maka pada tahun 1907 pemerintah memasukkan pelajaran bahasa Belanda ke dalam *Eerste Inlandsche School*. Pelajaran bahasa Belanda diajarkan mulai Klas III sampai Klas V. Setelah lama belajar di sekolah ini dijadikan enam tahun, bahasa Belanda dijadikan bahasa pengantar di Klas VI. Kemudian pada tahun 1911 masa belajarnya menjadi tujuh tahun. Mulai tahun 1914 sekolah ini diubah menjadi *Holandsch Inlandsche School* (HIS).

2. *Tweede Inlandsche School*, diperuntukkan bagi anak-anak rakyat biasa. Sekolah ini didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan pengajaran di kalangan rakyat biasa. Lama belajarnya tiga tahun, akan tetapi sejak tahun 1902 lama belajarnya dijadikan lima tahun. Adapun mata pelajaran yang diberikan antara lain membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi, sejarah. Bahasa pengantarnya adalah bahasa daerah dan Melayu (Suratmin, dkk : 53-54). Jadi berdasarkan *Indische Staatsblad* 1893 No. 125 ini, pemerintah kolonial Belanda pada saat itu mengelompokkan masyarakat ke dalam golongan-golongan dengan garis pemisah yang tajam. Tidak hanya antara masyarakat Eropa dengan masyarakat Bumi Putera saja, melainkan pemerintah juga mendorong penggolongan-penggolongan di dalam masyarakat Bumi Putera sendiri.

Kedua jenis sekolah tersebut merupakan lembaga yang mahal dan memerlukan anggaran belanja yang besar. Maka atas perintah Gubernur Jenderal Van Heutz pada tahun 1907 didirikan *Volkschool* (Sekolah Rakyat atau Sekolah Desa). Sekolah ini tidak diselenggarakan oleh pemerintah tetapi oleh desa, maka disebut Sekolah Desa. Guru-gurunya menjadi pegawai desa, jadi bukan pegawai pemerintah. Demikian juga semua biaya menjadi tanggungan desa. Dalam pengelolaan Sekolah Desa, tanah dan gedung serta peralatan disediakan oleh desa dengan subsidi pemerintah. Keberadaan Sekolah Desa ini karena berlakunya Ordonansi Desa Tahun 1906 yang pelaksanaannya desa mengatur sendiri pemerintahan desa dan pembiayaan keperluan desa.

Sebetulnya Sekolah Desa ini didirikan hanya untuk memberantas buta huruf saja. Pendidikan dalam arti yang sesungguhnya sebuah sekolah, tidaklah diberikan sesuai lazimnya suatu lembaga pendidikan, namun yang diajarkan hanya membaca, menulis dan berhitung. Lama belajar di Sekolah Desa hanya tiga tahun (Djumhur, Danasuprapto, H, 1976 : 135-136).

Setelah Sekolah Desa setelah berkembang pesat maka timbul masalah baru, ke mana anak-anak lulusan Sekolah Desa ini akan melanjutkan pendidikannya. Pengetahuan dasar yang mereka peroleh tidak dapat untuk bekerja di pemerintah atau di perusahaan swasta, juga tidak dapat untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Untuk mengatasi itu semua maka pemerintah pada tahun 1915 mendirikan sebuah “Sekolah Sambungan” bagi lulusan Sekolah Desa agar dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu *Vervolkschool*. Adapun lama belajar di *Vervolkschool* adalah dua tahun. Sekolah Desa ini juga dapat meneruskan ke *Tweede Inlandsche School*.

Pemerintah Kota Tegal tidak ikut campur tangan secara langsung dalam urusan sekolah pemerintah, kecuali urusan Sekolah Desa. Di luar

Kota Tegal sekolah untuk rakyat biasa seperti *Tweede Inlandsche School* dan *Vervolkschool* diurus oleh Pemerintah Kabupaten. Komisi Pengawasnya dipimpin oleh bupati. Suatu kemajuan suatu daerah pada masa itu, karena Tegal mempunyai prasarana yang memadai, adanya penyediaaan bangunan sekolah. Daerah Tegal seluruhnya mempunyai 200 Sekolah Desa. Penilik sekolahnya enam orang dan tempat kedudukannya berada di Tegal, Procot, Balapulang, Brebes, Ketanggungan dan Bumiayu (Kartodirdjo, S, dkk, 1977 c : XXIV). Kemudian pada tahun 1917 pemerintah mendirikan *Holandsch Inlandsche School* (HIS) di Tegal. Pada tahun itu juga di Tegal didirikan *Meer Uitgebred Lager Onderwijs* atau disingkat MULO (Daryono, Y, dkk, 2008 : 52). MULO Tegal pada tahun 1933-1945 pernah menempati gedung yang sekarang menjadi SMP Negeri I Tegal di Jalan Tentara Pelajar No. 26 Tegal.



Foto 3. SMP Negeri I, dulu MULO Tegal

Lokasi : Jalan Tentara Pelajar 26 Tegal

Sebelumnya, pada tahun 1917-1933 bangunan ini digunakan untuk Sekolah Dasar Belanda (Sekolah Slerok). Kepala sekolahnya pada waktu itu

bernama Sleyer. Setelah itu sejak tahun 1933 sampai 1945 menjadi sekolah Belanda, MULO. Setelah MULO bubar tahun 1945 kemudian menjadi SMP Tegal dengan Kepala Sekolah Raden Anwar, dan pada Agustus tahun 1958 menjadi SMP Negeri 1 (Arsip Kota Tegal : No.06).

Meskipun politik etis dilaksanakan di Tegal seperti pendirian sekolah-sekolah, tetapi hasilnya tidak dirasakan oleh rakyat Tegal. Kesenjangan ekonomi, sosial, dan politik antara bangsa asing dan rakyat biasa masih sangat besar, bahkan diskriminasi semakin kuat. Ternyata politik etis di bidang pendidikan untuk kepentingan Belanda dengan mendidik rakyat terpelajar yang akan mengisi jabatan tata praja yang loyal kepada pemerintah Hindia Belanda.

Dalam rangka ikut serta mencerdaskan rakyat maka golongan swasta pun juga ikut andil dalam bidang pendidikan di Tegal, sehingga berdirilah tempat-tempat pendidikan ikut mewarnai kota yang semakin semarak. Golongan swasta yang ikut ambil bagian dalam bidang pendidikan di Tegal yaitu *Zending*, *Missi*, Muhammadiyah, Pondok Pesantren, Taman Siswa maupun perorangan.

Pada tahun 1908 *Zending* mendirikan *Lands Jong School* (Sekolah Dasar Untuk Anak-Anak *Bumi Putera*). Kemudian pada tahun 1930, *Missi* mendirikan HIS di Tegal dan tahun 1934 Bruder Van Liefse membangun biara dan mendirikan *Hollandsch Chinesche School*. Sekolah ini khusus untuk anak laki-laki keturunan Tionghoa.

Di Tegal juga berdiri sekolah-sekolah yang dikelola oleh Muhammadiyah. Sekolah-sekolah tersebut antara lain *Volkschool*, *Schakelschool*, *HIS*, dan sebagainya. Demikian juga di Tegal berdiri Pondok Pesantren seperti Pondok Pesanten Babakan, yang didirikan oleh KH. Mufti di daerah Rebaksin tahun 1916. Dalam rangka memajukan Pondok Pesantren Babakan, KH. Mufti

mengusulkan kepada pemerintah agar pemerintah membangun stasiun kereta api. Ternyata usulan tersebut mendapat tanggapan positif. Buktinya pemerintah membangun stasiun kereta api di dekat Pondok Pesantren Babakan, sehingga menambah infrastruktur kota tersedianya sarana transportasi penghubung dengan daerah lain. Kecuali Pondok Pesantren Babakan; di Tegal juga berdiri Pondok Pesantren Panggung. Pondok Pesantren Panggung didirikan oleh KH. Mukhlis pada tahun 1920 (Moehadi, dkk, 1981 : 59, 81-81). Gerakan untuk memajukan bangsa ini tidak dipelopori kaum pria saja, namun juga kaum wanita menginginkan kaumnya maju.

R. A. Kartini merupakan pelopor pergerakan kaum wanita Indonesia. Ia wanita pertama yang mempunyai cita-cita untuk memajukan kaumnya di bidang pendidikan. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa untuk memajukan kaum wanita, pendidikan merupakan permasalahan utama. Tiga bersaudara, Kartini, Roekmini dan Kardinah bekerjasama bahu membahu memikirkan pendidikan ini. Untuk meraih kemajuan bangsa bidang pendidikan bukan hanya ditujukan kepada kaum laki-laki tetapi juga untuk kaum wanita. Untuk memajukan intelegensi khususnya bagi kaum wanita, kecuali memperoleh pendidikan secara umum, juga harus memperoleh pendidikan kewanitaan, tingkah laku dan kesusilaan.

Dalam waktu yang tidak lama cita-cita R. A. Kartini mulai diwujudkan, sekolah-sekolah putri mulai didirikan. Pemikiran R.A. Kartini pada masa itu mendapat tanggapan positif. Gagasan Kartini menginspirasi ke mana pun, meski beliau telah tiada. Atas dorongan Van Deventer, pada tahun 1912 didirikan Sekolah Kartini di Semarang. Di tempat lain juga didirikan seperti di Malang, Batavia, Madiun, Bogor, Cirebon, Rembang, Pekalongan dan sebagainya (Suhartono, 1994 : 28-29).

Adik R.A. Kartini bernama R.A.Kardinah yang karena pada masa itu masih kecil maka ia dipanggil ‘Kleintje’. R.A. Kardinah setelah menikah dengan R.M.Reksoharjono, seorang Patih Pemalang maka ia pada tahun 1902 tinggal di kepatihan Pemalang. Selanjutnya pada tanggal 16 Juni 1908 R.M.Reksoharjono diangkat sebagai Bupati Tegal, namun baru bulan Juli 1908 keluarga ini pindah ke Kabupaten Tegal (Tashadi, 1982:178).

Selaras dengan cita-cita Tiga Saudara, R.A.Kardinah menggagas adanya sekolah di Tegal, maka ia berembug dengan guru-guru yang diharapkan dapat membantu, misalnya Reksowardojo, Brotowihardjo, Ziender Guru, Reksosoesilo. Adapun anak perempuan yang sudah menduduki kelas V dan tergolong mempunyai kemampuan lebih diberi pelajaran tambahan agar dapat mengikuti ujian (*examen*) guru bantu di Yogyakarta. Mereka yang akhirnya dapat lolos dan berhasil mendapatkan akte guru bantu yaitu: Salamah, Soetidjah, Soetadji, dan Soekimah..

Setelah diadakan persiapan tersebut, maka sekolah yang dimaksud R. A. Kardinah dibuka dan oleh Pangeran Tegal diberi nama “Wisma Pranawa”. Sekolah yang didirikan pada tahun 1914 ini menempati sebuah gedung yang besar bekas kantor kabupaten, jadi masih di dalam pekarangan kabupaten. Kepengurusan “Wisma Pranawa” yaitu:

Ketua	:	R.A. Kardinah
Sekretaris dan bendahara	:	van den Bos, controleur Tegal
Commissaris	:	Reksowardojo (guru pensiun), Broto-wihardjo (ziender guru), Reksosoesilo (guru), Soekardjo (guru), Tomo (guru).
Guru masak	:	Mas Aju Djoemir

- Pembantu guru masak : Ny. Soemar
- Guru menjahit, menyulam,dsb. : Ny. Van den Bos, Nn. Soemini, Soerti-gemi, Ny.. Soetomihardjo, dan ada seorang anak dari luar.
- Guru mengajari : Ny. Aisijah, anak penghulu Tegal.
(Tashadi, 1982:180):

Sekolah untuk anak-anak perempuan dari desa di Tegal ini tidak mengacu ke planing pemerintah, tetapi mengacu dasar ajaran yang dianjurkan oleh Ki Hajar Dewantara, maka tidak mendapatkan subsidi. Adapun pelajaran yang diberikan yaitu keterampilan kerumahtanggaan seperti memasak, menjahit, membatik, sopan santun, nilai-nilai moral, bahasa Belanda (oleh Ny. Heiligers), dan sebagainya.

Untuk menghidupi “Sekolah Wisma Pranawa”, R.A. Kardinah menulis buku tentang resep masakan Jawa dan Belanda. Selain itu juga menulis buku tentang batik dengan proses pembuatannya mulai awal hingga akhir. Buku-buku tersebut dijadikan 4 jilid yang dicetak oleh *Albrecht en Co*, Djakarta tahun 1918. Adapun harganya masing-masing f 10. Dengan demikian “Sekolah Pranawa” mengalami kemajuan yang menggembirakan, maka dari itu pemerintah kemudian berkenan memberi subsidi. Akan tetapi hal itu tidak berlangsung lama karena mundurnya kesehatan R.A.Kardinah sebagai pengelolanya.

Setelah sekitar 8 tahun, ‘Wisma Pranawa’ mengalami kemunduran, maka pada tahun 1920 “Sekolah Wisma Pranawa” diambil alih pemerintah Hindia Belanda dan dijadikan sekolah pemerintah, *de Eerste Kopschool voor Meisjes* di Jawa. Dari hasil ganti rugi dan honor naskahnya dipergunakan untuk membangun rumah sakit di Kejambon. Rumah Sakit ini didirikan

pada tahun 1927 dan diberi nama Rumah Sakit Umum Kardinah (Sumarno, 1984 : 54, Lihat Foto 3). Bangunan rumah sakit yang berdiri di Tegal ini sangat berarti bagi masyarakat Tegal dan sekitarnya.

R. A. Kardinah kecuali mendirikan “Sekolah Wisma Pranawa” juga mendirikan Sekolah Perawat dan Bidan di Tegal. Lulusan Sekolah Perawat dan Bidan ini ditempatkan di Rumah Sakit Kardinah. (Moehadi, dkk, 1981 : 88). Di sini antara rumah sakit dan lembaga pendidikan mempunyai keterkaitan karena dari lulusan sekolah tersebut kemudian dapat mengabdikan diri ke Rumah Sakit Kardinah yang memang membutuhkan tenaganya.



Foto 4. R.S.U.Kardinah

Meskipun politik etis dilaksanakan di Tegal seperti pendirian sekolah-sekolah, tetapi hasilnya tidak dirasakan oleh rakyat Tegal. Kesenjangan ekonomi, sosial, dan politik antara bangsa asing dan rakyat biasa masih sangat besar, bahkan diskriminasi semakin kuat. Ternyata politik etis di bidang pendidikan untuk kepentingan Belanda dengan mendidik rakyat

terpelajar yang akan mengisi jabatan tatapraja yang loyal kepada pemerintah Hindia Belanda.

Dalam rangka ikut serta mencerdaskan rakyat maka golongan swasta pun juga ikut andil dalam bidang pendidikan di Tegal. Golongan swasta yang ikut ambil bagian dalam bidang pendidikan di Tegal yaitu *Zending*, *Missi*, Muhammadiyah, Pondok Pesantren, Taman Siswa maupun perorangan. Pada tahun 1908 *Zending* mendirikan *Lands Jong School* (Sekolah Dasar Untuk Anak-Anak *Bumi Putera*). Kemudian pada tahun 1930, *Missi* mendirikan HIS di Tegal dan tahun 1934 Bruder Van Liefse membangun biara dan mendirikan *Hollandsch Chinesche School*. Sekolah ini khusus untuk anak-anak laki-laki keturunan Tionghoa.

Di Tegal juga berdiri sekolah-sekolah yang dikelola oleh Muhammadiyah. Sekolah-sekolah tersebut antara lain *Volkschool*, *Schakelschool*, HIS, dan sebagainya. Demikian juga di Tegal berdiri Pondok Pesantren seperti Pondok Pesanten Babakan. Pondok Pesantren Babakan didirikan oleh KH. Mufti di daerah Rebaksin tahun 1916. Dalam rangka memajukan Pondok Pesantren Babakan, KH. Mufti mengusulkan kepada pemerintah agar pemerintah membangun stasiun kereta api. Ternyata usulan tersebut mendapat tanggapan positif. Buktinya pemerintah membangun stasiun kereta api di dekat Pondok Pesantren Babakan. Kecuali Pondok Pesantren Babakan; di Tegal juga berdiri Pondok Pesantren Panggung yang dahulu didirikan oleh KH. Mukhlis pada tahun 1920 (Moehadi, dkk, 1981 : 59, 81-81).

Perguruan Taman Siswa didirikan tahun 1922 di Yogyakarta oleh Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa merupakan perwujudan semangat nasionalisme di bidang pendidikan. Di perguruan inilah generasi muda disiapkan, dikembangkan pribadinya agar menjadi manusia merdeka, dapat berdiri sendiri dan berpijak pada kebudayaan bangsa sendiri. Sistem pendidikan pada

waktu itu tidak memberi kepuasan kepada rakyat. Pendidikan pemerintah Hindia Belanda yang seolah-olah dijadikan contoh pada umumnya dianggap sebagai usaha untuk menjunjung derajat bangsa Indonesia, ternyata tidak dapat memenuhinya. Pendidikan yang diterima dari pemerintah sangat kurang dan mengecewakan sebagai alat pendidikan rakyat. Sebelum ada HIS, rakyat hanya mengenal Sekolah Bumi Putera yang secara kualitas sangat berkurang karena mata pelajaran yang diberikan rendah sekali.

Kemudian rakyat mendapat kesempatan memasuki Sekolah Bumi Putera Kelas Satu yang akhirnya menjadi HIS. Pendirian sekolah ini disambut dengan senang sekali oleh rakyat. Hal ini disebabkan ada harapan bagi anak-anaknya untuk mencapai derajat penghidupan yang sama dengan orang-orang Belanda. Akan tetapi harapan itu tidak bisa terpenuhi. Dari penguasaan ilmu pengetahuan, anak-anak lulusan HIS dinilai masih kurang apabila untuk mencari pekerjaan. Mereka hanya bisa diterima sebagai juru tulis atau juru tulis pembantu dengan gaji yang sama dengan *jongos* atau koki. Atas dasar itu maka Ki Hajar Dewantara berusaha untuk mendirikan perguruan yang berdasarkan pendidikan nasional yaitu sistem pondok atau asrama.

Sesuai dengan semangat nasionalisme, azas dan tujuan perguruan Taman Siswa pada pokoknya adalah :

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dengan sistem among, supaya anak didik dapat tumbuh menurut kodrat tanpa paksaan.
- 2) Menjadikan anak didik manusia yang merdeka lahir dan batin dengan tetap memelihara tertib masyarakat dan dapat berdiri sendiri.
- 3) Menekankan pendidikan untuk rakyat banyak.

- 4) Berpijak pada adat dan kebudayaan sendiri, yang sesuai untuk bangsa sendiri.
- 5) Mengusahakan pendidikan dengan kekuatan sendiri (Moehadi, dkk, 1981:100-101).

Dalam waktu satu windu yaitu tahun 1930 Sekolah Taman Siswa telah mempunyai 52 buah cabang tersebar di seluruh Indonesia sembilan di antaranya berada di Jawa Tengah termasuk Tegal dan Slawi. Di Tegal termasuk juga Slawi berdiri sekolah-sekolah Taman Siswa yang mendapat sambutan masyarakat. Adapun tokoh-tokoh Taman Siswa di Tegal antara lain Ki Parto Hadisucipto, Ki Citro Satmoko, Moh Yunus, Yakob (Soemarno, 1984 : 54). Demikianlah kegiatan Taman Siswa yang sejak berdirinya mengutamakan pendidikan nasional mendapat sambutan positif di Tegal.

Tercetusnya kebangkitan nasional, juga Sumpah Pemuda mendorong tumbuhnya organisasi-organisasi pemuda yang bertujuan memajukan bangsa dan tanah air. Pada tahun 1939, seperti di tempat-tempat lain, di Tegal dibentuk Pergabungan Pemuda (Perda), yang merupakan wadah perkumpulan-perkumpulan pemuda, khususnya yang bercita-cita keindonesiaan, tidak melihat corak politik dan agamanya (Pringgodigdo, AK.,1986: 188).

Atas dasar itulah maka pada bulan Desember 1939, perkumpulan Indonesia Muda yang diketuai oleh Sujono Hadinoto mengadakan Kongres Pemuda Indonesia di Yogyakarta yang juga dihadiri oleh 9 Pergabungan Pemuda. Adapun tujuan kongres tersebut adalah mengadakan koordinasi dan persatuan aksi berbakti kepada bangsa dan tanah air Indonesia. Hasil kongres melahirkan keputusan-keputusan, antara lain: mengadakan aksi untuk penambahan pengajaran, memberantas buta huruf, bahasa Indonesia

digunakan sebagai bahasa percakapan oleh masyarakat umum, dan masih ada lagi (Pringgodigdo, AK., 1986:188).

Pembangunan-pembangunan di Tegal tidak hanya di bidang pendidikan saja, namun juga infrastruktur kota termasuk bidang penyediaan prasarana lainnya, misalnya penyediaan penginapan bagi pendatang. Mengingat banyaknya pendatang yang berkunjung ke Tegal untuk berbagai keperluan, maka selanjutnya pada tahun 1929 di kota itu dibangun sebuah hotel bernama Hotel Stork (Daryono, Y., 2008: 66). Bangunan pada zaman Belanda ini berada di tepi jalan yang sekarang bernama Jalan Proklamasi Tegal. Pada masa kini bekas hotel tersebut dimanfaatkan sebagai asrama tentara.

Penyediaan prasarana kota dilengkapi dengan sarana transportasi yang bermanfaat untuk mobilitas penduduk. Untuk kelancaran hasil pabrik dan ekonomi daerah Tegal maka pada tahun 1897 pemerintah membangun jalan kereta api dan stasiun kereta api penumpang di Kota Tegal. Stasiun kereta api ini menghubungkan Semarang dan Cirebon. Kemudian pada tahun 1913 di Tegal dibangun Kantor *Semarang-Chirebon Stoomtrammaatschappij* (SCS). Bangunan stasiun dan Kantor SCS berada di Kelurahan Panggung, Jalan Pancasila Kecamatan Tegal Timur (Lihat Foto 5 dan 6).



Foto 5. Stasiun Kereta Api Tegal



Foto 6. Gedung Birao SCS

Di dekat stasiun kereta api dibangun mess-mess untuk pegawai Jawatan Kereta Api (SCS) dan di sebelah selatan dibangun mess-mess jawatan Perkebunan dan Kehutanan. Kecuali Stasiun Kereta Api penumpang di Kota Tegal juga dibangun Stasiun Kereta Api barang (Daryono, Y, dkk, 2008: 38). Pemilahan antara kereta penumpang dan barang ini penting karena kebutuhan akan adanya angkutan barang yang dirasa lebih efektif.

Pemerintah tidak hanya membangun jalan kereta api tetapi juga membangun jalan-jalan di Tegal. Pembangunan jalan-jalan ini sangat diperlukan agar lalu lintas bisa berjalan lancar. Pemeliharaan jalan dilakukan sesuai dengan status dari masing-masing jalan seperti jalan provinsi, jalan kabupaten atau jalan desa. Untuk memperlancar angkutan antar kota maka pada tahun 1929 pemerintah mengeluarkan izin bagi perusahaan bus. Kendaraan dari perusahaan bus itu diawasi oleh pemerintah. Untuk mengantisipasi adanya kecelakaan yang terjadi serta untuk menjaga keamanan, maka segala sesuatunya dan kecepatan jalannya bus harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini disebabkan banyak kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kelalaian bus (Kartodirdjo, S, dkk, 1977 d : XXV).



Foto 7. Menara Air PDAM Tegal

Pada masa penjajahan Belanda yang juga menguasai Kota Tegal, saat itu dirasakan perlunya air bersih, maka dibangun saluran air minum beserta pembuatan menara air diberi nama *Waterleiding Bedrijf van Provincie Midden Java*. Bangunan ini berdiri di Jalan Pancasila 34 Tegal termasuk Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Bangunan untuk keperluan air bersih ini dari bahan baku batu bata. Tinggi bangunan air yaitu 30 meter, sedangkan tabung penampung berdiameter 11 meter, dibangun oleh Belanda pada tahun 1917, diperbaiki tahun 1930 dan dikelola sampai dengan tahun 1933 (Arsip Kota Tegal: Inventaris Nomor 10). Kini bangunan tersebut bernama Menara Air PDAM (lihat foto 7), sedangkan status kepemilikan yaitu BUMD.

Penduduk daerah Tegal 90 % hidup dari usaha pertanian. Usaha pertanian yang paling intensif terdapat di daerah Gung Hilir. Di daerah Gung Hilir tanaman palawija bisa tumbuh dengan subur. Daerah-daerah subur tidak hanya untuk tanaman pertanian saja, namun juga untuk tanaman perkebunan misalnya tanaman tebu. Oleh karena itu di samping pertanian, pabrik gula juga menjadi sumber mata pencaharian. Di pabrik gula ini petani bekerja di perkebunan tebu. Untuk mengangkut tebu dari perkebunan ke pabrik gula menggunakan kereta api penarik tebu (*lori*). Di daerah Tegal pada waktu itu terdapat tujuh pabrik gula yaitu : Balapulang, Dukuhringin, Kemanglen, Ujungrusi, Pagongan, Pangkah dan Kemantran.

Tegal merupakan kota pantai, berdekatan pelabuhan yang sehari-harinya penuh dengan kesibukan, terutama kesibukan bermiaga, bongkar muat barang. Kesemuanya itu berkaitan dengan bisnis. Pada tahun 1914 Tegal dilengkapi dengan adanya sebuah gedung yang kemudian difungsikan sebagai Gedung Angkatan Laut. Bangunan tersebut berada di wilayah Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, atau di Jalan Proklamasi nomor 1 Tegal.

Di dalam Arsip Kota Tegal, Gedung Angkatan Laut diinventarisasi dengan diberi nomor 01, berasal dari tahun 1914, menempati areal seluas 2.970 m², sedangkan luas bangunannya: 1.069.2 m². Gedung ini pernah dipakai untuk *Nationale Handels Bank NV*, kemudian pernah dipakai P.T. Yala Gita, lalu tahun 1960 untuk Markas Komando Angkatan Laut Tegal sampai sekarang.



Foto 8. Gedung LANAL Tegal dulu untuk *Nationale Handels Bank NV*

Di daerah pantai penduduknya sebagian besar hidup sebagai nelayan dan usaha ini mengalami kemajuan berkat bantuan kredit dari bank daerah. Bank di Tegal termasuk bank yang terbesar dan terbaik di Jawa. Bank ini mempunyai cabang usaha yaitu kredit perikanan, kredit kopi dan kredit pupuk. Bank Tegal mempunyai cabang di Talang, Slawi, Bumijawa dan Suradadi. Pada saat itu Residen adalah pejabat *superintendant* semua urusan kredit rakyat. Bank desa dan Lumbung Desa diurus oleh pemerintah kabupaten. Pengawasan lambang-lembaga kredit desa ini dilakukan oleh seorang Kontroler Kas Sentral yang berkedudukan di Tegal.

Pada tahun 1929 di Distrik Tanjung banyak kredit macet. Hal ini disebabkan di daerah tersebut terjadi serangan hama *menthek*, sehingga

petani tidak bisa mengangsur ke bank. Pada tahun 1930 tunggakan bank belum juga dapat ditagih karena panen gagal lagi. Penggelapan di bank-bank Tegal boleh dikatakan tidak ada. Sistem *nempil* yang biasanya dilakukan oleh anggota pemerintah desa atau pejabat bank dapat dicegah. Sistem *nempil* seringkali merugikan rakyat.

Dinas Kehutanan juga banyak memberi pekerjaan kepada penduduk. Mereka dipekerjakan sebagai penebang dan sebagai pekerja reboisasi. Perdagangan besar pribumi hanya terdapat di Kota Tegal. Pada umumnya perdagangan itu dipegang oleh orang-orang Tionghoa termasuk penggilingan padi. Di sepanjang jalan Talang-Adiwerna-Slawi terdapat perusahaan-perusahaan pandai besi dan pembakaran periuk, belanga. Pelabuhan Tegal juga membuka pintu bagi ratusan kuli. Mereka yang bekerja sebagai kuli pelabuhan berasal dari Tegal dan sekitarnya terutama dari daerah Sumurpanggang (Kartodirdjo, S, dkk, 1977d : XXIV).

Di daerah dataran rendah pemilikan tanah sebagian besar secara komunal yang bersifat turun-temurun. Apabila terjadi penjualan tanah untuk keperluan umum seperti pemasangan rel kereta api, uang hasil penjualan diberikan kepada penduduk yang mempunyai hak atas tanah. Akan tetapi uang itu dikurangi 10 % untuk kas desa. Di daerah pegunungan pemilikan tanah sebagian besar bersifat individu turun-temurun.

Tanah bekas perkebunan kopi milik pemerintah yang tidak dijadikan hutan cadangan diberikan kepada penduduk yang menempatinya dengan hak pakai. Setelah 10 tahun hak pakai itu dijadikan hal milik pribadi secara turun-temurun. Di Distrik Bumijawa perkebunan kopi pemerintah yang tidak dijadikan hutan cadangan dikerjakan oleh penduduk. Dalam mengolah perkebunan kopi ini, penduduk memperoleh modal dari Bank Kredit Rakyat.

Pada tahun 1928 sampai tahun 1929 penduduk di daerah pantai banyak yang menderita penyakit malaria. Sumber penyakit berasal dari tambak ikan di Distrik Surodadi. Untuk menanggulangi wabah penyakit malaria ini Departemen Kesehatan bersama dengan pihak pamongpraja berusaha membersihkan tempat yang menjadi sarang nyamuk malaria itu. Pembersihan dilakukan dengan menggunakan tenaga kerja wajib.

Di samping itu juga dilakukan penyuluhan terhadap petani tambak tentang penyakit malari. Untuk itu petani tambak diwajibkan untuk secara teratur membersihkan tambak ikan agar tidak menjadi sarang nyamuk. Mereka yang tidak mentaati kewajiban akan dicabut haknya menggunakan tambak tersebut dan haknya akan dipindahkan kepada orang lain (Kartodirdjo, S, dkk, 1977d : XXIV).

Obat yang paling manjur untuk mengobati penyakit malaria adalah pil kina. Untuk itu pemerintah kemudian menjual pil kina kepada para kepala desa. Selanjutnya kepala desa menjualnya kepada penduduk. Oleh karena penduduk hanya sedikit yang membeli, maka pil kina itu terpaksa dibagi-bagikan dengan gratis. Kerugian ditanggung kepala desa. Untuk membrantas penyakit malaria yang melanda di daerah Tegal, pil kina yang tersedia sebenarnya tidak mencukupi. Kecuali penyakit malaria, penyakit pes juga melanda di daerah Tegal. Untuk menanggulangi penyakit pes ini Departemen Kesehatan menempatkan pengawas pes di Onderdistrik Bojong, Dawuhan Bendo dan Tonjong.

Dalam rangka membrantas penyakit yang melanda di daerah Tegal maka pada tahun 1929 Departemen Kesehatan mendirikan berbagai macam poliklinik di Surodadi, Kramat, Rangkah, Slawi, Adiwerna, Kaligangsa, Bulakamba. Adapun pembangunan gedung poliklinik tersebut dananya berasal dari sumbangan kas desa, pabrik gula dan dari pemerintah setempat.

Pemeliharaan gedung diserahkan pemerintah setempat sedangkan biaya pegawai, obat-obatan, administrasi dan lain-lainnya ditanggung Departemen Kesehatan (Kartodirdjo, S, dkk, 1977 d : XXI-XXII).

Kesenian yang ada di daerah Tegal pada masa pergerakan nasional antara lain *Sintren*, *Lais*, *Tari Topeng Endel*, gending-gending Tegal seperti *Lutungbingung*, *Kerategan*, *Ronggeng Tegal*, *Karangean*. *Sintren* dan *Lais* adalah tarian yang berdasarkan magis dan diadakan dalam upacara adat untuk mohon hujan. *Sintren* yang pegang peran adalah gadis, jika gadis itu sudah bersuami maka tidak dapat menerima roh yang akan masuk ke dalam badannya. Di dalam seni *Lais* yang pegang peran adalah jejaka yang belum beristri. Baik *Sintren* maupun *Lais* didampingi oleh *bodor* (pelawak) sebanyak dua orang. Tarian ini dilakukan dalam keadaan tidak sadar (*kesurupan*). Kedua tarian ini berbeda baik nyanyian maupun instrumen untuk mengiringinya. *Sintren* diiringi dengan *gambang* dan *kendang*, sedangkan *lais* diiringi dengan *gambang* dan *buyung* (*gentong kecil*).

Contoh syair untuk *Sintren* :

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | <i>Turun-turun sintren</i>
<i>Sintrene widadari</i>
<i>Nemu kembang yona-yoni</i>
<i>Kembange si Jaya entrok</i> | Ada sintren turun
Sintrennya bidadari
Menemukan bunga ya na ya ni
Bunganya Si Jaya-entrok |
| 2. | <i>Kami Jaya kami ranti</i>
<i>Ranti-ranti kang dadi</i>
<i>Aja sun agadri-gadri</i>
<i>Wira-wiri sun agawe</i> | Kamijaya Kamiranti
Buah ranti yang jadi
Janganlah saya tergopoh-gopoh
Kuberbuat ke sana-ke mari |
| 3. | <i>Mbalang-mbalang mumpung sore</i>
<i>Ora mbalang dudu wong kene</i> | Melempar-lempar selagi masih sore
Tidak melempar bukan orang sini |

- Awe-awe sing kalung anduk*
Entenana ing dalan prapatan
4. *Umbul-umbul korekan balon*
Bala kumpul mlayune ngulon
Iwak lele matine kesunduk
Kesunduk kaya siladan
5. *Awe-awe sing kalung anduk*
Entenana ing dalan prapatan
Klambi dril dicantelna
Supaya ngrintil diapakena
- Contoh syair untuk *Lais*
- a. *Wari lais dunung ala dunung*
Dunung ala dunung
Si dunung baune kiwa
Pangeranira.
- b. *Tangis layung layung layung*
Tangise wong wedi mati
Tak gendhong tak aling-aling
Sapa sira elinga
Yen ora Pengeranira
- (Soemarno, 1984 : dan 13-14).
- Melambai tangan yang berkalung handuk⁵
 Nantikan (aku) di perempatan jalan
- Bendera dinaikkan dengan balon
 Kawan berkumpul larinya ke barat
 Ikan lele matinya kena tusuk
 Ketusuk seperti tusukan bambu
- Melambai tangan yang berkalung handuk
 Nantikan (aku) di perempatan jalan
 Baju dril disangkutkan
 Agar supaya ikut harus diapakan
- Wari lais tempatnya ya tempatnya
 Tempatnya ya tempatnya
 tempatnya di bahu kiri
 Tuhanmu
- Tangis layung layung layung (sedih)
 Tangisnya orang yang takut mati
 Saya gendong saya lindungi
 Siapapun engkau ingatlah [siapa lagi]
 Jikalau bukan Tuhanmu

⁵ Orang berkalung handuk biasanya kiai.

Kecuali *sintren* dan *lais*, tari topeng *endel* juga merupakan seni khas Tegal. Tari topeng *endel* merupakan tari topeng wanita dengan kostum *endel* mirip penari *gambbyong*. Tari topeng *endel* biasanya dibawakan oleh satu atau dua penari bergantian. Tarian ini diiringi gending *lancaran ombak banyu laras slendro patet menyura*. Adapun isntrumennya terdiri *kendang, bonang, saron, balongan* dan *peking*. Kegenitan menjadi ciri tari topeng *èndhèl* sesuai dengan namanya *èndhèl* yang dalam bahasa Tegal artinya *kenes* atau genit.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda masyarakat kolonial mempunyai gaya hidup tersendiri. Gedung Sositeit merupakan saksi gaya hidup baru yang dibawa kolonial Belanda yaitu gaya hidup pesta pora. Gedung Sositeit menjadi tempat hiburan pada zaman kolonial untuk dansa orang-orang Belanda. Gedung ini dikenal sebagai Kamar Bola sebab di sini sering digunakan dansa dan billiar. Ukuran gedung pertunjukan 8X10 meter dengan kapasitas 600-700 orang. Di samping untuk pertunjukan musik, juga sandiwara keliling, tonil.

Tidak semua orang pribumi bisa masuk ke Gedung Sositeit ini kecuali kaum priyanyi dan orang-orang Tionghoa. Gedung ini menjadi lambang klas dalam interaksi sosial kalangan masyarakat Tegal. Kecuali itu Gedung Sositeit juga menjadi simbol masyarakat kolonial di Tegal. Gedung yang megah itu menjadi tempat *in group feeling*⁶ yang begitu kuat dari golongan kolonial, hingga merupakan tembok penghalang asimilasi dengan rakyat biasa. Tempat hiburan lainnya adalah Bioskop Jupiter tempat menonton film (gambar hidup). Sandiwara keliling “Bintang Surabaya” yang pada tahun

⁶ *In grup feeling* artinya suatu perasaan yang kuat sekali bahwa individu tertentu terikat pada kelompok dan kebudayaan yang bersangkutan.

1930-an menjadi maskot pertunjukan Nusantara pernah pentas di Tegal (Daryono, Y, dkk, 2008 : 42-43).

Pada sekitar tahun 1930-an dalam kehidupannya masyarakat Tegal akrab dengan alam, dikaitkan dengan ramalan termasuk kehidupan antar etnis karena adanya interaksi antara penduduk asli, orang Jawa di Tegal, dengan pendatang yaitu Belanda dan Cina. Di pedesaan Tegal ada cerita rakyat dikaitkan dengan kejadian yang akan datang (*pralambang*). Dikisahkan bahwa keluarga petani yang terdiri dari Ayah, Ibu, anak perempuannya, yang kemudian menikah dengan seekor harimau sakti dan dibawa ke tengah hutan. Ketika petani itu rindu pada anaknya, maka keduanya pergi ke tengah hutan. Dalam perjalanan mereka menjumpai hal-hal aneh yang kemudian ditanyakan kepada menantunya (harimau). Keanehan tersebut misalnya; ada anjing bunting yang tidur, tapi bayi anjing di dalam perutnya berbunyi ‘king-king-king’. Bunyi tersebut oleh si menantu diartikan : “*Bapak niku bénjing akhiring jaman tiyang bodho timbul, tiyang pinter padha ical (Wali ical, wong désa diajar maju)*”. Artinya: Bapak, kelak di zaman akhir orang bodoh akan muncul, orang pintar akan hilang (orang berilmu agama akan hilang, sedangkan orang desa dididik, disekolahkan sehingga dapat maju) (Van Dapperen, 1935:162).

Keanehan lainnya juga ditanyakan oleh petani tersebut, yang kemudian diberi makna oleh si menantu demikian;

- 1) Seekor burung jalak penyu, di atas kepalanya ada gumpalan tanah, artinya kelak di kemudian hari akan ada orang yang membuat rumah walaupun tiangnya dari kayu namun atapnya dari genting. 2) Ada tiga buah sumur yang berjajar, bagian kiri dan kanan ada airnya, namun sumur yang di tengah kering tidak ada airnya, artinya kelak di kemudian hari ada orang lain (kaya) menjadi saudara, namun saudara sendiri (miskin) menjadi orang lain. 3) Di tengah hutan ada tiga batang pohon yang saling berbelitan sehingga menjadi

satu, artinya di kelak kemudian hari akan tiba masanya tiga suku bangsa dapat menyatu yaitu Belanda, Jawa dan Cina. Lama kelamaan ketiganya menyatu dalam kehidupan, juga bahasa yang digunakan (Van Dapperen, 1935:163).

Demikianlah ramalan yang beredar di pedesaan akan berbaurnya orang asing dengan penduduk asli di Tegal. Berkaitan dengan alasan kepentingannya maka orang-orang asing tersebut datang ke Tegal karena lokasinya memang mudah sebagai tempat berlabuh untuk singgah. Letak Tegal sangat strategis yaitu terletak pada jalur transportasi Jakarta-Semarang-Surabaya dan Cirebon-Puwokerto-Banyumas. Tentu letak geografis yang strategis ini sedikit banyak akan mempengaruhi lalu lintas bukan hanya mobilitas manusianya tetapi juga budaya, gaya hidup dan hiburan dari daerah-daerah lain yang mempengaruhi masyarakat Tegal. Gaya hidup kebelanda-belandaan mewarnai kehidupan masyarakat Tegal yang sering berinteraksi dengan orang-orang Belanda.

Gaya hidup masyarakat Tegal tersebut kemudian mengalami perubahan besar ketika masa pendudukan Pemerintah Balatentara Jepang berkuasa di Indonesia. Kedatangannya pun dijadikan ramalan di kalangan masyarakat Tegal dengan balutan seni diutarakan dalam bahasa Jawa Tegal demikian: *Jarak brambah mlipirgunung, dhayohira wis cumawis* kira-kira maksudnya, tanaman bawang merah ditanam urut di pinggir gunung, tamu anda (maksudnya Jepang) sudah siap datang.

Setelah pemerintah Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942, mereka ingin menunjukkan eksistensinya. Oleh karena itu banyak istilah bahasa Belanda digantikan dengan bahasa Jepang atau Indonesia. Penggantian nama atau istilah ini sangat menguntungkan Indonesia, karena bahasa

Indonesia yang berakar bahasa Melayu berkesempatan untuk berkembang di samping pemakaian bahasa Jepang. Dengan ketentuan tersebut, Pemerintah Balatentara Jepang dapat mengenalkan budaya Jepang. Jepang memang menghendaki bahwa pendekatan itu termasuk upaya untuk menjauhi semua yang berbau Belanda, sehingga hanya Jepanglah sebagai sentral penguasa.

IV. TEGAL PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG

Keinginan Jepang untuk menguasai Hindia Belanda (Indonesia) ternyata memang sudah dipersiapkan dengan matang. Bukti-bukti dapat ditunjukkan dengan adanya keputusan konferensi Jepang pada tanggal 2 Juli 1941. Konferensi tersebut memutuskan tiga hal pokok, yaitu :

- Pertama : Pemerintah Kemaharajaan bertekad untuk mengikuti suatu kebijaksanaan yang akan menghasilkan pembentukan Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya dan Perdamaian Dunia, serta perkembangan internasional.
- Kedua : Pemerintah Kemaharajaan akan melanjutkan usahanya untuk mencapai penyelesaian terhadap insiden Cina dan berusaha membangun dasar yang kokoh bagi keamanan dan pengamanan bangsa. Hal ini akan meliputi suatu gerak maju ke daerah-daerah selatan dan sesuai dengan perkembangan masa depan, juga penyelesaian persoalan Soviet.
- Ketiga : Pemerintah Kemaharajaan akan melaksanakan program tersebut di atas meskipun akan menghadapi halangan apapun (Jasamihardja, Sutopo, dkk., 1998:21).

Hasil keputusan itu betul-betul dilaksanakan, salah satu di antaranya sebagai sasaran akhir dari satuan armada Jepang adalah untuk menduduki Pulau Jawa. Namun oleh karena Hindia Belanda memiliki wilayah yang cukup luas, dan terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil dengan jarak ribuan kilometer, maka Jepang tidak mungkin bisa mendudukinya secara serentak. Oleh karena itu, pihak militer Jepang melakukan penaklukan secara bergelombang sebelum mendarat di Jawa Barat dan memasuki kota Batavia.

Untuk menguasai seluruh wilayah Hindia Belanda, Jepang menugaskan beberapa divisi untuk merebut Palembang, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Jawa Barat pasukan Jepang mendarat di Banten dan Eretan (sebelah barat Cirebon), serta merebut lapangan udara Kalijati. Di Jawa Tengah pasukan Jepang mendarat di Kragan, selanjutnya menduduki Jawa Timur. Sementara itu detasemen yang mendarat di Kalimantan Timur untuk merebut Tarakan, Balikpapan, dan Banjarmasin selanjutnya menggabungkan diri dengan divisi lain untuk menyerang Cilacap, Jawa Tengah Kartodirdjo, S.,1977 c:1).

Menghadapi gelombang serangan yang sangat cepat, pihak angkatan bersenjata Pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk memusatkan pertahanan di kawasan pegunungan di sekitar Bandung. Hal itu karena kedudukan pemerintah dan angkatan perang Hindia Belanda dipindahkan dari Batavia ke Bandung. Namun gerak cepat dan pendaratan bala tentara Jepang yang hampir tanpa rintangan membuat kacau balau pertahanan angkatan perang Hindia Belanda (Kartodirdjo, S., 1977c:1-4).

Pendaratan pasukan Jepang yang menghadapi perlawanan cukup berarti hanyalah di teluk Banten, yaitu sampai menenggelamkan kapal angkut, termasuk kapal angkut yang ditumpangi panglima perang Jepang.

Sementara pendaratan di wilayah lain berhasil dengan sempurna. Pasukan divisi yang menyapu wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, pada tanggal 7 Maret 1942 telah menekuk kekuatan angkatan perang Pemerintah Hindia Belanda di Jawa Tengah, dan pada tanggal 8 Maret 1942 telah menduduki Surabaya (Kartodirdjo, S., 1977c: 5).

Pada tanggal 7 Maret 1942 seluruh kekuatan angkatan perang Hindia Belanda di Pulau Jawa telah dilumpuhkan dengan permintaan menyerah oleh pihak Hindia Belanda di sekitar Bandung. Penyerahan secara lokal tersebut dilakukan pihak Hindia Belanda kepada Kolonel Shoji. Berita penyerahan dari Kolonel Shoji ditanggapi Jenderal Imamura dengan penyerahan total dan akan ditangani secara langsung. Jenderal Imamura mengirimkan pesan bahwa keputusan itu bersifat total di seluruh Pulau Jawa dan bagian lain Hindia Belanda, dan pihak Hindia Belanda hanya diberi waktu selama satu hari. Jika ultimatum tersebut dilanggar, maka kota Bandung akan dibom. Imamura juga memberi syarat tambahan bahwa Gubernur Hindia Belanda harus hadir dalam perundingan di Kalijati.

Pada tanggal 8 Maret 1942, Panglima Tertinggi Angkatan Perang Belanda di Indonesia, Letnan Jenderal H. Ter Poorten dan Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer melakukan perundingan dengan Letnan Jenderal Imamura yang berlangsung di Kalijati. Dalam perundingan tersebut Angkatan Perang Pemerintah Hindia Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Dengan demikian Indonesia memasuki era baru, lepas dari penjajahan Belanda dan memasuki era penjajahan Jepang.

Pasukan Jepang memasuki wilayah Jawa Tengah melalui pendaratan di Rembang dengan kekuatan sekitar 3 sampai 4 divisi, selanjutnya menduduki Cepu. Pasukan Jepang memasuki kota-kota di Jawa Tengah tanpa pertempuran yang berarti. Sebagai benteng pertahanan pasukan Belanda memusatkan

kekuatannya di Cilacap, yaitu di wilayah pelabuhan, yang dipergunakan sebagai tempat penampungan untuk melarikan diri ke Australia. Akan tetapi pasukan Jepang segera memasuki Cilacap melalui Desa Ambal (Kebumen). Dengan jatuhnya pelabuhan Cilacap oleh Jepang, maka putuslah hubungan keluar pemerintah Hindia Belanda dengan negara-negara lainnya terutama Australia. Pada tanggal 5 Maret 1942 pasukan Jepang berhasil menduduki wilayah Banten, sehingga terbukalah jalan menuju Jakarta. Selanjutnya tanggal 8 Maret 1942 tamatlah riwayat pemerintah Hindia Belanda sebagai penjajah bumi Nusantara (Kartodirdjo, S., 1977c: 6).

Mula-mula rakyat Jawa Tengah, dan Indonesia pada umumnya menyambut kedatangan pasukan Jepang dengan sangat gembira. Mereka terbiasa oleh propaganda Jepang yang sangat manis, yang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Dalam hal itu pasukan Jepang memberikan semboyan “Asia untuk bangsa Asia” yang ternyata mampu membangkitkan rasa nasionalisme dan solidaritas bangsa terjajah. Rakyat Indonesia mengira bahwa kehadiran pasukan Jepang dapat membebaskan dari cengkeraman penjajah Belanda, dan akan mengentaskan dari penderitaan yang sudah dialaminya selama ratusan tahun tersebut.

Rakyat Indonesia menyambut pendudukan pasukan Jepang dengan lambaian tangan, mengibarkan bendera merah putih, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sementara itu pasukan Jepang juga sangat ramah dalam menerima rakyat Indonesia. Untuk melengkapi daya tarik bagi rakyat Indonesia, pemerintah Jepang memberlakukan kebijakan berkaitan dengan hak hidup seluruh rakyat Indonesia, di mana selama dalam masa pemerintahan Hindia Belanda, antara golongan priyayi dan bangsawan dengan golongan rakyat jelata ada semacam jurang pemisah yang sangat lebar, yang sangat membedakan hak hidup di antara sesama manusia. Dalam

pemerintahan Belanda, golongan priyayi dan bangsawan memiliki semacam hak istimewa, baik dalam hal sebutan maupun dalam perlakuan. Hal itu pada masa pemerintahan Jepang dihapuskan sama sekali. Gelar *ndara* (*bendara*) untuk kaum priyayi dihapuskan, diganti dengan sebutan kekeluargaan (Bapak, Ibu, adik, dan sebagainya) (Kartodirdjo, S., 1977c: 7).

Dalam hal ini Jepang menempatkan diri sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai saudara muda rakyat Indonesia harus senantiasa mendukung kebijakan saudara tuanya, yaitu Pemerintah Jepang. Untuk itu, guna mendukung keberhasilan pemerintahannya, pemerintah Jepang mendirikan beberapa organisasi. Perkumpulan organisasi yang pertama kali didirikan adalah organisasi Gerakan Tiga A, yaitu didirikan pada bulan Juni 1942. Organisasi tersebut bergerak dalam rangka mempropagandakan semboyan Tiga A, yaitu: “Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia” (Kartodirdjo, S., 1977c: 9).

Sebagai pengejawantahan semboyan Tiga A tersebut, pihak militer Jepang mengharuskan semua rakyat yang berada di bawah kekuasaan mereka diwajibkan memberi hormat kepada kaisar dengan membungkukkan badan 90° ke arah utara, tempat kedudukan istana kaisar. Tanpa pandang bulu, semua warga harus melakukan *seikeirei* (membungkuk), sebab Jepang merupakan bangsa yang unggul. Hal itu juga dikaitkan dengan makna kata “Jepang” (Nippon) yang artinya adalah ‘Negeri Matahari Terbit’ (*Hinomoto-no-kuni*). Secara filosofis diartikan bahwa “tidak ada yang mampu menandingi matahari. Seseorang yang berani melawan matahari akan menemukan nasib seperti salju yang mencair jika terkena sinarnya” (Kartodirdjo, S., 1977c: 10).

Seiring dengan berjalananya waktu, janji-janji Jepang yang semula terasa menyegukkan hati rakyat Indonesia, ternyata hanya isapan jempol

belaka. Lama-kelamaan sifat dan tujuan asli kedatangan Jepang di Indonesia dirasakan pula oleh penduduk, bahwa kedatangan mereka bukan untuk bermaksud baik. Sama halnya dengan Belanda, pasukan Jepang datang ke Indonesia bukan untuk keperluan membantu rakyat Indonesia agar terbebas dari belenggu penjajah Belanda, melainkan untuk mengambil alih kedudukan Belanda sebagai penjajah, untuk menguasai bumi Nusantara. Sebagai akibatnya pendudukan pemerintahan militer Jepang di Pulau Jawa berdampak pada beberapa aspek, yaitu di bidang sosial, ekonomi dan budaya.

A. Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya

Pada masa pemerintahan Jepang situasi perekonomian di Indonesia, termasuk di Kabupaten Tegal teramat sangat buruk. Bahaya kelaparan terjadi di mana-mana. Rakyat mengalami kekurangan makanan, sampai-sampai batang pisang, umbi-umbian dan bekicot pun turut dimakan. Begitu pula halnya dengan bahan pakaian juga sangat kekurangan, banyak orang yang memakai pakaian dari bahan *goni* (karung bekas) dan karet. Hasil produksi pangan seperti padi dan beras maupun hasil produksi pertanian yang lain harus disumbangkan untuk keperluan perang. Tanaman padi mengambil bibit dari Jepang yang berusia pendek, setelah panen hasilnya harus disetorkan kepada Jepang (lihat foto 9).

Disadari betul di bidang agraris diperlukan adanya pengairan untuk mengolah sawah yang menghasilkan bahan pangan. Sebenarnya pada masa pendudukan Jepang ini pernah akan memulai pekerjaan pembuatan sebuah waduk yang sebelumnya ditangani oleh *Provinciale Waterstaats afdeeling Pemali-Tjomal* (Djawatan Penerangan RI, 1953: 293). Dalam rencana

pembangunan yang akan ditangani adalah: 1) pembuatan waduk Cacaban, 2) pembuatan saluran-saluran dengan bangunan-bangunannya untuk pembagian air. Akan tetapi rencana tersebut terhenti dan tidak diteruskan karena keruntuhan Jepang yang menyerah kepada Sekutu (Djawatan Penerangan RI, 1953:293). Untuk hasil tanaman ini Jepang memanfaatkan tanaman yang telah ada yang banyak tumbuh di desa-desa, bahkan penduduk diperintahkan untuk memperbanyaknya.



Foto 9. Pengumpulan padi untuk tentara Jepang

(Repro dari Kartodirdjo,S,dkk.1977 c)

Rakyat diwajibkan pula untuk menanam *iles-iles* dan pohon jarak. Buah *iles-iles* ini oleh orang Jawa disebut *walur*, sejenis umbi yang serbaguna dan multiguna. Buah yang sebenarnya adalah umbi yang bernama *iles-iles* ini sangat bermanfaat. Jepang pandai memanfaatkan bahan yang sederhana digunakan untuk keperluan industri. *Iles-iles* dapat dibuat dan dijadikan makanan sampingan, selain itu juga dapat dipakai sebagai bahan baku industri, yaitu untuk zat pengental makanan, penguat tenunan, memperkilat

kain, bahan industri kertas, bahan pembuat *seluloid* film dan juga untuk bahan peledak.

Pengalaman mengikuti perintah Jepang yang sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan Jepang sangat membekas di dalam hati masing-masing orang. Walaupun sakit, kalau boleh dikatakan ‘mati rasa’, tanpa sadar masyarakat mendapatkan ‘bekal’ pengalaman dan keterampilan membuat dan menghasilkan sesuatu yang kemudian dapat menjadi ‘industri’, misalnya dari bahan baku logam. Kelak di kemudian hari keterampilan penduduk dalam mengolah logam yang berasal dari segala macam barang bekas (jenis logam) memang mengagumkan. Mengenai barang bekas logam, dapat dilihat di sepanjang jalan Tegal – Cilacap, di Desa Talang banyak tumpukan rongsokan logam bekas.

Di tempat itu ada bekas kabin truk, tong-tong bahan kimia, bekas suku cadang pesawat terbang, pintu mobil yang sudah rusak dan sebagainya. Dari sinilah kemudian disulap menjadi barang-barang baru. Bahkan ketika diperoleh hasil yang kurang bagus, karena bahannya dari besi bekas sehingga mudah berkarat, maka penduduk kemudian mau memakai bahan baku yang berkualitas sehingga hasilnya lebih baik.

Adapun benda-benda yang dihasilkannya pun bermacam-macam, misalnya sendok, dandang untuk menanak, paku, alat-alat pertanian, bahan bangunan, dan lain sebagainya. Tidak mengherankan apabila kemudian muncul bermacam-macam merk yang mirip istilah Jepang, misalnya : *Musuhama*, *Nikisae*, *Tansaiki* alias *Tani Sakiki*, dan seterusnya. Adapun barang-barang kerajinan dari kuningan menghasilkan barang-barang misalnya lampu-lampu *andong* atau *delman* (*Suara Merdeka*, 1982:V). Bahkan daerah ‘industri’ Tegal ini di kemudian hari juga memproduksi komponen mesin jahit, kursi lipat, rendel pintu, pengepres genting, kipas mesin mobil, sepeda, suku

cadang mobil, pompa tangan, perlengkapan karoseri, pemadam kebakaran, *hydraulic pump*, perontok padi, dan lain sebagainya (*Suara Merdeka*, 1982: V). Dengan maraknya produk yang ada di Tegal, kemudian muncul sebutan untuk kota ini bahwa Tegal merupakan ‘Jepang’nya Indonesia.

Pada waktu Jepang ke Indonesia, dari mereka yang datang ternyata tidak hanya dari kalangan tentara saja, namun ada juga pedagang. Apabila tentara harus mengikuti perintah pimpinannya untuk memenuhi kewajibannya di bidang keprajuritan Pemerintah Balatentara Jepang, namun di sisi lain ada yang menjalankan bisnis. Sebelum Balatentara Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942, selain Cina, Taiwan, pebisnis Jepang sudah lebih dahulu berdagang ke Indonesia.

Salah satu contoh, tercatat pada tahun 42 Meiji (1909), pada bulan Mei rombongan pedagang Jepang (15 orang), di bawah manajer Tsutsumbayashi Kazue datang ke Jawa untuk berdagang. Adapun barang-barang yang dijual yaitu hasil kerajinan keramik, obat-obatan, kain dan benda-benda produk tekstil katun. Barang yang paling digemari oleh masyarakat adalah sejenis balsam obat gosok sakit kepala. Selain itu, masyarakat juga menyukai kembang gula yang manis rasa mentol agak pedas dan *semriwing* atau sering disebut permen mentol keluaran dari daerah Prefektur Yamagata (Astuti, MSP, 2008:104). Dalam melakukan bisnis mereka mengalami perkembangan. Jika pada awal mereka mulai dengan berdagang keliling, kemudian merambah ke pertokoan, import eksport dan bidang-bidang lain yang dipandang dapat memajukan usahanya.

Mereka yang datang berdagang itu melakukan pekerjaannya dengan usaha membuka warung atau toko, atau usaha jual beli. Di antara pedagang itu ada juga yang ikut meramaikan pasar di Tegal. Salah satu toko milik pedagang Jepang di Tegal yaitu Toko Ōtomo atau *Ōtomo Shōten* milik Otomo

Shintarō (Astuti, MSP, 2008:113). Seperti pebisnis lainnya, Ôtomo Shintarō menginjak tanah Jawa sudah lama sebelum Jepang masuk ke Indonesia, yaitu pada tahun 41 Meiji atau tahun 1909. Sebelum menginjakkan kaki di Tegal dan membuka *Ôtomo Shôten*, ia bekerja di Yokohama Shôkai di Semarang. Setelah berpengalaman bekerja di Semarang, baru pindah ke Tegal dan berwirausaha tersebut.

Lain halnya dengan kesibukan pemerintah Balatentara Jepang yang mengurusi kegiatannya dalam menghadapi Belanda. Untuk keperluan tersebut mereka membutuhkan biaya, maka jalan yang ditempuh adalah membebankan biaya tersebut kepada penduduk tanah jajahan. Sumber pemasukan sumbangan dana maupun tenaga diharapkan dari penduduk. Selain itu harta kekayaan, seperti emas, intan, berlian, harus disumbangkan untuk biaya perang. Begitu pula harta kekayaan yang berupa hewan ternak juga harus diserahkan kepada pemerintah Jepang dengan imbalan ganti rugi yang sangat rendah. Oleh sebab itu, penduduk harus merelakan apapun yang dimilikinya manakala dibutuhkan demi kepentingan perang.

Sementara pada tingkat yang paling bawah pemerintah militer Jepang membentuk *Tonarigumi* yang dikepalai oleh seorang *Kumi-cho*. Tugas utama dari kelompok ini adalah untuk menyelenggarakan latihan menghadapi bahaya serangan udara dan untuk menyalurkan pangan. Peranan *Tonarigumi* menjadi sangat penting saat bahan pangan menjadi langka dan situasi perang makin meningkat.⁷ Di samping itu, *Tonarigumi* juga dimaksudkan untuk membantu usaha perbaikan kesehatan sampai pada tingkat keluarga, meningkatkan hubungan antara berbagai kelompok masyarakat, menganjurkan penduduk

⁷ Wawancara dengan Sunyoto, tanggal 29 Juni 2010 di rumahnya.

agar menabung, menyelenggarakan ronda malam, menaikkan hasil pertanian, dan membantu keluarga tentara yang berada dalam kesukaran.

Untuk upaya hidup sehat, Jepang memanfaatkan prasarana di Tegal yang telah ada dari zaman pendudukan Belanda misalnya untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Menara air yang telah ada diganti namanya menjadi *Suwido*. *Su* artinya air, *wido* artinya pipa. Jadi maksud sebutan *Suwido* untuk menara air adalah pipa yang menyalurkan air. Kemudian setelah Indonesia merdeka namanya berubah lagi menjadi Saluran Air Minum (SAM). Lebih lanjut pada tahun 1975 SAM diganti menjadi PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) sampai sekarang (Arsip Kota Tegal: Inven.No. 10).

Pada masa pendudukan Jepang ternyata mampu membawa perubahan sosial secara luas, khususnya perubahan di bidang komunikasi dan pendidikan. Dapat dikatakan bahwa media komunikasi seluruhnya dikuasai oleh Jepang, sebab hal itu dianggap penting dalam rangka propaganda. Surat kabar dan majalah dilarang terbit tanpa ijin dan sensor keras dari badan yang disebut *Jawa Shinbun Kai*. Sebaliknya minat baca di kalangan rakyat cukup baik, sehingga surat kabar dan majalah yang dapat terbit dan dibaca oleh masyarakat Tegal. Media cetak yang terbit di antaranya surat kabar *Suara Asia* dan majalah-majalah *Jawa Baru*, *Panji Pustaka* dan *Seruan Kita*.⁸ Pada masa Jepang ini ada larangan pemakaian bahasa Belanda, selanjutnya diberlakukan bahasa Jepang atau bahasa Melayu. Pada intinya Jepang ingin menjauhkan hal-hal yang berbau Belanda, maka tidaklah mengherankan kemudian muncul nama-nama dalam bahasa Jepang juga dalam bahasa daerah atau Melayu baik untuk nama lembaga, organisasi, media masa, dan lain sebagainya.

⁸ Wawancara dengan Samsuri Gondokusumo, tanggal 28 Juni 2010 di rumahnya.

Dalam hal pendidikan, dapat dikatakan terjadi pendemokrasian dalam lapangan tersebut, yang berarti pula mengangkat status sosial rakyat. Para ulama dijadikan guru-guru di desa, dan sekaligus dapat menjadi pemimpin rakyat, sebaliknya golongan priyayi tergeser status aslinya. Di bidang pendidikan Jepang merubah sekolah-sekolah yang didirikan Belanda seperti HIS, ELS dan sekolah desa menjadi sekolah rakyat. Sekolah MULO diganti menjadi SMP, AMS menjadi SMA dan HBS menjadi SMT.⁹ Di samping itu, Jepang mengizinkan dibukanya kembali sekolah-sekolah yang pernah dibekukan pada masa kolonial Belanda, di antaranya sekolah Taman Siswa, Muhammadiyah dan sekolah-sekolah keagamaan. Pihak Jepang juga memberikan kesempatan golongan minoritas untuk mendirikan sekolah swasta baru seperti perkumpulan *Chung Hua Chiao* guna menampung anak-anak keturunan Cina. Semua sekolah diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Selain itu, buku pelajaran yang menggunakan bahasa Belanda diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Pada masa itu Bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, dan Bahasa Belanda ditinggalkan. Jika ada orang yang masih menggunakan Bahasa Belanda dibenci dan dituduh memihak musuh.¹⁰ Dengan demikian sekolah-sekolah dijadikan oleh Jepang sebagai tempat indoktrinasi yang bersifat militeris, sebab dapat terbentuk kader-kader untuk mempelopori dan melaksanakan konsepsi Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya.

Menghadapi tindakan pemerintah Jepang tersebut rakyat tidak bisa berbuat apa-apa, sebab kalau menolak dianggap menentang hukum militer dan dianggap sebagai musuh. Oleh karena itu, rakyat tidak berani menolak perintah Jepang. Barang siapa berani menolak atau menentang perintah, dia

9 Wawancara dengan Soetari Samsuri Gondokusumo, tanggal 28 Juni 2010 di rumahnya.

10 Wawancara dengan Samsuri Gondokusumo, tanggal 28 Juni 2010 di rumahnya.

akan diseret ke *Kenpetai*, yaitu polisi militer Jepang yang sangat kejam. Pada masa pendudukan pemerintah Balatentara Jepang, di Tegal *Kenpetai* memanfaatkan gedung Hotel Stork dari masa Belanda sebagai markasnya. Bahkan setelah Jepang kalah, sebelum dipulangkan, mereka ditampung di bekas Hotel Stork itu juga (Daryono, Y.,2008:66). Ketika masih di bawah kekuasaan Jepang ini, banyak orang yang ditangkap *Kenpetai* dan disiksa berat, bahkan banyak di antaranya yang tidak kembali karena mati. Sedangkan yang kembali banyak yang menderita cacat badan. Sebelum pendudukan Jepang rakyat Indonesia merasa mengalami penderitaan karena kekejaman penjajah Belanda. Namun penjajah Jepang ternyata jauh lebih kejam dari penjajah Belanda.

B. Bidang Politik

Dalam menjalankan roda pemerintahan di Indonesia, pihak Jepang membagi wilayah menjadi dua bagian, yang masing-masing bagian diperintah oleh Militer Angkatan Darat (*Rikugun*) dan Angkatan Laut (*Kaigun*). Sejak saat itu nama Hindia Belanda diganti dengan sebutan “Indonesia”, dan nama Batavia diganti dengan sebutan “Jakarta”. Pergantian nama tersebut dilakukan secara resmi oleh Jepang pada tanggal 8 Desember 1942, yang sepenuhnya dikendalikan oleh staf umum Angkatan Darat (*Rikugun*) dan Angkatan Laut (*Kaigun*) yang mengkoordinasi kegiatan semua komando di bawahnya (Jasamihardja, Sutopo, dkk., 1998:23).

Atas pembagian wilayah dan wewenang antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut tersebut, Pulau Sumatera dan Pulau Jawa berada di bawah wewenang Angkatan Darat, sedangkan wilayah Timur Besar yang meliputi

kawasan Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Irian masuk dalam wewenang Angkatan Laut.

Dalam menjalankan roda pemerintahan di Indonesia, kebijakan pemerintah militer Jepang berpegang pada tiga prinsip utama, yakni:

Pertama : mengusahakan agar pemerintah itu didukung rakyat (untuk memenangkan perang) dan mempertahankan ketertiban umum;

Kedua : Memanfaatkan sebanyak mungkin struktur pemerintahan yang sudah ada;

Ketiga : Meletakkan dasar agar supaya wilayah yang bersangkutan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri untuk menjadikannya pusat persediaan pangan bagi wilayah selatan (Jasamihardja, Sutopo dkk., 1998 : 24).

Dengan prinsip ini, maka pemerintahan hanya mengalami sedikit perubahan. Pemerintah pusat dikepalai oleh *Gunseikan* yang mempunyai bagian umum dan tujuh bagian lainnya. Semua propinsi di Jawa dihapus dan diganti dengan 17 karesidenan yang masing-masing dikepalai oleh seorang residen. Jabatan-jabatan utama seperti gubernur dan residen dijabat oleh orang Jepang, sementara bupati dan jabatan lain di bawahnya dijabat oleh orang Indonesia. *Gunseikan* secara langsung mengawasi kebijakan yang dijalankan para bupati, walikota, dan pimpinan kepolisian setempat. Pada setiap karesidenan dibentuk suatu dewan karesidenan serta diadakan tiga bagian yang mengurus soal pemerintahan, ekonomi, dan kepolisian. Kepala bagian kepolisian mengawasi kebijakan polisi, bupati, wedana, asisten wedana, dan kepala desa. Khusus mengenai Jakarta, kota ini diberi status daerah istimewa yang dinamakan *tokubetsu-shi* yang dikepalai oleh *shichokan*, yang kedudukannya langsung berada di bawah *gunseikan*.

Walikota dan kepala daerah istimewa Jakarta dibantu oleh sebuah dewan dan tiga kantor khusus, yakni Kantor Urusan Umum, Kantor Urusan Ekonomi, dan Kantor Kesejahteraan Rakyat (Jasamihardja, Sutopo, dkk., 1978 : 24).

Beberapa perubahan yang dilakukan pemerintah militer Jepang terhadap jenjang bupati ke bawah, sejumlah bupati yang dianggap pro Belanda dan yang diduga terlibat korupsi dipecat, diganti dengan bupati baru. Penggantian pejabat bupati yang dilakukan pemerintah militer Jepang dianggap masyarakat umum kurang memenuhi kriteria yang lazim pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, karena seorang bupati dapat diangkat dari luar sistem, misalnya seorang guru diangkat menjadi bupati.

Selain itu, pada masa pemerintahan Balatentara Jepang, jabatan kepala desa atau lurah penting dan memiliki tanggung jawab besar dengan tugas-tugas yang harus dijalankan yaitu; 1) Menagih pajak; 2) Mempertinggi taraf hidup rakyat; 3) Ikut bertanggungjawab keberadaan *Keibodan* (Barisan Bantu Polisi) dan *Seinendan* (Barisan Pemuda) di daerahnya; 4) Memilih dan mengangkat para pemilih untuk *Saengikai* (Dewan Penasehat Lokal); 5) Mengurus keuangan desa, kas masjid, dan memberi penerangan tentang kesehatan rakyat; 6) Menjaga keamanan desa; 7) Memberi penerangan kepada masyarakat, baik tingkat atas maupun tingkat bawah, dan tugas lainnya (Jasamihardja, Sutopo, dkk., 1998 : 24).

Antara pemerintahan kolonial Belanda dan pemerintahan Balatentara Jepang terdapat perbedaan, jika masa pendudukan Belanda berlaku pemerintahan sipil, sedangkan waktu pendudukan Jepang berlaku pemerintahan militer. Pulau Jawa dan Sumatera dikuasai oleh Angkatan Darat dari satuan tentara Keenambelas. Khususnya di Pulau Jawa, pemerintahan militer satuan tentara Keenambelas disebut dengan kode *Osamu*. Panglimanya dikenal dengan sebutan *Gunshireikan* atau *Saiko Shikikan*, namun operasional

pemerintahan militer dijalankan oleh kepala stafnya yang disebut *Gunseikan*. Baik *Gunshireikan* maupun *Gunseikan* sama-sama berhak mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Apabila perundang-undangan dikeluarkan oleh *Gunshireikan*, maka peraturan itu disebut *Osamu Seirei*, apabila dikeluarkan oleh *Gunseikan*, maka perundang-undangan itu disebut *Osamu Kanrei*. Kedua peraturan perundang-undangan itu kemudian dapat ditemukan dalam *Kan-po* (berita pemerintah) yang merupakan organ resmi yang dikeluarkan oleh *Gunseikanbu* (kantor kepala pemerintahan militer) (Jasamihardja, Sutopo, dkk.,1998:24-25).

Selama pendudukan militer Jepang di Indonesia (1942 – 1945) *Gunshireikan* dijabat Letnan Jenderal Yuichiro Nagano dan *Gunseikan* berganti-ganti dijabat oleh Mayor Jenderal Seizaburo Okazaki, Mayor Jenderal Shinshichiro Kokubu, dan Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto.

Dalam hal pemerintahan, pada tanggal 7 Maret 1942, sehari sebelum penyerahan tanpa syarat oleh Belanda kepada Jepang, Panglima tentara Keenam Belas di Jawa mengeluarkan Undang-undang No. 1 yang berhubungan dengan pemerintahan. Dalam Undang-undang itu dinyatakan:

Pasal 1 : Balatentara Jepang melangsungkan pemerintahan militer semestinya waktu di daerah-daerah yang telah diduduki agar supaya mendatangkan keamanan dan sentosa dengan segera;

Pasal 2 : Pembesar Balatentara memegang kekuasaan yang dahulu berada di tangan Gubernur Jenderal Hindia Belanda;

Pasal 3 : Semua badan pemerintah dan kekuasaan hukum dan Undang-undang dari pemerintah yang dahulu tetap diakui syah untuk sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer;

Pasal 4 : Bahwa Balatentara Jepang akan menghormati kedudukan dan kekuasaan pegawai-pegawai yang setia kepada Jepang.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, pemerintah militer tingkat pusat (*Gunseikanbu*) dan pemerintahan militer di tiga tempat, yaitu Surabaya, Semarang, dan Bandung disebut *Gunseibu*. Kepala staf tentara (*Gunseikan*) merupakan pimpinan *Gunseikanbu* dan membawahi sejumlah *bu* (departemen), yaitu:

- Departemen Urusan Umum (*Somubu*)
- Departemen Dalam Negeri (*Naimubu*)
- Departemen perekonomian (*Sangyobu*)
- Departemen Keuangan (*Zaimubu*)
- Departemen Kehakiman (*Shidobu*)
- Departemen Kepolisian (*Keimubu*)
- Departemen Lalu Lintas (*Kotsubu*)
- Departemen Propaganda (*Sendenbu*) (Jasamihardja, Sutopo,dkk., 1998: 24).

Dari delapan departemen ini ada urusan yang tidak tercakup, seperti urusan sosial, pendidikan dan perburuhan. Semua urusan yang tidak tercakup dalam departemen (*bu*) di atas dimasukkan ke dalam *Naimubu* (Departemen Dalam Negeri). Sampai bulan Agustus 1942 berlangsung pemerintahan sementara hingga dikeluarkannya Undang-undang No. 27 dan 28, Agustus 1942.

Dalam Undang-undang ini pemerintahan militer Jepang di Jawa dan Madura dibagi atas *shu* (setingkat karesidenan) dan *kochi* (daerah istimewa), yaitu terdiri atas 17 *shu* dan 2 *kochi*. Ketujuh belas *shu* tersebut adalah

Banten, Batavia, Bogor, Periangan, Cirebon, Pekalongan, Semarang, Banyumas, Pati, Surabaya, Bojonegoro, Madiun, Kediri, Malang, Besuki, dan Madura. Sedangkan kedua *kochi* adalah Yogyakarta dan Surakarta. *Shu* dibagi atas *shi* (kotamadya) dan *ken* (kabupaten). Di bawah *ken* ada *gun* (kawedanan), di bawah *gun* ada *son* (kecamatan), dan di bawah *son* ada *ku* (kelurahan). Dengan dikeluarkannya Undang-undang ini, maka bentuk *gunseibu* (pemerintahan militer di Semarang, Surabaya, Bandung) dalam pemerintahan dihapus.

Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), pemerintahan di dalam kota Tegal diserahkan kepada pemerintahan Kota Tegal. Pada saat itu diangkatlah Mr. M. Besar Martokusumo sebagai Kepala Kota Tegal. Sebelumnya, di Tegal Mr. M. Besar Martokusumo adalah seorang *advocate* dan *procurer*. Tidak lama kemudian kedudukannya sebagai Kepala Kota atau Walikota Tegal diganti oleh R. Sungeb Reksoatmodjo. Perpindahannya itu karena Mr. M. Besar kemudian mengantikan Bupati Tegal, R.T. Slamet Kertonegoro pada tahun 1942 (Daryono,Y., *et al*, 2008:66). Tenaga dan pikiran Mr. M. Besar Martokusumo sangat dibutuhkan di tingkat karesidenan, maka ia kemudian dipindahkan jabatannya menjadi wakil Residen di Pekalongan. Kursi bupati Tegal segera diisi oleh R. Soenarjo mengantikan Mr. M. Besar Martokusumo.

Pada masa pendudukan Pemerintah Balatentara Jepang diberlakukan ketentuan-ketentuan yang berupa kebijakan pemerintah militer Jepang antara lain :

1. Semua peraturan perundang-undangan yang berlaku semasa pemerintahan Hindia Belanda tidak berlaku. Oleh Jepang diberlakukan *Osamu Serei*, semacam peraturan pemerintah.

2. Berdasarkan *Osamu Serei* Nomor 13 Tahun 2603 (1943 M) *Stads Gemeente Tegal* diubah menjadi *Tegal Si*. Kepala daerah *Tegal Si* adalah *Si Cho*, dipercayakan kepada Mr. M. Besar Martokusumo.
3. Wilayah *Tegal Si* adalah wilayah Kotamadya Dati II *Tegal* (sebelum diperluas 1986), terbagi dalam 10 desa dengan 1 (satu) kecamatan yang dinamai *San Cho*. Desa dikepalai seorang Kepala Desa yang dinamai *Ku Cho*. Misalnya Desa Randugunting dinamai Randugunting *Ku*. Di masing-masing desa dibentuk kelompok lingkungan masyarakat RT *Tonarikumi* dengan pimpinan kelompok RT *Tonari Kumicho*. Beberapa RT dikoordinir seorang *Ascho*.
4. Sifat pemerintah adalah bersifat otonom. Peraturan Daerah (*Zoorci*) dapat berlaku setelah disahkan oleh *Siu Cho* atau Gubernur (Daryono, Y., et al, 2008 : 66).

Pada bulan Maret 1942 Kota Tegal diduduki oleh Balatentara Jepang. Sebagaimana halnya sistem pemerintahan di wilayah lain di Indonesia, oleh tentara pendudukan Jepang di Tegal kemudian disusun suatu pemerintahan militer. Tegal dipimpin oleh seorang *Shi-cho*, didampingi oleh wakil-wakilnya, yang disebut *Fuku Shi-cho*. *Shi-cho* adalah seorang tentara Jepang, sedang wakil-wakilnya terdiri dari baik orang Jepang maupun orang Indonesia. Dalam hal ini pemerintahan dijalankan secara langsung dan dipimpin oleh *Shu-cho* yang berada pada tingkat karesidenan. Dengan demikian, hapuslah sudah otonomi yang ada pada pemerintahan kota Tegal. Sementara itu dualisme dalam pemerintahan juga dihapuskan, sehingga tidak ada lagi pemerintahan terhadap orang Indonesia yang khusus dijalankan oleh

bupati. Kedudukan *Shi-cho* memang sangat kuat, yang antara lain karena pemerintahannya bersifat militer. Kira-kira satu setengah tahun kemudian mulailah pimpinan kota didampingi oleh suatu Dewan Pertimbangan yang disebut *Hookookai*. Tugas *Hookookai* adalah memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada *Shi-cho*. Pada waktu itu *Shi-cho* di Tegal dijabat oleh Hikokichi Arima.

Jepang juga membentuk Putera atau Pusat Tenaga Rakyat yang bertujuan untuk membangun dan menghidupkan semua aspek yang dirobohkan oleh imperialis Belanda. Melalui organisasi ini Jepang dapat memusatkan segala potensi masyarakat Tegal yang dapat dimanfaatkan dalam rangka membantu usaha perangnya. Selain itu Jepang juga membentuk organisasi baru yang dinamakan *Jawa Hokokai* atau Himpunan Kebaktian Jawa sebagai organisasi resmi pemerintah dan sebagai pucuk pimpinan dipegang langsung oleh *Gunseikan*. Himpunan ini mempunyai tiga dasar yaitu mengerahkan rakyat untuk mengumpulkan besi tua, pajak dan pohon jarak sebagai bahan baku pelumas guna mendukung kepentingan perang Jepang.

C. Bidang Militer

Mengingat keadaan perang sudah semakin gawat, di mana di beberapa wilayah pasukan Jepang sudah didesak oleh tentara Sekutu, bahkan pertahanan Jepang di Pasifik sudah dihancurkan oleh Sekutu, maka pada tanggal 1 September 1943 Gatot Mangkupradja mengusulkan supaya dibentuk Peta (Pembela Tanah Air), yang merupakan pasukan sukarela (Sufian,H.Maeda,1987:107). Sebenarnya Pemerintah Balatentara Jepang sudah membentuk kesatuan seperti Peta (Pembela Tanah Air), yaitu yang

disebut *giyugun* (kata Nippon=tentara sukarela), di Sumatera. Kesatuan ini, yaitu angkatan bersenjata, mempunyai kekuatan setara dengan satu kompi, terdiri dari pemuda Indonesia yang dididik dan dilatih oleh tentara Nippon. Tujuan dibentuknya *giyugun* yaitu untuk membela tanah air dari serangan musuh, terutama orang kulit putih. Baik *giyugun* maupun Peta pada dasarnya mempunyai kesamaan tujuan yaitu membela tanah air, sedangkan Peta dibentuk di Jawa (Sufian, H.Maeda,1987:107).

Atas usulan Gatot Mangkupradja, maka dikeluarkanlah *Osamu Serei No. 44* pada tanggal 3 Oktober 1943 mengenai ‘Pembentukan Pasukan Sukarela untuk Membela Jawa’ (Notosusanto, N., 1979:73). Di dalam peraturan tentang pembentukan pasukan sukarela pembela tanah air tersebut terkandung poin-poin demikian; 1) Tentara Peta berkeanggotaan Indonesia (penduduk asli) dari atas sampai bawah, 2) Di dalam Tentara Peta akan ditempatkan militer Jepang untuk tujuan latihan, 3) Tentara Peta ditempatkan langsung di bawah Panglima Tentara, lepas dari badan mana pun juga, 4) Tentara Peta merupakan tentara territorial dengan kewajiban mempertahankan masing-masing daerahnya (*shū*), 5) Tentara Peta di masing-masing daerahnya harus siap untuk melawan sampai mati setiap musuh yang menyerang (Notosusanto, N., 1979:73).

Sebagai tindak lanjut dari pembentukan Peta seperti usulan yang diajukan oleh Gatot Mangkupraja tersebut, maka kemudian diadakan latihan perwira bagi calon *Daidancho* (komandan batalyon), *Cudancho* (komandan kompi), dan *Syodancho* (komandan peleton) dengan kriteria sebagai berikut:

- a). Untuk calon *Bundancho*¹¹ umumnya direkrut dari pemuda-pemuda yang telah menyelesaikan sekolah minimal setingkat menengah pertama (SMP) dan SMA.
- b). Untuk calon *Syodancho* umumnya direkrut pemuda-pemuda yang baru saja meninggalkan tamat pendidikan di bangku SMA dan belum memiliki pekerjaan.
- c). Untuk calon *Cudancho* umumnya direkrut dari tenaga-tenaga yang telah mempunyai kedudukan di dalam masyarakat seperti para guru atau para pegawai pamong praja.
- d). Untuk calon *Daidancho* umumnya direkrut tenaga-tenaga yang sudah lanjut usianya mempunyai pengaruh di daerah tempat markas batalyon (Daidan / Butai) akan didirikan.

Sementara itu, pembagian wilayah untuk *Daidan* di Jawa Tengah dibagi dalam 20 *Daidan* sebagai berikut:

- 1) Karesidenan Banyumas dibagi dalam 4 *Daidan*, yakni:
 - *Daici Daidan* di Cilacap
 - *Daini Daidan* di Sumpuh
 - *Daisan Daidan* di Kroya
 - *Daijon Daidan* di Banyumas
- 2) Karesidenan Pekalongan dibagi dalam 2 *Daidan*, yakni:
 - *Daici Daidan* di Pekalongan
 - *Daini Daidan* di Tegal
- 3) Karesidenan Semarang dibagi dalam 2 *Daidan*, yakni:

¹¹ *Bundancho* = *bundan* + *cho*; *bundan* = regu di dalam Peta (Pembela Tanah Air), *cho* = kepala, komandan, pemimpin.

- *Daici Daidan* di Semarang
 - *Daini Daidan* di Weleri
- 4) Karesidenan Kedu dibagi dalam 4 *Daidan*, yakni:
- *Daici Daidan* di Gombong
 - *Daini Daidan* di Prembun
 - *Daisan Daidan* di Magelang
 - *Daijon Daidan* di Purworejo
- 5) Karesidenan Pati dibagi dalam 3 *Daidan*, yakni:
- *Daici Daidan* di Pati
 - *Daini Daidan* di Rembang
 - *Daisan Daidan* di Jepara
- 6) Karesidenan Surakarta dibagi dalam 2 *Daidan*, yakni:
- *Daici Daidan* di Sala
 - *Daini Daidan* di Wonogiri
- 7) Yogyakarta dibagi dalam 3 *Daidan*, yakni:
- *Daici Daidan* di Wates
 - *Daini Daidan* di Jogya
 - *Daisan Daidan* di Wonosari (Muryantoro, H., 2009:23).

Selain membentuk tentara PETA, Jepang secara intensif mulai menggerakkan dan mendidik kaum pemuda pelajar untuk dilatih kemiliteran. Pada bulan Maret 1943 terbentuklah *Seinendan*. Maksud dari pembentukan itu adalah agar Jepang memperoleh tenaga cadangan untuk memperkuat angkatan perangnya dalam upaya menghadapi Sekutu. Kepada para *Seinendan* diberikan latihan militer, baik untuk mempertahankan diri maupun untuk penyerangan. Di samping *Seinendan* para pemuda ada juga yang

dimasukkan ke dalam kelompok khusus dan mendapat pendidikan untuk membantu tugas-tugas Kepolisian. Kelompok khusus itu disebut *Keiboden* atau barisan pembantu polisi dengan batas usia antara 23-35 tahun. Dibentuk pula BPKKP sebagai badan pembantu kesejahteraan keluarga prajurit *Heiho*. Siswa-siswi SD dan SMP juga tak luput dari *Kenroho Shi*. Untuk mengobarkan semangat, mereka dibina lewat nyanyian-nyanyian seperti *Bandano* dan *Amat Heiho* serta *Umi Ya Kaba* dan lain-lain.¹²



Foto 10. Latihan kemiliteran untuk anak sekolah

(Repro dari Kartodirdjo,S.,dkk, 1977 c)

Sementara kaum wanita diwajibkan menjadi anggota *Fujinkai* (him-punan wanita) yang diberikan latihan kemiliteran dan diwajibkan bekerja demi kepentingan pertahanan Jepang. Bahkan lebih sadis lagi, kaum wanita itu banyak yang dipaksa untuk dijadikan pelacur, sebagai pemuas nafsu tentara Jepang. Sedangkan para pemuda yang tidak masuk “romusha” ditampung dalam organisasi *Keiboden* yang bertugas membantu polisi dalam

12 Wawancara dengan Abdullah Darmoyo, pada tanggal 28 Juni 2010 di rumahnya.

menjaga keamanan desa dan *Seinenden* yang dipersiapkan sebagai tenaga cadangan militer yang sewaktu-waktu dapat dikerahkan untuk memperkuat pertahanan Jepang.

Seluruh penduduk mendapatkan latihan-latihan militer (*Kusukeiho*), untuk keperluan manakala menghadapi serangan udara *Kyoren*. Kepada seluruh penduduk diberikan latihan perang-perangan dan baris berbaris seraya menyanyikan lagu-lagu mars Jepang, sehingga benar-benar menambah semangat militer dalam suasana perang. Di samping itu semangat gotong-royong ditingkatkan dalam bentuk *Kinrohashi*, yang sebenarnya merupakan kerja paksa yang harus dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat.¹³

Dengan demikian, semua potensi yang dimiliki Kabupaten Tegal digunakan pihak Jepang dalam rangka persiapan perang, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang berupa pengerahan seluruh kekuatan dan tenaga rakyat Kabupaten Tegal. Dari anak-anak sekolah hingga orang tua dimobilisasi untuk dilatih kemiliteran. Tenaga buruh ditampung dalam pasukan buruh atau disebut “romusha”. Mereka dikerahkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan demi kepentingan pertahanan militer, misalnya membuat gua-gua buatan sebagai tempat persembunyian sekaligus sebagai benteng pertahanan.

Ribuan rakyat warga Kabupaten Tegal dipekerjakan sebagai “romusha”, untuk membuat kubu-kubu pertahanan di Prupuk dan pantai Tegal.¹⁴ Bahkan banyak juga yang dikirim ke luar negeri, seperti ke Birma, Siam, Singapura, Indochina, untuk dipekerjakan dalam pembuatan jalan kereta api, jembatan, pengerasan jalan dan sebagainya. Proyek pengadaan infrastruktur pada masa pendudukan Jepang dengan pengerahan tenaga kerja ‘romusha’ tersebut

13 Wawancara dengan Sahmad, pada tanggal 29 Juni 2010 di rumahnya.

14 Wawancara dengan Soegiharto, pada tanggal 29 Juni 2010 di rumahnya.

dapat dikatakan kerja paksa, seperti yang pernah dilakukan oleh Daendels pada waktu mengerjakan jalan raya Anyer – Panarukan. Sehingga rakyat sangat menderita, walaupun itu untuk kepentingan pembangunan pada masa kekuasaan Jepang.

Bagi pemerintah Balatentara Jepang pembangunan infrastruktur tersebut dianggap penting karena jalan raya, jalan kereta api, juga jembatan penghubung, merupakan sarana transportasi yang akan memudahkan hubungan antara tempat satu ke tempat lainnya. Selain itu pembuatan kubukubu pertahanan yang ada di Prupuk dan Tegal oleh Jepang digunakan sebagai benteng sekaligus sebagai tempat tentara Jepang dalam menghadapi musuh. Di sisi lain, pekerjaan-pekerjaan yang dipaksakan untuk kepentingan Jepang terhadap penduduk pribumi tersebut, selanjutnya membentuk tenaga yang terampil.

Bermula dari tekanan-tekanan Jepang yang memaksakan kehendak tersebut, sampai sekarang masyarakat Tegal mewarisi beberapa keterampilan. Pekerjaan yang harus dilakukan termasuk membuat barang-barang industri (kerajinan) dari logam, sehingga tercipta industri-industri rumahan (*home industry*) maupun yang dikelola secara profesional. Keberadaan industri rumah tangga tersebut selanjutnya membawa perkembangan kerajinan logam ini di tahun-tahun 1975-1986. Di Kecamatan Tegal Timur, yaitu di Kelurahan Kejambon dan Mangkukusuman tercatat jumlah perajin mencapai 300 orang, setiap pengusaha rata-rata mempunyai 30 pekerja.

Akan tetapi pada waktu terjadi krisis tahun 1998 jumlah perajin tersebut menyusut. Banyak pengusaha yang gulung tikar karena bangkrut. Banyaknya barang-barang produk dari Cina yang membanjiri pasar dan harganya jauh lebih murah menjadi penyebab kemunduran industri logam di Tegal. Di samping itu bahan baku logam sangat mahal, sehingga hanya pengusaha

yang bermodal kuat saja yang masih dapat memproduksi usaha kerajinan tersebut. Pengusaha kecil di Tegal ini merasa tidak kuat untuk melanjutkan produksinya, walaupun tempat itu memperoleh sebutan Jepangnya Indonesia (Cessnasari, 2011:16).

Kekejaman pemerintahan Jepang di Indonesia, termasuk di Kabupaten Tegal, berakhir ketika pihak Sekutu (Amerika Serikat) menjatuhkan bom atom di Kota Hiroshima dan Nagasaki, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, yang mengakibatkan pada tanggal 14 dan 15 Agustus 1945 Jepang bertekuk lutut pada Sekutu, sehingga sama sekali sudah tidak mempunyai kekuasaan atas seluruh wilayah yang didudukinya, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, rakyat Indonesia, khususnya para pemuda, segera bertindak cepat melucuti persenjataan Balatentara Jepang, selanjutnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan begitu seluruh rakyat Indonesia terbebas dari belenggu penjajahan, dan meneriakkan pekik ‘merdeka’ atas seluruh wilayah Nusantara agar mendapatkan pengakuan dunia atas kedaulatannya sebagai negara yang merdeka.

Selama pendudukan Jepang, bupati yang menjabat sebagai kepala daerah Kabupaten Tegal adalah R.M.A.A. Soekarman Mertohadinegoro. Akan tetapi selama revolusi fisik tahun 1945 beliau tak terdengar lagi beritanya dan tidak diketahui nasibnya. Oleh karena itu, setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagai bupati kepala daerah Kabupaten Tegal diangkatlah Bapak R. Soedijono Taroen Koesoemo. Sebagai bupati, beliau hanya menjabat selama kurang lebih satu bulan lalu meletakkan jabatan, dan tidak lama kemudian beliau meninggal dunia.

Selama pendudukan Balatentara Jepang di Indonesia khususnya di Tegal, rakyat Tegal mendapat tekanan yang benar-benar berat. Kelompok-kelompok dan latihan-latihan, kerja paksa, yang dibuat oleh Jepang di

bidang apa pun hanyalah untuk memenuhi 'nafsu' penguasaan Jepang saja. Kelompok yang mendapat tekanan tersebut misalnya *fujinkai*, *keiboden*, *seinendan*, latihan-latihan militer (*Kusukeiho*) bagi rakyat, juga latihan perang, baris-berbaris dengan aba-aba hitungan bahasa Jepang, misalnya *ichi* = satu, *ni* = dua, *san* = tiga, *shi* = empat (Suhartono, 1994: 133).

Tekanan-tekanan yang memberatkan rakyat inilah yang kemudian membekali rakyat untuk mengenal latihan kedisiplinan terutama di bidang ketentaraan. Selama pendudukan Jepang para pemuda mendapatkan latihan ketentaraan bagi mereka yang tergabung dalam angkatan bersenjata buatan Jepang yang dididik dan dilatih oleh tentara Nippon. Hal ini kemudian menjadi modal utama para pemuda Indonesia termasuk mereka yang bertempat tinggal di Tegal setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Jiwa prajurit untuk membela tanah air, kedisiplinan, yang sudah dimiliki rakyat Indonesia, khususnya Tegal, yang pernah tertempa latihan kemiliteran, sangat bermanfaat pada waktu menghadapi Agresi Militer yang dilancarkan oleh tentara Belanda setelah proklamasi kemerdekaan.

V. PARTISIPASI RAKYAT TEGAL PADA MASA PERANG KEMERDEKAAN

A. Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya

Kondisi masyarakat Tegal pada masa awal revolusi, baik secara sosial ekonomi maupun budaya tidak jauh berbeda seperti pada masa pendudukan Jepang. Masyarakat Tegal masih mengalami tekanan yang sangat berat, karena pemerintahan pendudukan Jepang telah merubah sendi-sendi kehidupan tradisional mereka, dan itu dilakukan secara menyeluruh dan mendalam (Khikmiyah, L., 2006: 37)

Kegiatan sosial masyarakat Tegal sesudah proklamasi kemerdekaan berjalan sangat lambat, karena aktivitas masyarakat terfokus pada usaha-usaha mengobarkan suatu gerakan rakyat yang dikenal dengan “Peristiwa Tiga Daerah” (Daryono, Y., 2008:73). Selain itu, kegentingan suasana akibat tanda-tanda adanya perang semakin menjadi nyata. Kedatangan Sekutu dari Semarang adalah salah satu faktor yang ikut memperkeruh suasana.

Dampak yang dirasakan oleh masyarakat Tegal dengan adanya Peristiwa Tiga Daerah itu adalah terpisahnya sebuah keluarga. Masyarakat merasakan adanya gangguan jalinan kekerabatan yang telah berlangsung lama dalam kehidupan keluarga yang kemudian menjadi terpisah, karena

banyak anggota masyarakat yang meninggal dalam peristiwa tersebut. Meletusnya Peristiwa Tiga Daerah menyebabkan pendidikan masyarakat menjadi terganggu, kacau, dan banyak masyarakat yang tidak bersekolah.

Mayoritas masyarakat Tegal beragama Islam, sehingga tidaklah mengherankan apabila di Tegal banyak terdapat pondok pesantren, guru agama, dan para kyai. Kyai dan guru agama pada saat itu mempunyai kedudukan yang istimewa, masyarakat menaruh hormat terhadap mereka. Kyai dan guru agama yang dihormati itu merupakan tokoh kharismatik.

Peran kyai dan guru agama sangat penting, mereka dianggap mampu mengurangi tindakan kejam ataupun meredakan suasana. Misalnya ketika pimpinan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) Kolonel H. Iskandar akan dibunuh, yang berhasil menyelamatkan adalah seorang kyai (Khikmiyah, L., 2006: 38)

Kelompok lain yang cukup berpengaruh dalam masyarakat adalah kelompok elite birokrasi, yaitu aparatur pemerintah seperti bupati, patih, wedana, camat, termasuk juga kepala desa atau bekel. Seorang kepala desa berperan sebagai pelindung rakyat, juga pengumpul pajak, sehingga kepala desa dianggap sebagai penghubung dengan fihak pemerintah. Namun ketika Peristiwa Tiga Daerah meletus, semua aparatur pemerintah tersebut tidak dapat berjalan dengan semestinya, sehingga masyarakat kemudian menghendaki adanya pergantian pemerintahan (Lucas, AE., 2004: 147)

Di bidang perekonomian setelah proklamasi kemerdekaan juga belum menunjukkan tanda-tanda ke arah kemajuan. Masyarakat Tegal masih trauma terhadap ekonomi perang peninggalan Jepang yang telah menyebabkan kesengsaraan rakyat. Masalah gizi yang tidak terkontrol menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit. Masyarakat pada waktu itu terkena penyakit busung lapar dengan ciri-ciri perut besar atau buncit, tubuh kurus

kering sebagai akibat kelaparan. Juga penyakit kulit menjadi wabah yang cukup memprihatinkan di kalangan rakyat.¹⁵

Sisa-sisa ekonomi penjajahan masih dirasakan oleh masyarakat, bahkan hukum rimba masih melekat pada jiwa masyarakat Tegal, yakni siapa yang kuat dialah yang dapat. Namun penderitaan akibat penjajahan Jepang itu diharapkan akan segera berakhir bersamaan dengan datangnya kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

Dengan dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, rakyat Tegal menyambut kemerdekaan itu sebagai pintu gerbang menuju ke arah yang lebih baik. Penduduk Tegal terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, yakni pribumi (Jawa), etnis Cina (Tionghoa), dan Arab. Di antara golongan-golongan bangsa tersebut, suku Jawa merupakan penduduk pribumi yang sebagian besar terdiri dari orang-orang kaya, yaitu para pangreh praja, lurah, para pedagang kaya dan selebihnya para petani yang berdiam di desa (Khikmiyah, L., 2006: 17)

Gema merdeka yang telah diproklamasikan di Jakarta, mendapat respon masyarakat Tegal yang telah lama mendambakannya, karena telah lama menanggung derita akibat perang, kekacauan dan penjajahan. Walaupun ada perasaan trauma, namun diproklamasikannya kemerdekaan oleh Soekarno-Hatta kemudian mendorong masyarakat untuk bangun. Para pemuda dan masyarakat menginginkan untuk dapat berkreasi, berkiprah membangun dalam rangka mengisi kemerdekaan yang telah dicapai itu.

Sehubungan dengan keinginan untuk maju dan menyalurkan gagasan yang memerlukan komunikasi, masyarakat penggemar radio di Tegal memimpikan untuk memiliki pemancar radio, sebagaimana pemancar yang

15 Wawancara dengan Sahmad, tanggal 28 Juni 2010 di rumahnya.

dimiliki Semarang. Pada masa pendudukan Jepang, Semarang mempunyai studio radio bernama *Hoso Kyoku*, yang dipimpin oleh Yamawaki beserta stafnya (Djawatan Penerangan RI,1953: 148). Studio ini mempunyai dua pemancar, masing-masing bergelombang 150 meter dan 119,2 meter.

+ Setelah kemerdekaan *Hoso Kyoku* diganti namanya menjadi Radio Semarang. Kemudian setelah ibukota Jawa Tengah, Semarang memanfaatkan radio yang telah ada, merambah ke daerah-daerah yang juga berkeinginan memiliki studio sendiri seperti keinginan masyarakat Tegal. Selanjutnya di Tegal, usaha untuk bisa membuat radio mengudara dipelopori oleh Sudigdo dengan beberapa kawannya. Kira-kira dua sampai tiga bulan setelah proklamasi, jadi sekitar bulan Oktober-November 1945, Studio Radio Tegal telah mengadakan siaran-siarannya (Djawatan Penerangan RI,1953: 151). Orang-orang yang membantu Sudigdo dalam menangani keberadaan studio radio Tegal ini juga mengusahakan perlengkapannya. Setelah sekian lama melangsungkan siaran, studio ini baru mendapat pengesahan menjadi cabang RRI di Tegal (Djawatan Penerangan RI,1953: 151).

Pada masa itu umumnya studio radio yang ada di kota kecil merupakan perwujudan gerakan-gerakan perjuangan untuk menyalurkan siaran pidato-pidatonya. Siaran mereka waktu itu umumnya mengutamakan topik-topik yang berisi membangun semangat juang untuk menegakkan Negara Republik Indonesia (Djawatan Penerangan RI,1953:152). Akan tetapi demi menjaga kondisi yang aman maka keberadaannya tidaklah semata-mata untuk radio perjuangan, kepentingan golongan tertentu saja, namun harus mempertimbangkan adanya kebutuhan-kebutuhan lain. Sehingga materi siaran yang dikehendaki hanya pada waktu-waktu tertentu saja dengan mengingat kepentingan masing-masing (Djawatan Penerangan RI,1953:152).

Dengan adanya perkembangan organisasi-organisasi juga partai, selanjutnya juga mempengaruhi materi penyiaran radio. Seperti Studio Radio RRI Cabang Tegal, yang sewaktu didirikan diusahakan oleh orang-orang penggemar siaran radio, kemudian juga dimanfaatkan oleh Tentara Keamanan Rakyat. Setelah mendapat pengesahan sebagai Cabang RRI di Tegal maka kemudian diadakan suatu pemisahan antara siaran radio tentara dan siaran RRI, sehingga keduanya dapat terpenuhi (Djawatan Penerangan RI,1953:152). Keberadaan Studio Radio Tegal ini kemudian berkaitan dengan tumbuh kembangnya organisasi dan partai yang ada. Bahkan di kelak kemudian hari ketika di Tegal muncul gerakan Tiga Daerah, radio dikuasai oleh para anggota gerakan tersebut, namun dapat diselesaikan oleh Pemerintah RI (Djawatan Penerangan RI,1953:152).

Pada waktu agresi militer Belanda tahun 1947, pemancar RRI Cabang Tegal dengan serombongan karyawannya diungsikan keluar kota. Adapun tempat pengungsianya yaitu di Lebaksiu. Rencananya dari Lebaksiu itu-lah acara-acara dapat disiarkan melalui corong RRI. Akan tetapi rencana tersebut gagal total karena desakan Belanda yang sangat kuat. Pemancar dan alat-alat lainnya dihancurkan, selanjutnya dimasukkan ke dalam sebuah sumur. Dengan adanya serangan Belanda yang sedemikian rupa maka dapatlah dikatakan bahwa RRI pada waktu itu hancur tanpa sisa (Djawatan Penerangan RI,1953:153). Sungguh patut disayangkan kehancuran Radio Tegal, karena melalui radio dapat disuarakan aspirasi masyarakat, informasi-informasi yang bermanfaat dan diperlukan oleh masyarakat.

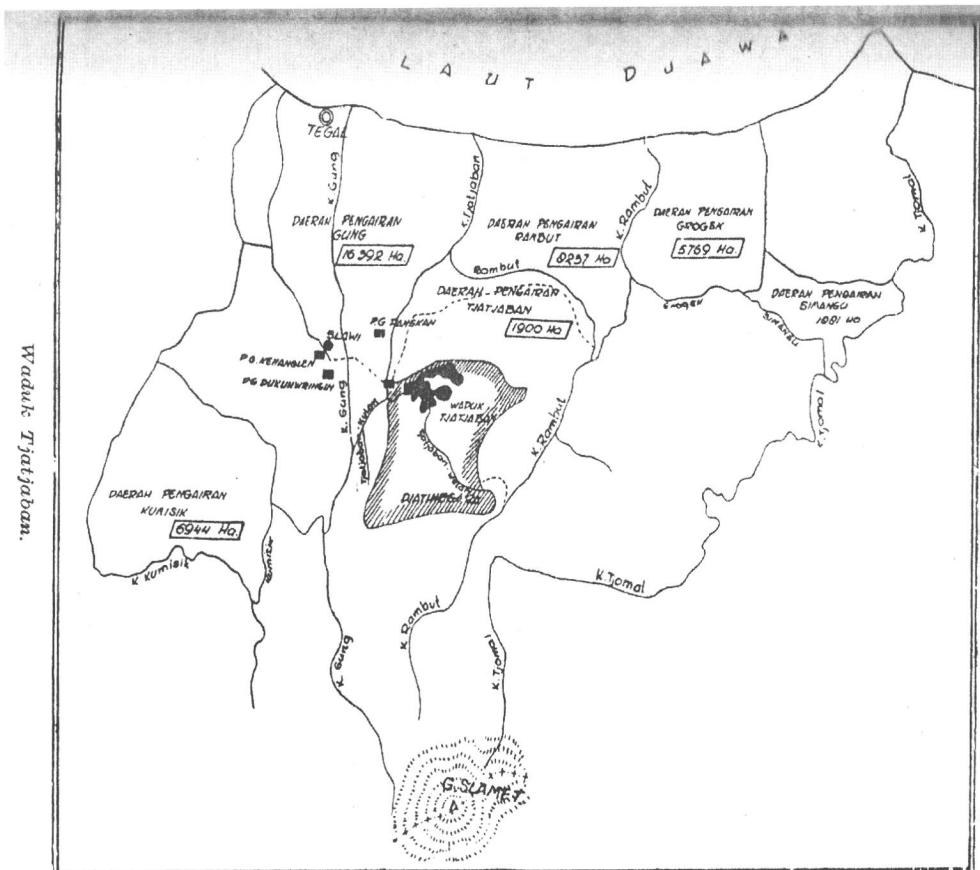
Dengan adanya studio maka segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dapat diudarakan, dari masa ke masa, termasuk topik-topik yang sedang muncul, juga masalah-masalah sosial, kesehatan, pertanian, perekonomian dan sebagainya. Mengenai perekonomian, pada

masa Hindia Belanda, bangsa Cina (Tionghoa) sangat dipercaya sebagai kaki tangan pemerintah. Mereka memegang peranan penting di bidang perekonomian, sebagian besar pedagang dan bertempat tinggal di kota di lingkungan pemukiman orang Belanda.

Pertanian merupakan mata pencaharian rakyat penduduk Tegal, baik sebagai petani penggarap atau buruh tani atau pun sebagai pemilik sawah/tanah. Di daerah dataran rendah, keadaaan tanahnya subur karena adanya pengairan yang baik dari sungai-sungai yang melewati daratan sehingga cocok ditanami padi dan palawija ketika musim kemarau. Sawah-sawah yang lain ditanami tebu untuk memenuhi kebutuhan pabrik gula yang terdapat di daerah itu. Pada masa Hindia Belanda, sebagian besar sawah daratan rendah ditanami tebu untuk mencukupi kebutuhan pabrik gula itu sesuai dengan target yang telah ditentukan. Di daerah pegunungan merupakan daerah yang subur dengan hasil pertanian seperti kopi dan teh. Kopi merupakan hasil ekspor utama di daerah Tegal selain teh, gula, dan karet.

Untuk memajukan bidang perekonomian daerah Tegal dibutuhkan prasarana pembangunan yang dirasa urgen pada masa itu. Pemerintah memandang perlu meneruskan rencana pembangunan waduk yang sempat terhenti dari masa sebelumnya. Seperti yang telah diuraikan terdahulu bahwa pada masa penjajahan telah ada rencana pembuatan waduk Cacaban untuk irigasi pertanian daerah Tegal. Semula, rencana yang ditangani oleh *Provinciale Waterstaats Afdeeling. Pemali-Tjomal* adalah untuk memperbaiki pengairan di daerah-daerah pengairan Kumisik, Gung, Rambut, Grogek dan Simangu. Akan tetapi rencana pembangunan waduk tersebut tidak sesuai harapan karena tersendat-sendat adanya pergantian-pergantian kekuasaan, maka kemudian mengalami kemacetaan dua kali. (Djawatan Penerangan RI,1953:293).

Setelah kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia sewaktu Presiden Soekarno ini berencana menyelesaikan pembuatan waduk Cacaban. Dalam rencana semula yang dibuat adalah waduk (Cacaban), dan pembuatan saluran-saluran dengan bangunan-bangunannya untuk mengalirkan dan membagi air dari waduk. Pada tahun 1950 terjadi perubahan rencana pembuatan waduk, karena untuk menyelesaikan kebutuhan lainnya.



Denah letak Waduk Cacaban

(Sumber : Djawatan Penerangan RI, 1953)

Baru pada tahun 1951 untuk yang ketiga kalinya pekerjaan pembuatan waduk Cacaban dimulai lagi (Djawatan Penerangan RI,1953:293, lihat denah). Kali ini pembuatan waduk Cacaban yang dimulai tahun 1951 terdiri dari 1) waduk dam, 2) menara pengambilan, 3) pipa pengambilan dan pembuangan air kelebihan atau *overlaat*.

Untuk pelaksanaan pekerjaan besar tersebut harus disertai pula perlengkapan lain sebagai pendukung utama. Di tahun ini pula dibuat persiapan-persiapan, yaitu 1) membuat jalan kereta api *deceauville* sepanjang 12 km, 2) pembuatan jalan untuk truk sepanjang 4 km dengan jembatan-jembatan, 3) memperbaiki lori-lorinya.

Pekerjaan yang telah selesai dapat dioperasionalkan dipergunakan untuk mengangkut bahan-bahan keperluan pembangunan. Barang yang diangkut terutama 1) tanah-tanah liat yang digunakan untuk waduk dam, 2) batu-batu dan pasir-pasir untuk pasangan dan pekerjaan pengecoran beton, dan lain sebagainya yang perlu diselesaikan. Sehubungan sampai akhir tahun 1951 persiapan-persiapan pembuatan waduk belum juga kelar. Oleh karena itu maka rencana pembangunannya masih diteruskan di tahun 1952 dan tahun-tahun berikutnya. Direncanakan di akhir bulan Maret tahun 1953 pekerjaan penggalian tanah untuk pipa sudah dapat diselesaikan, sedangkan dam, menara pengambilan dan pembuangan air yang berlebih dapat diselesaikan tahun 1954. Waduk Cacaban ini akan memuat 90 juta m³. Dam besar yang tetap mempunyai kaki yang lebarnya sekitar 100 m, tinggi sekitar 30 m, dan panjangnya 200 m (Djawatan Penerangan RI,1953:293).

Air yang akan mengisi waduk Cacaban berasal dari Kali Cacaban Wetan dan Kali Rambut. Untuk mengalirkan air dari Kali Rambut diperlukan adanya dam, saluran dan suplesi leiding Rambut-Cacaban dekat Jatinegara, karena akan mempermudah mengisi air bagi waduk Cacaban. Pembuatan

saluran dengan bangunan perlengkapannya ada saluran-saluran, yaitu 1) induk saluran yang panjangnya 0,5 km., 2) supllesi leiding Rambut-Cacaban 2 km., 3) Cacaban-Gung 5 km., 4) Cacaban-Rambut sepanjang 19 km.

Adapun sebagai kelengkapan bangunan lainnya yaitu saluran-saluran serta pembuatan dan pengambilan air yang ada di Kali Cacaban, di hilir waduk, juga bangunan-bangunan deker (*duiker*), gorong-gorong, dan bangunan-bangunan untuk keperluan pengairan. Pengaturan pembagian air selanjutnya demikian, daerah Kumisik mendapatkan air dari daerah Gung. Daerah Gung sendiri akan mendapat air dari waduk Cacaban. Daerah Grogek Simangu akan mendapatkan bantuan air dari Rambut. Daerah Rambut sendiri mendapatkan air dari waduk Cacaban (Djawatan Penerangan RI,1953:293).

Dalam pelaksanaan pekerjaan pembuatan waduk mengalami perubahan-perubahan. Mula-mula pembangunan bendung waduk yang dikerjakan yaitu bagian pondasi yang terdiri dari timbunan batu yang diberi lapisan plat beton bertulang. Akan tetapi bentuk yang telah direncanakan pembuatannya itu kemudian berubah yaitu menjadi bentuk dam yang dibuat dari tanah dan berintikan tanah liat. Langkah selanjutnya diadakan penyelidikan tentang sifat tanah di lokasi dan sekitarnya. Dari kajian yang dilakukan tersebut kemudian diputuskan bahwa pembuatan dam seluruhnya akan dibuat dari tanah dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Tanah yang dipergunakan untuk dam jenisnya adalah tanah yang bersifat keras (*kleisteen*).

Dalam keadaan asli jenis tanah *kleisteen* mempunyai sifat keras, namun apabila telah berpadu dengan udara atau oksigen maka akan berubah lemah dan hilang kekuatannya. Sehubungan dengan sifat tanah tersebut maka perlu adanya penelitian laboratorium. *Laboratorium Grondmechanica* di Bandung setelah melihat kondisi dan sifat tanah *kleisteen* tersebut maka ditetapkan bahwa penggalian yang dilakukan pada tanah tersebut hanya setinggi sekitar

25 cm di atas dasar tanah yang ditentukan. Pada saat pekerjaan timbunan tanah untuk dam akan dilaksanakan, maka lapisan yang tebalnya 25 cm tersebut dibuang. Cara ini dilakukan untuk menjaga bahwa dasar bangunan dam menempati pada tanah yang memenuhi syarat tidak bergeser atau labil. Jenis tanah *kleisteen* yang telah stabil tidak lagi mempunyai gaya geser, karena apabila bergeser akan membahayakan kestabilan dam yang dibuat (Djawatan Penerangan RI, 1953:293). Pembangunan waduk di daerah Tegal ini adalah salah satu upaya untuk kesejahteraan rakyat dan memajukan di bidang pertanian.

Masyarakat menamakan Waduk Cacaban dengan istilah *Dhung Pipisan*. Mungkin kata ‘dhung’ bermaksud sebagai kepanjangan kata *kedhung* (Jawa) artinya bagian sungai yang dalam, bisa menampung air yang banyak. Kata *pipisan* berarti alat dari batu tempat melumatkan (*mipis*, bhs. Jawa). Walaupun *Dhung Pipisan* atau Waduk Cacaban sudah lama direncanakan, namun pembangunannya tersendat-sendat. Baru sesudah kemerdekaan pembangunan waduk dilanjutkan. Setelah selesai, maka pada tanggal 19 Mei 1958 diresmikan oleh Presiden Sukarno (Sumarno, 2009:L).

Selanjutnya keadaan tanah di daerah pantai kurang subur karena mengandung garam. Tanaman yang cocok dengan kondisi seperti itu antara lain tanaman kelapa dan bunga melati untuk memberi aroma teh. Penduduk Tegal yang bermukim di daerah pantai itu sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan karena wilayah Tegal bagian utara merupakan lautan.

B. Bidang Politik

Kondisi politik masyarakat Tegal setelah datangnya kemerdekaan juga belum sepenuhnya mengalami kemajuan yang berarti sebagai dampak

dari pendudukan Jepang. Padahal pada masa pergerakan nasional sudah muncul beberapa organisasi politik yang berjuang untuk kemerdekaan dan melepaskan diri dari penjajahan. Namun kemudian Jepang melarang pembentukan organisasi politik, sebagai gantinya Jepang mendirikan beberapa organisasi kepemudaan.

Mobilisasi pemerintah Jepang terhadap pemuda Tegal dilakukan secara besar-besaran dalam program cadangan bagi kepentingan militer jepang. Mobilitas tersebut dalam bentuk barisan Seinendan, keiboden, Heiho, dan Peta. Dampak dari pembentukan organisasi tersebut adalah ketrampilan dalam menggunakan senjata dan sikap kedisiplinan yang selalu digembung dalam latihan-latihan.

Pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh pemuda merupakan keuntungan bangsa Indonesia untuk melawan penjajah. Para pemuda yang dilatih militer pada akhirnya akan berbalik melawan pemerintahan Jepang demi kepentingan perjuangan kemerdekaan. Mereka tidak sepenuhnya patuh pada Jepang, tetapi dibalik semuanya mereka juga melatih para pemuda lainnya setelah menyelesaikan tugasnya.

Penderitaan akibat penjajahan Jepang serta latihan-latihan militer mengubah sikap hidup dan pandangan rakyat Tegal. Budaya Jawa yang selalu pasrah dan menerima apa adanya tidak dianut lagi oleh sebagian pemuda. Pemuda Tegal mulai berjiwa reaksioner terhadap semua yang berkenaan dengan kebijakan Jepang.

Oleh karena itu, perjuangan membentuk kekuasaan dan kepemimpinan baru setelah Proklamasi Kemerdekaan RI memiliki dinamikanya sendiri yang kompleks. Lebih kurang dua bulan setelah proklamasi, dan disusul hilangnya pemerintahan Jepang, muncul keinginan-keinginan untuk melakukan sesuatu. Apabila keinginan tersebut dilandasi oleh iktikad baik akan

menimbulkan kebaikan. Sebaliknya jika dilandasi oleh nafsu negatif maka akan menimbulkan efek negatif pula, misalnya munculnya petualang-petualang politik. Awal November 1945, bergejolak suatu gerakan rakyat yang dikenal dengan “Peristiwa Tiga Daerah”, suatu peristiwa dalam Sejarah Revolusi Indonesia yang terjadi di Kabupaten Brebes, Tegal, dan Pemalang, Jawa Tengah (Lucas, AE., 1989: 101-118)

Saat itu, semua elite birokrat, pangreh praja (residen, bupati, wedana, dan camat), dan sebagian besar kepala desa “didaulat” dan diganti aparat pemerintahan baru, yang terdiri atas aliran-aliran Islam, Sosialis, dan Komunis. Sebagai pemimpin adalah Sakyani alias Kutil. Mereka dengan sengaja melempar isu-isu yang isinya menghasut rakyat yang dampaknya rakyat menaruh dendam terhadap para pejabat pamongpraja dan kepolisian negara bekas peninggalan Jepang.

Pamongpraja dan kepolisian negara bertugas mendampingi Komite Nasional Indonesia (KNI) untuk menjalankan pemerintahan di daerah. KNI Tegal, oleh para petualang politik, dianggap belum cukup dan tidak mampu menjalankan pemerintahan, maka muncullah hasutan dan suara-suara minir menghendaki digantinya para pejabat pemerintah daerah.

Rakyat Tegal melakukan protes, menghujat, serta melakukan aksi kekerasan terhadap Residen Pekalongan Mr. Besar, Walikota Tegal R. Soenget Reksoatmodjo, Bupati Brebes Sarimin Reksodihardjo, dan Bupati Pemalang R. Rahardjo. Mereka dianggap antek-antek NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*), suatu pemerintahan sipil Hindia Belanda yang dipersiapkan untuk memerintah kembali setelah Jepang kalah.

Bupati Tegal R.S. Soenaryo juga menjadi target gerakan Kutil. Akan tetapi, sebelum aksi Kutil untuk menculik dan membunuh Bupati Tegal itu tercapai, Soenaryo berhasil diselamatkan oleh Mansyur dari Angkatan

Pemuda Indonesia (API). Dalam Revolusi Tiga Daerah pengaruh Kutil sangat besar, selain dijadikan sebagai *The Great Man*, seorang pemimpin yang dalam setiap perkataannya didengar tidak hanya oleh orang-orang golongan pribumi yang berpendidikan rendah saja, tetapi orang kaya yang berpendidikan pun tunduk dan patuh pada tindakan dan perintah yang dilakukannya (Khikmiyah, L., 2006: 48)

Bulan Oktober 1945, Kutil membentuk organisasi yang bernama Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI). Gerakan yang dia pimpin mengatasnamakan AMRI. Gerakan ini mempunyai dua markas, markasnya yang pertama berada di Ujungrusi digunakan sebagai pusat pertahanan, sedangkan markasnya yang kedua di Talang menggunakan Bank Rakyat Talang sebagai markas terdepan (operasi) (Lucas, AE., 1989: 147)

Masyarakat yang ikut dalam gerakan Kutil dengan sendirinya masuk menjadi anggota AMRI diantara anggotanya adalah para pedagang, penjual makanan, penjahit, petani miskin, tukang besi, penjual jamu. Seperti badan-badan perjuangan lainnya, tugasnya ditetapkan sendiri oleh dia yaitu mencari sis-sisa orang Jepang dan melucutinya. Kemudian melakukan pengejalan terhadap agen-agen NICA (Lucas, AE., 1989: 147)

Revolusi sosial di Talang mulai lebih awal dari pada di tempat-tempat lain dan tujuan AMRI bentukan Kutil di masa revolusi sosial adalah pembagian kekayaan. Tujuan lain adalah menumpas setiap orang yang dicurigai menjadi agen NICA, yang dianggap sebagai pengkhianat. Sedangkan tujuan jangka panjang kelompok ini tidak jelas.

Kutil muncul sebagai pemimpin pada saat itu, seakan-akan mempunyai kharisma yang begitu besar. Ia seakan-akan diangkat oleh massa, dan merasa dirinya sebagai pemimpin karena dipuja-puja, dipercaya rakyat secara penuh

dan tindakannya untuk kemakmuran rakyat. Makin tebal keyakinannya, semakin besar pengaruhnya.

Munculnya Kutil menjadi awal terjadi dan munculnya pembunuhan-pembunuhan sadis yang dia lakukan. Tindakannya yang pertama adalah mengadakan razia umum, kereta api yang lewat pada saat itu dihentikan, kereta penumpang jurusan Purwokerto dan Tegal di razia, yang kelihatan pegawai diturunkan. Kelompok Kutil mengatakan pangreh praja dengan sebutan “kaum plontos”, karena mereka menggunakan blangkon. Pada saat itu pegawai-pegawai pemerintah menggunakan blangkon dan setiap akan masuk kantor mereka berjalan dengan membungkukan badan dari halaman kantor, sampai kedalam kantor. Lurah-lurah, camat-camat yang menentang dicopot, diseret ke jalan dan banyak juga yang dibunuh, Ada juga yang dirazia di kantor-kantor. Ia mengangkat camat dan bupati sendiri. Di setiap desa diberlakukan sama seperti itu (Khikmiyah, L., 2006: 17)

Aksi penyerbuan yang dilakukan kelompok Kutil dan komplotannya dimulai pada bulan November 1945 (peristiwa-peristiwa anarkhis sudah dimulai dari tanggal itu), sasarannya tidak hanya ditunjukkan untuk golongan pangreh praja saja. Namun ditunjukkan juga kepada polisi, asrama polisi, wilayah yang diserang diantaranya: Brebes, Kejambon, Margasari, Pemalang dan kemudian Batang diserbu oleh rakyat bersenjata dan dilucuti senjatanya.

Kutil sebagai pemimpin gerakan, sebagai komando dalam setiap pembunuhan-pembunuhan, dimulai dengan tindakannya yang berani menganiaya dengan cara yang tidak berperikemanusiaan. Seperti yang dialami oleh diri Ruslim, *opsichter* bengkel KA Tegal, ia ditiup di tiang listrik dan dipukuli secara beramai-ramai, baru setelah babak belur ditanya, mau ikut siapa? Setelah dijawab mau ikut Kutil barulah dia dilepaskan. Dengan anggapan

bahwa tindakan-tindakan mereka tidak akan mendapatkan hukuman dari yang berwajib, mereka kemudian berani melakukan tindakan pembunuhan.

Korban pembunuhan pertama adalah menimpa diri seorang anggota polisi negara bernama Singa, dia adalah orang yang paling sulit dibunuh karena Singa dianggap mempunyai alat-alat kekebalan semacam jimat, sehingga samurai (pedang panjang) tidak mempan walaupun berulang-ulang diarahkan pada tubuhnya. Singa akhirnya meninggal dengan cara dimasukkan dalam lubang yang telah dibuat oleh orang-orang Cina di dekat jembatan Kaligung dan dikubur hidup-hidup. Tindakan keji dan brutal dari massa pemuda pimpinan Sakyani ternyata tidak ada yang menuntut. Hal ini membawa akibat tindakan-tindakan yang lebih brutal dilakukan Sakyani. Ia dan anak buahnya mulai mengadakan tindakan teror kepada rakyat. Rumah-rumah penduduk diteror dan digedor, setiap orang didobrak untuk keluar dari rumahnya kecuali orang yang sudah tua dan sedang sakit. Mereka diharuskan untuk mengikuti gerakan-gerakannya dan kepada siapa saja yang tidak mau mengikutinya apalagi menentang, mereka tidak luput dari sasaran pembunuhan Sakyani.¹⁶

Pada saat itu, beribu-ribu massa rakyat membanjiri jalan besar Talang menunggu komando dari algoronya Kutil dan sejak saat itu pula massa pemuda yang brutal itu kemudian memblokade jalan ke jurusan selatan Slawi. Praktis seluruh daerah Talang dikuasai massa rakyat. Jalan raya Talang yang biasanya digunakan lalu lintas umum jurusan Tegal-Purwokerto menjadi tertutup, karena tidak ada lagi kendaraan yang berani lewat di jalan tersebut. Perbanditan pada saat itu situasinya memuncak menjadi lebih gawat dan timbul pembunuhan lagi yang ketiga kalinya terhadap: 1) R. Saleh, 2) Sidik

16 Wawancara dengan Sahmad dan Samsuri, tanggal 28-29 Juni 2010

dari pemuda API, dan 3) Moh. Ali, karyawan pabrik Texil Tegal. Ketiga orang tersebut, dibunuh secara beramai-ramai oleh massa rakyat di desa Pesayangan, Talang (Khikmiyah, L., 2006: 19)

Kejadian-kejadian tersebut, dalam waktu yang relatif singkat segera meluas dan menjalar ke daerah-daerah lainnya dan meledakkan gerakan rakyat tiga daerah. Gerakan ini mulai bergerak menyerbu kantor-kantor kecamatan, kawedanan, dan menyerbu kantor polisi di Kejambon dengan melucuti senjatanya, sehingga mengakibatkan para pejabatnya melarikan diri, kecuali Wedana Balapulang yang tertangkap dan akhirnya dibunuh (Khikmiyah, L., 2006: 19)

Situasi di luar Kota Tegal setiap hari selalu timbul huru-hara, keributan-keributan, pengejaran-pengejaran, dan penangkapan-penangkapan terhadap lurah, pegawai pamong praja dan kepolisian negara dengan jalan beramai-ramai memukul kentongan dan timbul penyembelihan-penyembelihan terhadap orang-orang yang dianggap menentangnya, dan pada setiap malam harinya terjadi penculikan-penculikan, pembakaran-pembakaran rumah.

Situasi sudah benar-benar gawat, sulit untuk dapat dikendalikan. Massa rakyat sudah menjadi meluap-luap, penduduk dicekam ketakutan, setiap hari terdengar berita kematian karena ulah keji massa rakyat pimpinan Sakyani. Dalam situasi yang demikian orang tidak boleh berkata keliru atau secara bersenda gurau sekalipun dengan teman sendiri. Sebab salah-salah bisa dianggap menentang sehingga pada waktu itu orang-orang menjadi terdiam diri tidak berani berkata apa-apa, kecuali apa yang dikatakan oleh Kutil dan komplotannya harus dijawab dengan suara gemuruh “mufakat, mufakat”.

Seperti yang menimpa Dastra dari Desa Harjosari Adiwerna. Dastra terkenal sebagai seorang jagoan sehingga kalau berbicara di muka umum seenaknya sendiri, oleh massa rakyat dia dianggap tidak menyetujui

gerakan rakyat. Ia langsung diseret dan di pukul kepalanya dengan pukul besi sehingga meninggal seketika. Kejadian ini terjadi di markas pemuda Ujungrusi (Khikmiyah, L., 2006: 20)

Tanggal 10 Oktober Camat R.M.Suparto Sastrosuworo, Camat Adiwerna dengan berseragam lengkap, camat yang masih muda dan belum berpengalaman, berbicara di depan umum di Lemah Duwur, di depan makam kuno Tegal Arum. Ia mengatakan bahwa Presiden Sukarno telah ditahan oleh NICA yang baru saja mendarat bersama-sama pasukan Inggris di Jakarta pada tanggal 29 September 1945. Berita-berita semacam itu, memang telah didesas-desuskan di Jakarta. Setelah selesai pidato, Suparto tidak segera meninggalkan rapat dan ia di bunuh setelah rapat berakhir. Sebelum dibunuh, camat tersebut minta untuk diperkenankan adzan terlebih dahulu (Lucas, AE., 1989: 153)

Camat Adiwerna dibunuh, diseret menuju lorong, kepalanya pecah. Ada orang yang tidak sengaja menginjak rambut kepala yang sudah gembel akibat darah yang sudah kering karena banyaknya darah yang keluar. Setelah diperhatikan ternyata kepala Camat Adiwerna telah pecah (Khikmiyah, L., 2006: 23)

Contoh lain dari tindakan kelompok Kutil yaitu dengan brutal menjarah dan membunuh orang-orang yang sebetulnya mereka tidak tahu apa-apa, Slamet (23 tahun) anak sulung Wedana Adiwerna menjadi sasaran amarah kelompok Kutil. Ia mendapat surat dari pimpinan API yang mengatakan bahwa harta milik keluarganya dapat diambil di markas API Kejambon dengan sebuah truk pinjaman dari kantor kabupaten. Slamet berangkat ke markas API dan ia tak pernah kembali. Ia di bunuh sangat keji dan brutal dengan cara ditangkap dan diikat, kedua tangan dan kakinya kemudian

diangkat dan dijatuhkan di atas batu besar berulang-ulang kali sehingga meninggal seketika.

Keadaan sepanjang jalan utama ke Adiwerna waktu itu sepi sekali tidak ada kendaraan lewat, karena di setiap meter ada rintangan jalan dari kayu atau bambu. Di pinggir-pinggir jalan banyak orang dan anak-anak yang membawa bambu runcing, semua orang yang lewat harus memberi salam “merdeka” kepada mereka. Di setiap pos jaga terkumpul meja kursi dan barang-barang rampasan dari orang-orang Cina yang melewati pos itu (Khikmiyah, L., 2006: 22)

Rakyat mulai terpengaruh oleh hasutan-hasutan yang dilancarkan oleh para petualang politik yang mendalangi gerakan rakyat tiga daerah. Daerah-daerah yang sudah terpengaruh ketika itu adalah Kecamatan Talang, Adiwerna, Slawi sebagai pusat gerakan. Di Brebes meliputi Brebes kota, Jatibarang, Losari Timur dan Tonjong dengan pimpinan Binadji, ketua KNI Brebes. Daerah Pemalang meliputi Pemalang kota, Petarukan dan Comal dengan pimpinan Supangat dan Idris.

Dalam Revolusi Sosial yang terjadi di Tegal, pengaruh Kutil sangat besar, itu terbukti dari banyaknya orang-orang yang menjadi pengikut dan ikut dalam gerakan yang ia pimpin. Masyarakat dengan sendirinya dengan penuh sukarela ikut bergerak dan berjuang bersama, tidak ada paksaan, maupun janji-janji yang Kutil berikan.

Masyarakat pada waktu itu berada dalam keadaan dan situasi yang sulit penuh ketakutan dan kekhawatiran karena makin banyaknya orang-orang yang dibunuh oleh massa pimpinan Kutil. Ia tidak menggunakan cara-cara kekerasan fisik, namun dia hanya mengumumkan di depan umum bahwasanya akan diadakan penyerangan-penyerangan terhadap orang-orang yang tidak ikut. Orang-orang yang tidak ikut dengan sendirinya dianggap

adalah pengkhianat dan langsung dibunuh ataupun didombreng ke muka umum.¹⁷

Setiap akan mengadakan pembunuhan, ia mengadakan rapat terlebih dahulu di Bank Rakyat (Bank BRI Cabang Talang sekarang) yang dijadikan markas gerakannya. Dia berdiri diatas podium dan menyebutkan nama-nama orang yang akan dibunuh, bahkan apabila orang itu sudah dalam penyekapan, orang tersebut disuruh naik di podium dan diperlihatkan pada massa dan secara serempak massa rakyat selalu mengatakan “setuju”.

Gerakan bisa menjadi besar dan membuat anggotanya bertambah banyak, khususnya dari masyarakat adalah dengan membunyikan dan memukul kentongan dalam istilah bahasa Tegal dikenal dengan “tung-tung grumbung”, yaitu membunyikan kentongan di sepanjang jalan dan dengan sendirinya masyarakat keluar dari rumah. Tua muda kecuali orang yang sedang sakit, berjalan di jalan raya dan bergabung dengan massa lainnya. Mereka bergabung ikut mengeksekusi menghukum orang-orang yang dianggap pro-Belanda, ataupun orang pribumi yang dianggap sebagai pengkhianat dan orang-orang yang dianggap melecehkan republik.

Secara umum Kutil tidak memaksa orang untuk mengikuti gerakannya. Artinya ia tidak menyuruh paksa dengan menggedor-gedor pintu turun sendiri dari rumah ke rumah dan mengatakan “harus ikut”. Akan tetapi apabila Kutil melihat sendiri ada masyarakat yang tidak ikut bergerak, pada saat itu juga ia tidak segan-segan untuk membunuh orang tersebut. Oleh karena tindakannya yang menakutkan itulah, dengan sendirinya masyarakat apabila terdengar ada aba-aba dan Kutil mengatakan “siap”, pasti masyarakat akan selalu siap mendukung gerakan tersebut. Walaupun pada akhirnya di

17 Wawancara dengan Samsuri, tanggal 28 Juni 2010 di rumahnya

tengah-tengah perjalanan, masyarakat yang tidak setuju dengan gerakan itu kemudian meninggalkan rombongan massa dan berjalan ke arah lain.

Persenjataan yang digunakan pada saat itu masih sangat sederhana. Yang pertama digunakan adalah senjata yang dibuat dari bahan bambu yang diruncingi yaitu bambu runcing atau pada saat itu masyarakat menyebutnya dengan nama *cocolan*. Ada beberapa senjata api hasil rampasan tentara Jepang dan polisi yang telah dibunuh dan hanya beberapa orang saja yang menggunakan. Kutil sendiri pada saat itu tidak menggunakan senjata apa-apa. Ia bertindak sebagai pemimpin gerakan yang memberikan komando. Gerakannya pada saat itu mempunyai pengaruh yang sangat besar, terutama perkataan Kutil yang seperti dijadikan hukum dalam masyarakat (Khikmiyah, L., 2006: 24)

Sebagai contoh pada saat itu sudah dilakukan pendombongan pada seorang laki-laki yang ketahuan selingkuh. Ia diperintahkan hanya menggunakan celana pendek, dengan muka yang dicoret-coret menggunakan angus. Laki-laki itu diarak di jalan raya dengan diikuti massa yang berada di belakang dengan membawa kaleng kosong, kentongan kayu (atau apa saja) yang dipukul oleh para pengaraknya. Bunyi kentongan tergantung pada jumlah dan irama pukulannya. Pada umumnya di Jawa, di desa tempat lurah biasanya ada tabuhan yang disebut kentongan yang terbuat dari potongan kayu besar dan dilubangi, sehingga apabila dipukul keluar bunyi “thong”. Dari kata “thong” itulah timbul nama “kentongan”.

Bunyi kentongan biasanya digunakan sebagai tanda-tanda waktu rapat desa, kebakaran, pencurian, atau tanda bahaya lainnya. Hukum yang berlaku pada masyarakat saat itu adalah hukum “tombreng-tombreng”, yakni suara pukulan dari kaleng kosong, kentongan atau apa saja sebagai tanda untuk

menyiarkan berita bahwa mereka telah menangkap pencuri desa, pamong desa yang dianggap korupsi (Lucas, AE., 1989: 143)

Pendombrengan terhadap pasangan orang selingkuh mendadak berhenti ketika Kutil serentak mengatakan “jangan”. Dengan sendirinya orang itu dilepaskan dan tidak jadi dibunuh namun sebaliknya ketika Kutil mengatakan “bunuh”, pasti masyarakat dengan sepakat setuju untuk mengadakan pembunuhan. Perkataan Kutil pada saat itu benar-benar menjadi hukum yang dipatuhi masyarakat.

Situasi di luar Kota Tegal setiap hari selalu timbul huru-hara, keributan-keributan, pengejaran-pengejaran, dan penangkapan-penangkapan terhadap lurah, pegawai pamong praja dan kepolisian negara. Dengan jalan beramai-ramai memukul kentongan dan timbul penyembelihan-penyembelihan terhadap orang-orang yang dianggap menentang. Dalam situasi seperti itulah cara dan pandangan rakyat sudah tidak bisa dibenarkan lagi, rakyat menganggap pandangan Kutillah yang nantinya akan memberikan suatu perubahan dalam masyarakat.

Gerakan Kutil inilah yang akhirnya melahirkan pemahaman-pemahaman dalam ideologi pada masing-masing anggotanya. Perongrongan terhadap revolusi dan siapapun yang menjadi penggerak maupun pelaksana-pelaksanaanya, ia adalah musuh-musuh revolusi dari dalam. Peristiwa-peristiwa tersebut pada hakikatnya adalah akses-akses revolusi yang berupa penyimpangan-penyimpangan dari rel revolusi Indonesia yang sebenarnya, karena penyesatan-penesatan oleh ideologi-ideologi dan alam-alam fikiran Liberalisme, Komunisme, Marxisme, Leninisme, Maoisme dan faham-faham lain serta oknum-oknum yang bertentangan dengan jiwa Pancasila. Pada hakikatnya Peristiwa Tiga Daerah merupakan akses revolusi yang kalau tidak ada kewaspadaan dan kecepatan bertindak yang dilakukan oleh

TKR Resimen XVII maka hal itu dapat mengancam keselamatan revolusi Agustus 1945 yang berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila (Khikmiyah, L., 2006: 26)

Dalam Tri Upaya Sakti dinyatakan bahwa revolusi Indonesia yang dijiwai oleh Pancasila merupakan gerakan-gerakan simultan antar penjebolan dan pembangunan destruksi dan konstruksi. Revolusi yang simultan dan multi kompleks tidak mustahil menimbulkan gerakan-gerakan yang pada hakikatnya merupakan suatu akses. Kemungkinan timbulnya akses-akses itu semula dapat kita terima manakala kita selalu ingat kondisi dan situasi pada saat tercetusnya revolusi.

Kondisi pada masa itu, rakyat dan bangsa Indonesia berjuang dan menghimpun kekuatan tanpa adanya perintah-perintah dari atasan. Di sisi lain, situasi pada saat itu masyarakat Indonesia di hadapkan pada suatu krisis. Terjadi adanya krisis kelaparan, masyarakat banyak yang meninggal karena tidak mampu makan. Situasi kota yang tidak terkendali yaitu dengan kacaunya keadaan sangat memudahkan bagi unsur petualang-petualang politik maupun kriminal untuk memancing di air keruh, dengan jalan meng-hasut dan menunjuk-nunjuk kambing hitam.

Dalam gerakan yang dipimpin oleh Kutil ini, dengan tindakannya yang arogan, sadis dan tidak berperikemanusiaan menunjukkan bahwa ia sebenarnya berpaham komunis. Dugaan itu lebih diperkuat lagi dengan akan dibunuhnya orang-orang dari golongan agama, kyai-kyai yang dianggap menentangnya.

Tindakan Kutil membunuh orang-orang dari golongan agama dimulai tanggal 27 November 1945 kira-kira jam 05.00 dengan berkendaraan sedan, Komandan Resimen XVII tiba di markas yang masih sepi, yang ada hanya petugas jaga piket. Haji Iskandar Idris lalu memerintahkan kedua orang

petugas yakni Tjasmuan dan Ambari untuk memanggil Kyai Bisri dan Kyai Muchidin, ulama yang dipandang mempunyai pengaruh besar di daerah Talang. Mereka diajak pergi ke daerah tersebut untuk memberi nasihat kepada murid dan santrinya yang banyak menjadi pengikut gerakan pada saat itu. Kemudian Kyai Bisri, Kyai Muchidin, H. Iskandar Idris dengan berkendaraan sedan dikawal oleh satuan regu pasukan bersenjata yang menggunakan kendaraan truk berangkat menuju Talang. Pada waktu kendaraan yang membawa komandan resimen dengan dua ulama itu memasuki daerah Talang tiba-tiba dihentikan oleh rakyat. Kendaraan terpaksa berhenti, selanjutnya kedua ulama Kyai Bisri dan Kyai Muchidin dibawa ke selatan dan dimasukkan ke dalam bangunan rumah tua yang sudah tidak digunakan. Rumah inilah yang kemudian dijadikan sebagai tempat tahanan. Rumah ‘tahanan’ ini pula yang juga pernah untuk menyekap Kardinah. Bangunan yang digunakan sebagai tempat penyekapan tersebut sekarang dimanfaatkan untuk SD Talang. Kyai H. Iskandar Idris dengan kendaraan termasuk sopirnya dibawa ke markas pemuda Ujungrusi, sedangkan truk-truk regu pengawal dikeroyok massa rakyat dan dilucuti senjatanya (Khikmiyah, L., 2006: 27).

Pada dasarnya Gerakan Kutil berlandaskan azas idiosiologi Komunisme-Marxisme- Leninisme-Maoisme yang mengatasnamakan untuk kepentingan rakyat. Adapun sebab-sebab mendasar yang membuat Marxisme sebagai sebuah ajaran memiliki daya pikat dan daya hidup yang panjang adalah:

1. Marxisme adalah teori yang monistik yang memegang kunci penjelasan mengenai segala sesuatu yang penting dalam organisasi dan masyarakat sekaligus mengenai segala hal yang mungkin terjadi di masyarakat.
2. Lepas setuju atau tidak bahwa dalam sekalian bentuknya yang terselubung dalam seluruh teori-teorinya terkandung suatu ekspresi

harapan. Harapan ini mengambil bentuk, penyusunan suatu konsep masyarakat masa depan yang dianggap pasti benar. Sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai pegangan dan ukuran yang sudah pasti berbeda dengan masyarakat yang sekarang. Konsep mengenai masa depan diberi kerangka dan batas-batas yang lebih spesifik, berupa keruntuhan sistem kapitalisme dan berakhirnya kebudayaan. Kapitalis inilah sebagai utopia yang digunakan oleh banyak pemimpin bangsa.

3. Mereka percaya akan kebebasan, sehingga banyak orang yang kemudian juga terpikat dengan marxisme karena gagasan kebebasannya. Alasan lain dalam beberapa hal marxisme menyimpan kebenaran. Betapapun kaburnya marxisme membeberkan beberapa peristiwa dan fakta sosial yang secara khusus bicara tentang hakikat masyarakat industri, itu sebabnya “kelebihan” dalam teori Marxisme adalah penjelasan-penjelasannya mengenai perubahan sosial memberi tempat bagi faktor eksogen (luar) di mana pada beberapa teori perubahan sosial hal ini kurang mendapatkan perhatian yang memadai (Khikmiyah, L., 2006: 29).

Bentuk kepemimpinan Kutil pada masa revolusi sosial, tidak terlihat jelas. Bentuk gerakan pada saat itu boleh dikatakan berantakan, *semrawut* dalam bahasa Tegal. Gerakan itu adalah gerakan spontanitas, tidak memegang hukum tetapi pro kemerdekaan. Organisasinya belum rapi dan tanpa bentuk. Gerakan itu menggunakan Bank Rakyat (Bank BRI Cabang Talang sekarang) sebagai markas gerakan.

Gerakan Kutil adalah gerakan spontanitas rakyat, tidak mempunyai bendera maupun lambang-lambang khusus, bendera yang dibawa rakyat adalah bendera Merah Putih, sebagai simbol perlawanan rakyat. Tidak ada

struktur yang resmi dan jelas. Namun secara sederhana struktur dalam gerakan itu sudah ada walaupun bentuknya masih sederhana dan tidak tertulis jelas dalam susunan struktur sebuah gerakan. Struktur yang sederhana itu terlihat dengan adanya pembagian tugas yang lumayan jelas, bagi orang-orang yang berada di bawah Kutil.

Kutil sebagai komandan tertinggi mempunyai dua ajudan yang selalu menemani dia kemanapun. Mereka berjalan layaknya dua tentara yang siap mendapat perintah dari komandannya. Dua ajudan Kutil bernama Rasyan dan Abdul Manaf. Setiap pulang dari markas cara berjalan mereka seperti orang yang berbaris, dan memakai senjata *klewang*. Anggota yang lain ada juga yang tugasnya mengumumkan di jalan-jalan pada masyarakat bahwasanya akan diadakan pembunuhan dan pendombrengan. Salah seorang juga ada yang tugasnya mengumpulkan orang-orang Cina untuk membuat lubang kuburan. Apabila ada orang yang berteriak di jalan dan mengumumkan bahwa harus membuat lubang, dengan sendirinya orang-orang Cina keluar dari dalam rumah membawa cangkul dan berbaris mencangkul tanah di sebelah Jembatan Sungai Gung (Khikmiyah, L., 2006: 30).

Tidak hanya itu saja, Kutil juga memerintahkan agar orang-orang pribumi yang bekerja pada orang-orang Cina sebagai pembantu (dalam bahasa Tegal lebih dikenal dengan sebutan “babu”) segera keluar dari pekerjaannya dan tidak diperbolehkan bekerja pada orang-orang Cina lagi. Apabila ada orang yang tidak menuruti perintahnya, Kutil tidak akan segan-segan untuk membunuh..

Sikap Kutil yang demikian itu menimbulkan rasa takut di hati setiap orang pada umumnya di Tegal. Sehubungan dengan hal itu, keadaan Tegal pada masa kepemimpinan Kutil aman, perbanditan di antaranya pencurian, penggarongan tidak ada. Keadaan desa dan wilayah Tegal pada saat itu tenang

dari pencurian dan penggarongan. Rumah tidak dikunci pun barang-barang dan kekayaan lainnya aman karena tidak ada yang berani mencuri apalagi menggarong. Mereka takut pada Kutil, takut apabila tindakannya ketahuan karena Kutil tidak hanya menindak orang-orang yang dianggap pro-Belanda saja. Namun ia juga menindak pencuri yang ketahuan mencuri, biasanya mereka diarak ke jalanan dijadikan tontonan masyarakat dan didombreng-dombréng sepanjang jalan. Ada pada saat itu pencuri ayam yang ketahuan, ayam curiannya dikalungkan dan didombreng di jalan raya.

Orang Cina pada saat itu diundang datang ke markas, orang Cina ketakutan. Mereka bersedia menyerahkan harta benda atau apapun yang mereka punya dan bersedia memenuhi apa saja yang mereka butuhkan asalkan mereka tidak dibunuh. Tidak ada perlawanan sedikitpun dari mereka, ada juga beberapa orang Cina yang mlarikan diri, keluar dari wilayah Tegal meninggalkan harta bendanya karena takut dibunuh.

Kepemimpinan Kutil berakhir ketika tiga kota Slawi, Pemalang, dan Brebes telah dikuasai oleh gerakan massa. Tanggal 4 November 1945, gerakan massa tiga daerah mengadakan penyerbuan Kota Tegal. Tampak ribuan massa rakyat dengan membawa bambu runcing dan berkalungan janur kuning, beramai-ramai membaca tahlil berjalan menuju ke utara. Sebagian massa lainnya keluar masuk kampung mencari orang laki-laki untuk diajak menyerbu Kota Tegal, sedang yang perempuan disuruh menyediakan minuman di depan rumah. Massa rakyat sampai di jalan simpang tiga, beramai-ramai menyerbu dan menduduki kantor kabupaten dan stasiun kereta api (Khikmiyah, L., 2006: 31).

Bupati Tegal, RS. Sunaryo dengan cepat diselamatkan oleh Mansyur dari pemuda API. Ia disembunyikan di markas pemuda API selanjutnya dibawa ke Pekalongan, untuk menyelamatkan diri. Raden Ajeng Kardinah,

adik kandung R.A.Kartini yang saat itu berada di tengah-tengah bupati bersama keluarga bupati lainnya dibawa oleh massa rakyat dan dipaksa berpakaian sarung goni dan diarak keliling kota, sehingga menjadi tontonan dan bahan olok-olokan massa.

Di stasiun kereta api, massa rakyat membongkar brangkas dan merampok uang serta menguasai stasiun kereta. Hari itu juga massa rakyat mulai mengejar-ngejar para pejabat di Kota Tegal. Mereka yang tertangkap kemudian dibunuh secara keji tercatat:

- 1). Haji Abu Bakar, 2). Bekas pengurus Badan Ekonomi pada masa pemerintahan Jepang,
- 3). Hamzah (putera Abu Bakar), 4). Singgih (Ajun Jaksa), 5). H.Ichsan (Konsul Haji), 6). Sumarjono (guru SMP Negeri Tegal), 7). Tiga orang tidak dikenal, 8). Wedana Tegal. Adapun Basirun dan keluarganya menghilang (Jarahdam VII,1968:21)

Alun-alun Tegal waktu itu dijadikan markas gerakan massa beribu-ribu massa rakyat selalu membaca takbir. Mereka datang dari berbagai desa. Warga Kota Tegal yang tidak mau ikut-ikutan waktu itu menyembunyikan diri, sehingga ada penilaian dari gerakan massa bahwa warga kota Tegal “perempuan” semua.

Hari itu juga, massa yang berkumpul di alun-alun mulai bergerak ke bagian utara kota yang masih dikuasai oleh TKR. Perjalanan massa rakyat dibagi menjadi dua kekuatan: 1). Lewat Jalan Gajah Mada, 2). Sebagai kekuatan inti yaitu yang lewat Jalan A.Yani.

Mereka bergerak sambil mengumandangkan takbir, sehingga terdengar suara gemuruh. Walaupun beberapa pimpinannya telah tertangkap tetapi gerakan rakyat semakin menjadi-jadi. Mereka kemudian memperluas daerah

pengaruhnya antara lain menyerbu asrama polisi di Brebes, Pemalang, dan berhasil melucuti senjatanya, sedangkan terhadap para prajurit TKR mereka masih berfikir dua kali untuk bertindak menyerang.

Kegagalan penyerbuan di Kota Tegal rupanya masih menghantui mereka. Terbukti waktu massa gerakan rakyat hendak menyerbu markas TKR di Petarukan, mereka hanya bergerombol dan tidak berani menyerang. Mereka kemudian bubar setelah pimpinannya yang dikenal kebal terhadap senjata tewas di tembus peluru anggota TKR.

Sejak saat itu para pimpinan gerakan massa menganggap bahwa Pemerintah Daerah Tegal, Brebes, dan Pemalang sudah tidak berfungsi terbukti para pejabatnya seperti Bupati Tegal, Brebes, dan Pemalang dan Residen Pekalongan Mr. Besar meninggalkan tempat tugasnya. Kejadian itu dimanfaatkan oleh para dalang komplotan Kutil untuk mengangkat para pejabat dari orang-orang mereka sendiri. Beberapa pejabat yang diangkat oleh dalang komplotan Kutil tercatat antara lain:

Bupati Tegal	:	Kyai Abu Sudjai, dari Desa Pacul
Bupati Brebes	:	Kyai H. Satori
Bupati Pemalang	:	Supangat
Residen Pekalongan	:	Sardjio
Patih Kabupaten Tegal	:	Tjitrosatmoko
Wedana Tegal	:	Mardjono wakil ketua KNI
Wedana Slawi	:	Kyai H. Fachruri
Wedana Adiwerna	:	Kyai H. Mawardi (Achmad, 1977:19)

Pengangkatan para pejabat itu sempat memusingkan masyarakat sebab komplotan Kutil didalangi oleh orang-orang yang berpaham komunis, tetapi mengangkat para pejabat yang sebagian besar para ulama dan tokoh

agama Islam. Setelah mengadakan pengangkatan pejabat, ia melakukan penyerbuan ke Kota Pekalongan. Penyerbuan ke Kota Pekalongan menjadi akhir penangkapannya. Adanya penyerbuan gerakan ini ke Kota Pekalongan dimanfaatkan oleh TKR untuk melakukan penangkapan terhadap Kutil dan komplotannya, serta mengakhiri gerakan Kutil dan komplotannya yang semakin lama ternyata tindakannya meresahkan masyarakat.

Dalam menghadapi penyerbuan gerakan Kutil, TKR menggunakan taktik kota terbuka, yaitu dengan cara membuat sepi Kota Pekalongan. Masyarakat diminta untuk tidak berkeliaran di jalan-jalan umum sehingga menimbulkan kesan bahwa Kota Pekalongan tidak dijaga keamanannya. Taktik dan strategi yang diterapkan oleh TKR dengan baik dan lancar sehingga tidak dapat diketahui oleh seorang pun dari fihak Kutil yang dikirim ke Pekalongan.

Gerakan Tiga Daerah dari Tegal dan Pemalang bergerak ke Pekalongan dipimpin langsung oleh algojonya yaitu Kutil alias Sakyani. Massa dari Tegal naik kereta api sedang massa dari Pemalang naik truk kemudian dari kedua massa tersebut bertemu di depan stasiun kereta api. Laskar Gerakan Tiga Daerah dengan membawa senjata dan bambu runcing bergerak menuju kantor karesidenan. Ketika mereka sampai di halaman kantor dan bermaksud mengepung, TKR segera bertindak dan mengadakan pengepungan di bawah ancaman senjata. Akhirnya massa menyerah dan para pemimpinnya segera dimasukkan ke sel tahanan.

Sakyani alias Kutil datang belakangan, ia dikawal oleh tujuh buah kendaraan. Seorang prajurit TKR, Kartedjo waktu itu menyamar sebagai massa rakyat menyetop iring-iringan kendaraan tersebut. Para pemimpin massa yang bermobil itu rupanya mengira bahwa gerakan rakyat menyerbu ke kantor karesidenan telah berhasil. Mereka menurut saja diajak meninjau

markas resimen oleh prajurit Kartedjo yang menyamar. Dengan mudah akhirnya para pemimpin gerakan rakyat termasuk Kutil dapat ditangkap dan mereka kemudian dimasukkan ke dalam sel tahanan.

Tindakan penyelesaian peristiwa tersebut dimulai pertengahan Desember tepatnya tanggal 17 Desember 1945, resimen TKR Pekalongan menerima berita internasional dari markas besar tentara yang isinya menyebutkan bahwa dalam waktu dekat Presiden RI beserta Panglima Besar Sudirman akan mengadakan kunjungan kerja ke daerah Tegal. Dengan adanya berita tersebut mendorong TKR Pekalongan untuk segera menyelesaikan dan mengambil tindakan keamanan dan ketertiban sehubungan dengan gangguan keamanan yang dipimpin oleh kelompok Kutil.

Gerakan penyerangan dan pembersihan terhadap kekuatan-kekuatan massa rakyat Kutil segera dilakukan, untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban daerah yang telah mengancam stabilitas nasional, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa rakyat pada umumnya tidak setuju dengan Gerakan Rakyat Tiga Daerah, terbukti dengan adanya perlawanan rakyat Tegal karena:
 - a. Peristiwa Tiga Daerah menimbulkan tindakan anarkhis.
 - b. Koordinasi pemerintah di daerah Karesidenan Pekalongan tidak dapat dilaksanakan di tiga daerah karena di tiga daerah dijalankan oleh orang-orang komunis.
 - c. Laskar di tiga daerah ini tidak mengikuti badan pemerintahan Komite Nasional Indonesia (KNI)
2. Adanya berita-berita dari Markas Besar tentara bahwa dalam waktu lima hari lagi, Presiden RI bersama dengan Panglima Sudirman akan berkunjung ke Pekalongan dan Tegal (Jarahdam VII, 1968:27).

Rencana operasi tersebut banyak mendapat dukungan rakyat luas dan fihak kepolisian serta para tokoh pejuang. Operasi yang menyeluruh dan dilakukan serentak di tempat-tempat konsentrasi komplotan massa tiga daerah berjalan dengan lancar tanpa rintangan yang berarti. Beberapa orang yang dianggap tokoh ditangkap dan ditawan di gudang kopi. Sedangkan para pemimpin mereka sudah banyak yang melarikan diri. Kepercayaan rakyat kepada TKR dapat tercipta kembali untuk melanjutkan perjuangan dan mengamankan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

Pada tanggal 25 Desember 1945, Presiden RI Sukarno dan Panglima Besar Jenderal Sudirman, masing-masing beserta rombongan dengan menumpang Kereta Api Istimewa, melakukan kunjungan ke Tegal dan Pekalongan untuk menyelesaikan masalah politik di tempat itu. Adapun rombongan Presiden terdiri dari: 1. Ibu Fatmawati Sukarno, 2. Wakil Presiden RI Drs. Moh.Hatta beserta ibu, 3. Perdana Menteri Sutan Sjahrir, dan 4. Menteri Dalam Negeri Mr.Hermani. Adapun rombongan Panglima Besar Jenderal Sudirman terdiri dari: 1. Letjen.Oerip Sumohardjo, Kepala Staf APRI, 2. Mayjen. Simatupang, 3. Mayjen. Kafrawi, dan para perwira lainnya dari MBT.

Kedatangan rombongan disambut dengan upacara militer di halaman Stasiun Kereta Api Tegal. Rombongan langsung menuju ke Stadion Sepak Bola Slerok Tegal untuk menyampaikan pidato. Pidato Presiden RI antara lain menanyakan keadaan rakyat, apakah rakyat di Tegal, Brebes, Pemalang akan mencoba membuat negara dalam negara, membentuk republik kecil-kecilan seperti Republik Talang, Republik Slawi, Republik Tegal atau Republik Brebes. Rapat umum tersebut berjalan tertib dan aman tanpa gangguan apapun.

Selanjutnya penyelesaian mengenai persoalan “Tiga Daerah” diambil alih oleh pemerintah pusat dengan jalan:

- a. Memindahkan Sarjio ke Yogyakarta
- b. Mengangkat residen baru dengan stafnya maupun bupati-bupati di daerah-daerah
- c. Membawa masalahnya di muka sidang Pengadilan Negeri Pekalongan.
- d. Mengenai orang-orang yang telah diangkat menjadi pejabat pamong praja seperti lurah, camat, wedono, bupati oleh Gabungan Badan Perjuangan Tiga Daerah tetap diperkenankan menduduki jabatannya sebagai pejabat pemerintah yang sah atas persetujuan rakyat setempat (Kodam VII,1968:24).

Pada tanggal 14,15,18,19,21 Oktober 1946 di Pekalongan dibentuk pengadilan bagi para pelaku gerakan anarkhis tersebut termasuk di dalamnya Kutil alias Sakyani. Bertindak sebagai hakim ketua Suprapto,S.H., seorang hakim tinggi Pekalongan yang kelak menjadi jaksa agung. Sebagai saksi adalah Kol. H. Iskandar Idris, Letkol. Wadiono, H. Iksan Dimiyati, H. Ismail Hasan Idris, Sudarsono Amir dan para bekas tahanan tiga daerah yang lain. Ditunjuk sebagai pembela oleh pemerintah ialah Supeno, Usman Sastro Amijoyo yang merupakan tokoh dari PSI.

Sebagai pegangan dalam pembelaan perkara adalah surat pengangkatan Sardjio dari pemerintah pusat. Dengan demikian berarti bahwa Gerakan Badan Perjuangan Rakyat Tiga Daerah ini adalah gerakan yang dilegalisir oleh Pemerintah. Adapun tuduhan yang dikenakan oleh para terdakwa adalah: “Menggunakan masa rakyat dengan jalan kekerasan untuk merebut

kekuasaan Pemerintah RI yang sah, khususnya di daerah Tegal, Brebes, Pemalang dan Pekalongan" (Achmad, 1977:29).

Tanggal 21 Oktober 1946, hukuman mati dijatuhkan terhadap Kutil alias Sakyani, algojo Tiga Daerah karena dianggap bersalah. Sebelum hukuman mati tersebut dilaksanakan, terjadi Agresi Belanda Pertama (Juli 1947), narapidana bersama pemerintah karesidenan diungsikan ke pegunungan di selatan Pekalongan. Walaupun hakim Suprapto tidak sempat membawa barang-barang pribadinya, tetapi sempat membawa dua koper berisi transkripsi interogasi pemeriksaan pendahuluan dan proses pengadilannya. Kutil yang banyak akal, melarikan diri ke Jakarta, dan bekerja sebagai tukang cukur, profesi lamanya sewaktu di Tegal. Di Kebun Kacang Gang II dia membuka pangkalan cukurnya. Tahun 1949 wajahnya dikenali orang Slawi, dan kemudian ditahan oleh Polisi Belanda (Jakarta di bawah kekuasaan Belanda).

Pada penyerahan kedaulatan bulan Januari 1950 Kutil ikut diserah-terimakan kepada polisi Republik, dikirim kembali ke Semarang dan kemudian ke Pekalongan, dan tiba di Pekalongan tanggal 13 Februari 1950. Suprapto, yang menjabat Jaksa Agung RI, diminta kedatangannya di Pekalongan dan menjadi satu-satunya saksi yang dapat memastikan hukuman yang dulu dijatuhkan atas diri Kutil. Tanggal 8 April penegasan kembali hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Pekalongan pada 21 Oktober 1946 dikelurkan.

Pada tanggal 1 Agustus 1950, Kutil mengajukan langsung permohonan pengampunan kepada Presiden Sukarno. Permohonannya ditolak pada tanggal 21 April 1951. Dua minggu kemudian Kutil dibawa ke pantai dekat Pekalongan, tempat yang dipilih untuk eksekusi oleh Komandan Militer Kota Sudarmo, yang menjadi Kepala Staf Resimen XVII TKR di Pekalongan

semasa Peristiwa Tiga Daerah dan ikut memainkan peranan penting dalam operasi penghancurannya. Ketika ditanya apa permintaan terakhirnya, Kutil Menjawab "tidak ada". Dia menolak matanya ditutup, dan dengan berjongkok ia menghadapi butir-butir peluru yang mengakhiri hidupnya pada tanggal 5 Mei 1951 (Lucas, 2004:309-310).

C. Bidang Pertahanan dan Keamanan

Setelah Peristiwa Tiga Daerah berakhir, maka pada tanggal 1 Januari 1946 terbentuklah Resimen XIII Tegal dengan Komandan Resimen Letkol Rachim Gondo Suwito, dan sejak itu TKR di Tegal tidak lagi masuk ke dalam Resimen XVII Pekalongan melainkan berdiri sendiri dan masuk ke dalam Divisi II/Sunan Gunungjati (Sejarah Kodam VII, 1968:30)¹⁸. Demikian pula TKR Laut telah disempurnakan dan terbentuklah ALRI Pangkalan IV Tegal, dengan Panglima Letkol Darwis Djamin.

Pangkalan Angkatan Laut di Tegal ini juga disebut CA IV (Corp Armada IV) yang keberadaannya berkaitan dengan persitiwa di Semarang. Pada tanggal 14 – 18 Oktober 1945, di Semarang terjadi pertempuran antara TKR laut dengan NICA. Tekanan-tekanan NICA terhadap TKR dirasakan sangat berat, maka terpaksa mengundurkan diri ke arah barat atas perintah Gubernur Jawa Tengah Wongsonegoro, SH. Dari sinilah kemudian pasukan TKR laut pimpinan A. Dipo, Agus Subekti dan O.B.Syaaf mendirikan pangkalan angkatan laut di Tegal yang kemudian dipimpin oleh Darwis Djamin yang telah tersebut di atas. Adapun A. Dipo mendirikan pangkalan angkatan laut di Pekalongan. Di sisi lain pangkalan angkatan laut di Tegal semakin

¹⁸ Tanggal 5 Oktober 1945 keluar maklumat Pemerintah yang menyatakan berdirinya Tentara Keamanan Rakyat (TKR) di bawah Suprijadi (Kartodirdjo,S., 1977c:33).

kuat dalam menghadapi Belanda, dengan bantuan pasukan dari Jakarta pimpinan Ali Sadikin, sehingga dapat menguasai daerah Tanjungsari hingga Semarang barat (S. Adi Sidharta, 1979:III).

Kemajuan dapat diraih oleh pangkalan angkatan laut, CA IV di Tegal. Atas prakarsa beberapa perwiranya, berdiri Sekolah Angkatan Laut (SAL) di bawah pimpinan Laksamana III Adam bertempat di Kota Tegal, sedangkan Sekolah Perwira Angkatan Laut berada di Kalibakung dengan komandan Mayor Edy Martadinata (S. Adi Sidharta, 1979:III). Akan tetapi kemajuan tersebut malah menimbulkan kesalahpahaman antar anggota angkatan laut, namun CA IV Tegal tetap menjaga kekompakan.

Pada tanggal 1 Juli 1947 pangkalan angkatan laut Tegal terkena imbas oleh serangan Belanda yang semula menyerang pangkalan angkatan laut II di Cirebon. Sekalian saja dari Cirebon Belanda dilangsungkan untuk menduduki pangkalan laut Tegal. Oleh serangan tersebut, terpaksa pasukan CA IV Tegal mengundurkan diri ke Bumijawa dan Pekalongan untuk menyatukan kekuatan dalam rangka menghadapi Belanda yang melancarkan agresinya (S. Adi Sidharta, 1979:III).

Pada waktu terjadi benturan dengan Belanda di Sragi, pasukan angkatan laut Tegal terdesak dan kemudian mundur ke Kalibakung untuk mengadakan konsolidasi. Anggota pasukan CA IV Tegal ini kemudian mengadakan penghadangan-penghadangan dan penyerangan-penyerangan terhadap tentara Belanda. Tepat jauh bekal persenjataan antara kedua belah pihak, mengakibatkan kelemahan di pihak CA IV Tegal. Akhirnya Belanda dapat menduduki tempat-tempat, Tegal, Cirebon dan Pekalongan. Selanjutnya pangkalan angkatan laut IV Tegal terpecah, berkedudukan di Wonosobo. Walaupun demikian kekompakan tetap dijaga. Untuk menjalin konsolidasi, Ali Sadikin mendapat tugas untuk memimpin Stasiun yang kemudian disebut

Stasiun "I" . Pangkalan IV yang ada di Wonosobo mendapat perintah agar dirubah namanya menjadi Resimen Samudra, sampai terjadinya gencatan senjata (S. Adi Sidharta, 1979:III).

Corp Armada IV Tegal anggota-anggotanya terdiri dari pelaut-pelaut, perwira-perwira lulusan Sekolah Pelayaran Tinggi Semarang, Tegal dan Jakarta. Selain itu juga menampung para pejuang yang tidak berpengalaman dan berpendidikan laut. Selanjutnya Mayor Soehadi membentuk pasukan Korps Marinirs. Oleh karena itu jadilah adanya Korp Marinirs yang organik termasuk dalam CA-IV, di samping terdapat Corps Armada IV-A yang beranggotakan para pelaut, para pejuang dari luar Jawa (S. Adi Sidharta, 1979:III). Dalam perjalanan sejarah daerah Tegal dihiasi oleh pernik-pernik gelombang perjuangan masyarakat Tegal seperti membangun pangkalan angkatan laut, lembaga pendidikan tentang laut, juga kerikil-kerikil yang menjadi sandungan perjuangan misalnya adanya peristiwa tiga daerah yang telah terselesaikan itu.

Berakhirnya Peristiwa Tiga Daerah dan pemerintah membentuk susunan pemerintahan baru dan pangreh praja baru yang diinginkan masyarakat yaitu pemimpin yang adil, jujur, dan mempunyai wibawa. Pemerintah membentuk badan-badan perjuangan bersenjata yaitu:

1. Pada tanggal 15 Januari 1946, terbentuklah Resimen Hisbullah Tegal, dengan Komandan Resimen Kosim Nachrawi.
2. Pada tanggal 1 Maret 1946 terbentuklah BPRI Resimen Pusponegoro, sebagai Koordinator/Komandan Resimen Moh. Yunus Pusponegoro.
3. Menyusul kemudian terbentuk Laskar Rakyat Jawa Barat Karesidenan Pekalongan di Tegal, dengan pimpinan Zubir.

Sejak bulan Maret 1946, Resimen XIII Tegal, ALRI Pangkalan IV Tegal serta badan-badan perjuangan bersenjata di Tegal dengan secara bergantian mengirimkan pasukan-pasukannya ke berbagai front di daerah-daerah yang telah diduduki oleh Belanda.

- a. Resimen XIII Tegal ke front Bandung Utara, Lembang-Ciater dan front Bandung Timur, Ujung Berung, Cileunyi.
- b. ALRI Pangkalan IV Tegal, ke front Karawang Timur, dan front Semarang Barat.
- c. Resimen Hisbullah Tegal, ke front Bandung Utara, Lembang-Ciater, dan front Semarang Barat bagian Selatan.
- d. BPRI Tegal, ke front Semarang Barat bagian utara.
- e. Laskar Rakyat Tegal, ke front Karawang Timur dan front Semarang Barat (Jarahdam VII, 1968: 31).

Dengan dibentuknya badan perjuangan di atas keadaan politik daerah Tegal menjadi lebih aman dan sistem pemerintahan yang stabil dan dinamis. Pemerintah daerah Tegal telah berhasil melewati beberapa sandungan selanjutnya melangkah maju ke depan untuk meraih kemakmuran dan keamanan.

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

Suatu tempat yang pada perkembangannya kemudian mencapai status sebagai kota melewati proses sejarah panjang. Proses tersebut adakalanya disertai bumbu agar semakin interest bagi yang mendengarnya. Terlebih lagi apabila dalam pertumbuhannya tempat tersebut menjadi sebuah kota yang terkenal dan mempunyai keistimewaan. Sikap tidak hati-hati akan menjerumuskan seseorang dan bahkan dapat menghasilkan sesuatu yang ahistoris. Apabila berhadapan dengan kemustahilan perlu memeriksa kembali dengan acuan yang akurat.

Mengenai asal muasal kemunculan Tegal, dapat ditelusuri berdasarkan cerita yang hidup di kalangan rakyat, dan berdasarkan sumber sejarah. Berdasarkan cerita, Tegal berasal dari kata *tetegal*, yaitu lahan yang diolah sebagai tanah pertanian. Ki Sebayu dipercaya sebagai penguasa Tegal yang pertama. Dalam sejarah, Tegal merupakan daerah wilayah Kerajaan Mataram Islam. Masih berkaitan dengan Mataram, pada masa pendudukan Belanda, Tegal di bawah pengaruh kekuasaan Hindia Belanda.

Kota Tegal pada tanggal 21 Februari 1906 menjadi kota besar yang otonom. berdasarkan *Staatsblad* Tahun 1906 Nomor 123. Kepala Daerah adalah Asisten Residen yang membawahi Kabupaten Tegal. Pada tahun 1928 Kota Tegal menjadi ibukota Karesidenan Tegal terdiri dari Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, dan Pekalongan. Kabupaten Tegal berkedudukan di Slawi. Pada tahun 1930 Karesidenan Tegal digabungkan dengan Pekalongan, ibukotanya di Pekalongan, sehingga Kota Tegal dan Kabupaten Tegal di bawah Karesidenan Pekalongan.

Pembentukan pemerintahan otonom menyebabkan adanya dua bentuk pemerintahan, yang dijalankan orang Eropa dan pemerintahan tradisional yang dijalankan oleh seorang pamong praja Bumiputera. Akan tetapi tetap pemerintahan orang Eropa juga menguasai pemerintahan tradisional Bumiputera.

Di kalangan masyarakat Indonesia tumbuh kesadaran berbangsa sehingga para pemuda memacu diri dan menyadari bahwa untuk melawan penjajah harus dengan cara modern. Sehubungan dengan hal itu timbul adanya organisasi pemuda termasuk para mahasiswa *STOVIA*. Tahun 1908 merupakan tonggak sejarah kemajuan bangsa dengan adanya organisasi modern seperti Budi Utomo atas jasa Dr.Wahidin Sudirohusodo yang memperhatikan bidang pendidikan dan pengajaran. Bidang pendidikan juga dilakukan oleh lembaga lainnya misalnya *Zending*, *Missi*, Muhammadiyah, Pondok Pesantren, Taman Siswa maupun perorangan.

Pada tahun 1942, Tegal di bawah pengaruh penguasa pemerintah Bala Tentara Jepang. Jepang menjajah Indonesia sampai tahun 1945. Disusul kemudian diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan Indonesia yang disambut dengan gembira

tersebut tak berlangsung lama, karena di dalam negeri timbul gejolak. Kemungkinan ada rasa tidak puas, di Tegal timbul Gerakan Tiga Daerah dipimpin oleh Kutil atau Sakyani yang ingin merebut kekuasaan daerah Tegal, namun dapat direddam.

Setelah Jepang jatuh, Belanda datang lagi dengan menumpang tentara Sekutu ke Indonesia dan ingin berkuasa kembali. Hal ini kemudian diikuti peristiwa Agresi Militer yang dua kali dilakukan Belanda yaitu tahun 1947 dan 1948, mendapat perlawanan dari TNI dan segenap rakyat. Dengan perjuangan dan diplomasi, akhirnya pada tahun 1949 Belanda menyerahkan kedaulatan.

B. Saran

Sejarah dapatlah dipakai sebagai cermin untuk mengambil kebijakan rencana melangkah ke depan. Demikian pula berbagai peristiwa di Tegal dapat dijadikan contoh bagi siapa pun yang berkecimpung di pemerintahan, sosial masyarakat, pendidikan, ekonomi dan budaya. Nilai positif dan hikmah dari peristiwa tersebut dapat dipetik untuk masukan bagi siapa saja.

Cara mempersatukan para pemuda, membangkitkan semangat cinta tanah air, memerangi kebodohan, menghadapi penjajah, untuk mencapai cita mulia yaitu kemerdekaan. Untuk meraih itu semua diperlukan kesadaran dan di sini persatuan sangat penting. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku dan agama, maka nilai persatuan ini bisa diterapkan masa sekarang dalam menghadapi tantangan ke depan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada era yang telah berganti seperti sekarang ini, nilai juang yang pernah dimiliki rakyat Tegal di masa lampau perlu diwarisi dan diteladani. Wujud perjuangan tidaklah hanya mengangkat senjata, namun di bidang sosial, ekonomi dan budaya dapat memperkaya batiniah, menambah sikap bijak dalam menghadapi masalah-masalah sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad.

- 1977 *Ungkapan Peristiwa Tiga daerah (Tegal, Brebes, Pekalongan)*. Tegal: Markas Cabang LVRI Kab./Kota Tegal

Arsip Nasional Republik Indonesia

- 1973 *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia-Belanda*, Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah No. 5. Jakarta : ANRI

Astuti, MSP

- 2008 *Apakah Mereka Mata-Mata ? Orang-Orang Jepang di Indonesia (1868-1942)*, Yogyakarta : Ombak.

Budiawan.

- 2006 *Anak Bangsawan Bertukar Jalan*. Yogyakarta : LKIS

Cessnasari.

- 2011 “Pasang Surut Kerajinan Logam Tegal”, *Suara Mereka*, 13 Maret, Semarang.

Daryono, Y.,dkk.

- 2008 *Tegal Stad Evolusi Sebuah Kota*. Tegal: Informasi dan Humas Kota Tegal

De Graaf, H.J. & Pigeaud,Th.

2001 Kerajaan Islam Pertama Jawa Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI, cetakan ke-4, Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti dan KITLV.

Djawatan Penerangan RI

1953 *Djawa Tengah*. Semarang: Djawatan Penerangan Republik Indonesia

Djumhur, Danasuprapta, H

1976 *Sejarah Pendidikan*. Bandung : CV. Ilmu

Furnivall,J.S.

2009 *Hindia Belanda Studi tentang Ekonomi Majemuk* (terjemahan oleh Samsudin Berlian), Jakarta: Freedom Institute.

Gottschalk, Louis

1985 *Mengerti Sejarah* (terjemahan Nugroho Notosusanto dari judul asli: *Understanding history: a primer of historical method*), Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), cetakan ke-4

Hermawan, W.

2009 “Profil Kabupaten Tegal”, dalam *warteg.or.id*. tanggal 13 Januari.

Info Tegal, Kliping Internet 0295, Senin, 26 April 2010

Jasamihardja, Sutopo.

1998 *Perang Gerilya Perang Rakyat Semesta*. Jakarta: Yayasan 19 Desember 1948.

Kasmadi, H, dkk

1977/1978 *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jawa Tengah*. Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kabudayaan Daerah.

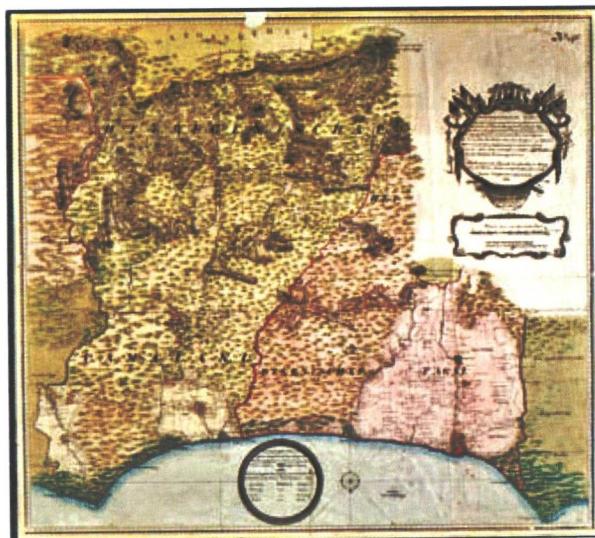
- 1978-1988 : Hasyim Dirdjasoebarata
1988-1991 : Drs. Winahto
1991-1999 : Drs. Soetjipta
1999-2004 : Drs. H. Soediharto
2004 : Agus Riyanto, S.Sos., MM
H. Hamam Miftah, S.Ag., MM (Wakil Bupati)



Het Tegal Regenschap

Peta daerah Tegal pada masa pendudukan Belanda

(Sumber:<http://14.itrademarket.com/pdimage301809430.lowres.jpg.jpg>)

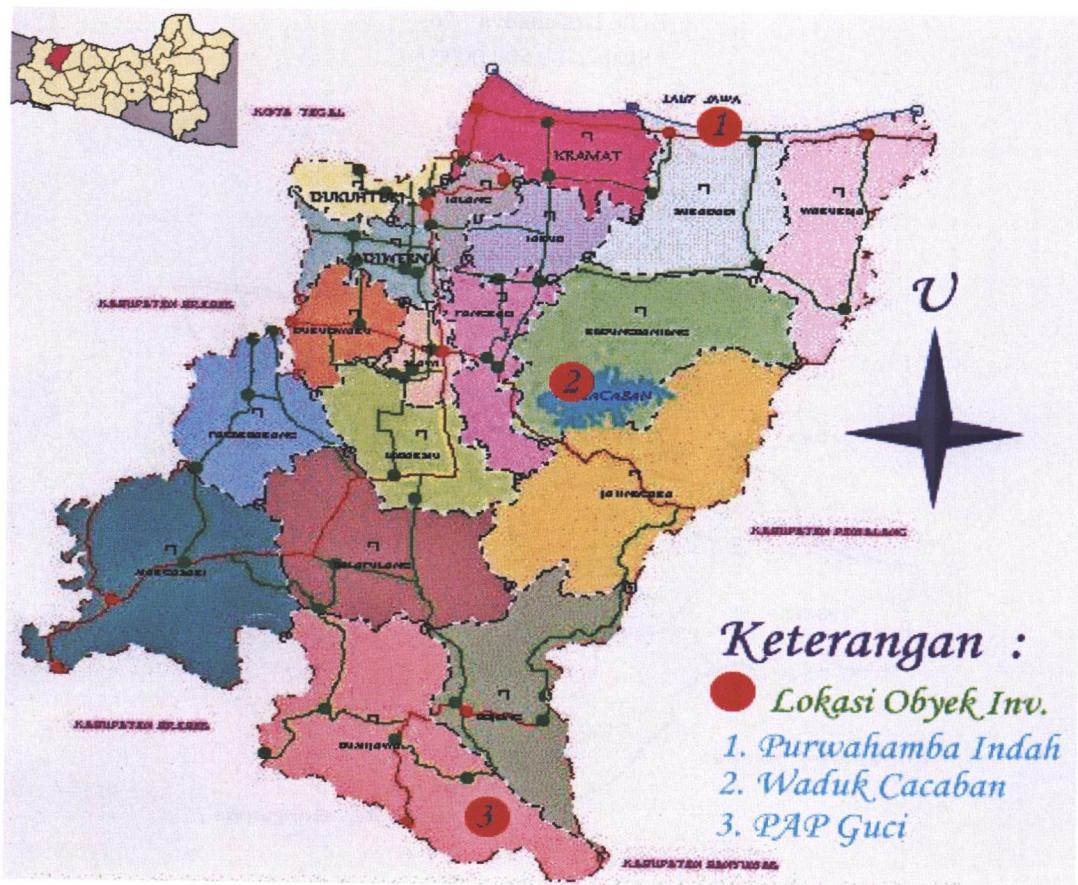


TEGAL Regenschap

Peta daerah Tegal pada masa pendudukan Belanda

(Sumber:<http://10.itrademarket.com/pdimage75183775-lowres.jpg>)

DENAH ADMINISTRASI KABUPATEN TEGAL (Kota Tegal di luar denah)



Keterangan :

- *Lokasi Obyek Inv.*
- 1. Purwahamba Indah
- 2. Waduk Cacaban
- 3. PAP Guci

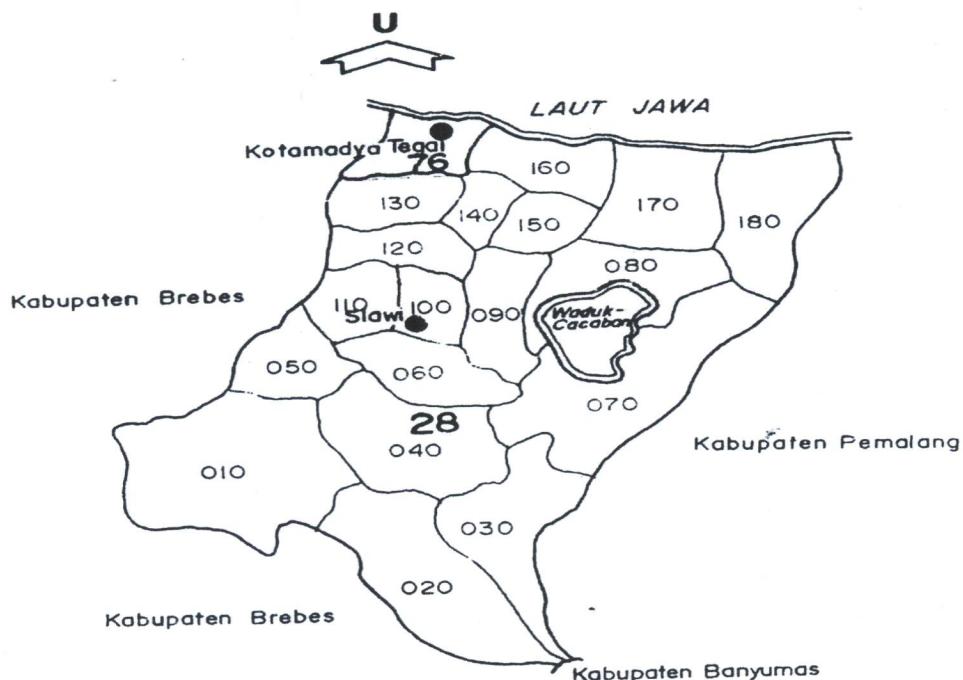
(Sumber: Info Tegal, Kliping Internet 0295, Senin, 26 April 2010)

Peta Kabupaten Tegal

Kode Kabupaten : 28

Kode Kotamadya : 76

Skala : 1 : 500.000



Kecamatan :

- | | |
|--------------------|----------------|
| 010. Margasari | 100. Slawi |
| 020. Bumijawa | 110. Dukuhwaru |
| 030. Bojong | 120. Adiwerma |
| 040. Balapulang | 130. Dukuhturi |
| 050. Pagerbarang | 140. Talang |
| 060. Lebaksiu | 150. Tarub |
| 070. Jatinegara | 160. Kramat |
| 080. Kedungbanteng | 170. Suradadi |
| 090. Pangkah | 180. Warureja |

Tegal

Dalam Lintasan Sejarah

Dengan memanfaatkan metode sejarah, penelitian ini berusaha mengungkapkan perjalanan sejarah Tegal sejak tahun 1908 hingga tahun 1949. Keberadaan Tegal sudah lama dikenal sebagai kota pelabuhan, dan mencuat pada masa Mataram Islam difungsikannya sebagai pelabuhan penting pada masa itu. Selanjutnya tidak hanya Mataram saja yang menggunakan, namun Belanda juga ikut memanfaatkannya apalagi Tegal mempunyai hasil bumi yang baik.

Pada tahun 1942 Tegal di bawah pemerintah Bala Tentara Jepang. Dengan penuh harap akan adanya perbaikan, para pemuda menyambut kedatangan bangsa Jepang dengan senang hati. Ternyata harapannya keliru karena perlakuan Jepang tidak lebih baik daripada penjajah sebelumnya. Para pemuda melakukan perlawanan terhadap Jepang dengan sembunyi-sembunyi. Setelah Jepang menyerah pada Sekutu, para pemuda Indonesia berhasil merebut kekuasaan dari tangan Jepang pada tahun 1945.

Setelah kemerdekaan, sementara para petinggi beserta jajarannya kaitannya dengan penguasa daerah sibuk menata pemerintahan yang masih baru, di masyarakat terjadi letusan-letusan kecil. Rasa tidak puas kaum muda memicu gejolak yang kemudian timbul Peristiwa Tiga Daerah (Tegal, Pemalang dan Brebes), dipelopori oleh Kutil ingin merebut kekuasaan. Akan tetapi hal itu dapat dipadamkan. Perjuangan tetap berlanjut untuk mempertahankan kemerdekaan. Pada masa ini dikenal dengan masa revolusi dan terjadi perang rakyat semesta termasuk masyarakat Tegal melawan penjajah yang ingin kembali berkuasa di Indonesia. Dengan perjuangan yang berat termasuk mengangkat senjata, dan berbagai jalan keluar baik melalui mediasi, diplomasi politik, akhirnya dilaksanakan juga penyerahan kedaulatan Republik Indonesia pada tahun 1949. Selanjutnya untuk memajukan Indonesia, pada tahun 1950 dilakukan pembentahan pemerintahan di sana-sini.

